



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN



PETA JALAN

SATUSEHAT SDMK

2025 - 2029

**Optimalisasi Sistem Informasi
Sumber Daya Manusia Kesehatan**
untuk Mendukung Pengelolaan Tenaga
Kesehatan yang Efektif dan Berkualitas

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
2025

PETA JALAN

SATU SEHAT SDMK 2025 - 2029

**Optimalisasi Sistem Informasi
Sumber Daya Manusia
Kesehatan**

untuk Mendukung Pengelolaan Tenaga
Kesehatan yang Efektif dan Berkualitas

PETA JALAN

SATU SEHAT SDMK

2025 - 2029

Optimalisasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan

untuk Mendukung Pengelolaan Tenaga Kesehatan yang Efektif dan Berkualitas
FEBRUARI, 2025

Disusun Oleh:

Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tim Kerja Data dan Informasi

Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya
Manusia Kesehatan
PETA JALAN SATUSEHAT SDMK 2025-2029
Optimalisasi Sistem Informasi Sumber Daya
Manusia Kesehatan untuk Mendukung Pengelolaan
Tenaga Kesehatan yang Efektif dan Berkualitas
Jakarta, 2025

Penyusunan dokumen ini didukung oleh hibah WHO Indonesia untuk Kementerian Kesehatan pada Biennium 2024-2025

TIM PENYUSUN

(disusun berdasarkan abjad)

Penanggung Jawab

Albertus Yudha Poerwadi
Zakiyah Eke

Penulis Utama

Aliya Oknawati
Hilmy Hanif
Prasetya Dwicahya
Samuel J. Olam
Try Fathur Rachman

Tim Penyusun

Aditya Bayu Sasmita
Dina Rahma
Eka Febrianto
Riza Sofia Parmawanty
Timor Utama
Zamni Haquel

Asisten Tim Penyusun

Kaysea Safadristi Narendragharini

Desain Grafis

Liana Tan

Penerbit

Kementerian Kesehatan RI

Kami mengucapkan **terima kasih** kepada para pihak yang telah memberikan masukan dan terlibat aktif dalam penyusunan dokumen Peta Jalan SATU SEHAT SDM ini, khususnya kepada:

Ibu Susryastri Boni dan Tim TTO
Bapak Ahmad Hidayat (Ketua Technical Working Group SATUSEHAT)

Bapak Aang Abu Dzar dan Tim Pusdatin Kemenkes, serta PASSKAS dan PMO Ditjen SDM

Kata Pengantar

Dengan penuh rasa syukur, kami mempersembahkan Peta Jalan SATUSEHAT SDM 2025-2029 sebagai panduan strategis dalam transformasi digital pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Indonesia.

Transformasi digital di sektor kesehatan bukan sekadar inovasi, tetapi kebutuhan mendesak untuk memastikan data tenaga kesehatan yang lebih terstruktur, akurat, dan mudah diakses. SATUSEHAT SDM hadir sebagai solusi yang tidak hanya menyederhanakan pengelolaan SDM tetapi juga memperkuat sistem kesehatan nasional melalui pemanfaatan data yang lebih efektif dan efisien.

Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan SDM, termasuk fragmentasi data, ketimpangan distribusi tenaga kesehatan, serta kebutuhan peningkatan kompetensi dan retensi tenaga kesehatan. Data yang tersebar di berbagai sistem seringkali menghambat koordinasi dan pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Oleh karena itu, SATUSEHAT SDM dikembangkan sebagai bagian dari ekosistem SATUSEHAT, yang memungkinkan integrasi dan interoperabilitas dengan berbagai sistem informasi kesehatan lainnya.

Peta jalan ini disusun untuk memberikan arah strategis dalam implementasi SATUSEHAT SDM selama periode 2025-2029. Dengan mengacu pada Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK), misi Digital Health Transformation Strategy (DHTS), dan UU Kesehatan Tahun 2023, peta jalan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pengelolaan SDM selaras dengan kebijakan nasional. Dengan demikian, implementasi SATUSEHAT SDM tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi tenaga kesehatan, tetapi juga mendukung perencanaan kebijakan yang lebih presisi.

Kami mengajak semua pihak untuk mendukung dan berkolaborasi dalam implementasi peta jalan ini demi menciptakan sistem kesehatan yang lebih kuat dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Terima kasih atas kerja sama dan kontribusi semua pihak dalam mendukung transformasi ini.



Dr. Yuli Farianti, M. Epid

Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

Ringkasan Eksekutif

Peta Jalan SATUSEHAT SDM 2025–2029 menyajikan rencana komprehensif penguatan sistem informasi dan pemanfaatan data Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) untuk mendukung pengambilan kebijakan dan pengelolaan SDM di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan pemerataan distribusi SDM, untuk menyediakan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, meningkatkan derajat kesehatan, dan mencapai tujuan pembangunan nasional maupun global.

Analisis situasi terkini menunjukkan bahwa SATUSEHAT SDM sebagai sebuah sistem informasi SDM Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Hal ini termasuk data dan aplikasi yang terfragmentasi, proses entri data yang tumpang tindih, kurangnya standarisasi dalam pengelolaan data, serta minimnya interoperabilitas dan integrasi data SDM secara nasional. Tantangan terkait literasi digital pengguna dan kapasitas SDM yang mengelola sistem informasi juga perlu menjadi perhatian, sementara kesempatan bagi kemitraan dengan berbagai aktor di dalam ekosistem belum dimanfaatkan dengan baik. Berbagai temuan tersebut merefleksikan kebutuhan mendesak terhadap adanya rencana strategis jangka pendek dan menengah dalam menyelesaikan tantangan teknis dan adaptif untuk optimalisasi penyelenggaraan SATU SEHAT SDM.

Dalam merespons berbagai tantangan tersebut, Peta Jalan SATUSEHAT SDM 2025–2029 telah merumuskan serangkaian misi strategis. Pertama, meningkatkan keandalan infrastruktur arsitektur dan teknologi informasi untuk mendukung interoperabilitas dan integrasi data SDM, serta memastikan keamanan dan privasi data. Kedua, mewujudkan tata kelola data yang terstruktur dan berkualitas serta kebijakan organisasi yang mendukung kualitas data. Hal tersebut akan mengatasi isu-isu terkait dengan inkonsistensi dan duplikasi data dan menciptakan sebuah sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Ketiga, mengembangkan kapasitas dan kompetensi SDM dalam memanfaatkan sistem digital SDM. Hal ini meliputi pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga kesehatan untuk mengelola dan memanfaatkan teknologi informasi dan data dalam mengambil kebijakan SDM yang strategis. Keempat, mendorong kolaborasi dalam ekosistem digital SDM, antara Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, dan Media (A-B-C-G-M). Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat inovasi dalam layanan kesehatan, mendukung pengembangan solusi kesehatan yang berkelanjutan, dan akhirnya, memastikan implementasi kebijakan kesehatan yang efektif yang berorientasi pada data dan bukti.



Misi 1: Meningkatkan keandalan infrastruktur arsitektur dan teknologi informasi

Luaran	Kegiatan
<p>1.1 Terwujudnya mekanisme integrasi dan interoperabilitas yang efektif untuk mendukung pengelolaan data SDMK secara terintegrasi melalui aplikasi SATUSEHAT SDMK.</p>	<p>1.1.1 Merancang dan menetapkan mekanisme pertukaran data yang terstandar untuk mendukung interoperabilitas dalam aplikasi SATUSEHAT SDMK</p>
	<p>1.1.2 Menerapkan layanan service bus sebagai perantara untuk integrasi data dan sistem dalam aplikasi SATUSEHAT SDMK</p>
	<p>1.1.3 Mengembangkan dan menerapkan standar API (Application Programming Interface) untuk mendukung integrasi data dan sistem dalam aplikasi SATUSEHAT SDMK.</p>
<p>1.2 Terjaminnya keamanan dalam proses integrasi dan interoperabilitas sistem melalui penerapan protokol enkripsi, otentikasi, dan otorisasi yang sesuai standar</p>	<p>1.2.1 Menerapkan mekanisme teknis implementasi perlindungan data pribadi (PDP)</p>
	<p>1.2.2 Menerapkan framework keamanan berlapis dengan standar ISO 27001:2022 pada setiap sistem yang akan saling terhubung untuk memastikan keamanan informasi</p>
<p>1.3. Terjaminnya kinerja server yang optimal untuk mendukung kelancaran operasional dan pengelolaan data pada sistem.</p>	<p>1.3.1. Menyusun dan mengimplementasikan rencana cadangan untuk infrastruktur teknologi guna mengantisipasi downtime server.</p>
	<p>1.3.2. Penyesuaian kapabilitas server untuk mengelola penggunaan SATUSEHAT SDMK dalam berbagai macam situasi dan kondisi</p>
	<p>1.3.3 Menerapkan sistem automated alerting dan incident tracking system untuk memonitor keamanan dan kesehatan sistem secara real-time sehingga dapat mendeteksi ancaman serta insiden dengan cepat.</p>



Misi 2: Mewujudkan tata kelola data yang terstruktur dan berkualitas

Luaran	Kegiatan
<p>2.1. Terimplementasinya tata kelola data yang terstandar di seluruh platform SATUSEHAT SDM untuk mendorong peningkatan kualitas data</p>	2.1.1 Melaksanakan koordinasi formal lintas direktorat yang dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan tata kelola data dan organisasi dalam pengembangan SATUSEHAT SDM
	2.1.2 Melakukan pemetaan kebutuhan data dan informasi dari setiap program yang direncanakan
	2.1.3 Mengoptimalkan standar data terkait tenaga kesehatan untuk mendukung pertukaran dan integrasi data secara interoperable
	2.1.4 Mengoptimalkan kamus data terkait tenaga kesehatan untuk mendukung pertukaran dan integrasi data secara interoperable
	2.1.5 Melakukan implementasi kebijakan privasi data pada SATUSEHAT SDM
	2.1.6 Melakukan tinjauan kebijakan terkait pengembangan SATUSEHAT SDM
	2.1.7 Mengembangkan mekanisme pengkajian data dan validasi data berjenjang untuk meningkatkan kualitas data SATUSEHAT SDM
	2.1.8 Mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi terpadu yang mampu memantau secara real-time tata kelola data, kualitas data, dan pemanfaatannya, serta memastikan integrasi data ke dalam platform SATUSEHAT SDM untuk mendukung penerbitan laporan evaluasi berkala
<p>2.2. Pemanfaatan data SATUSEHAT SDM untuk pengembangan kebijakan</p>	2.2.1 Menyediakan dashboard yang komprehensif, interaktif, dan sesuai kebutuhan direktorat (pengguna)
	2.2.2 Menyusun panduan teknis pemanfaatan SATUSEHAT SDM untuk fasyankes dan nakes dan named
	2.2.3 Pengelolaan permintaan akses data dan prioritas permintaan data SATUSEHAT SDM

Luaran	Kegiatan
<p>2.3. Tersedianya mekanisme pengelolaan pengaduan dalam pemanfaatan SATUSEHAT SDM</p>	<p>2.3.1. Menyusun mekanisme koordinasi dan evaluasi program lintas direktorat</p>
	<p>2.3.2. Membangun saluran komunikasi internal yang dapat menyelaraskan aduan dengan tim helpdesk terpusat terkait pengelolaan aduan SATUSEHAT SDM</p>
	<p>2.3.3. Sosialisasi dokumen resmi SOP pengelolaan aduan SATUSEHAT SDM kepada fasyankes dan nakes dan named</p>
	<p>2.3.4. Menyusun langkah aksi dari evaluasi rutin terhadap aduan yang diterima terkait SATUSEHAT SDM</p>
<p>2.4. Terpenuhinya kebutuhan data NHWA dari SATUSEHAT SDM</p>	<p>2.4.1. Melakukan pemetaan kebutuhan data dari NHWA dengan ketersediaan data dari SATUSEHAT SDM</p>
	<p>2.4.2. Mengadakan forum koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk membangun komitmen bersama dan menyusun struktur tata kelola utama NHWA yang terintegrasi dengan kebijakan nasional.</p>
	<p>2.4.3 Mengembangkan dashboard khusus berdasarkan indikator NHWA sehingga dapat memaksimalkan penggunaan SATUSEHAT SDM dalam skala yang lebih luas</p>



Misi 3: Mengembangkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam memanfaatkan sistem digital SDM

Luaran	Kegiatan
3.1 Terwujudnya program Data Champion pada Ditjen SDM untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan dan pemanfaatan data SATUSEHAT SDM secara optimal dan berkelanjutan.	3.1.1 Melakukan penunjukan dan operasionalisasi Data Champion pada setiap unit di Ditjen SDM untuk memperkuat pengelolaan dan pemanfaatan data secara strategis
	3.1.2 Meningkatkan kualitas dan kompetensi Data Champion melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan keterampilan terkait pengelolaan dan pemanfaatan data
3.2 Terwujudnya program Digital Leadership pada Ditjen SDM untuk mendorong transformasi digital yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan dalam pengelolaan SDM.	3.2.1 Mengembangkan dan melaksanakan program Digital Leadership untuk memastikan para pengambil kebijakan memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan dalam menghadapi tantangan digital
	3.2.2 Mendefinisikan kebutuhan data untuk mendukung pencapaian output, outcome, dan dampak melalui identifikasi dan dokumentasi kebutuhan data secara terstruktur
	3.2.3 Mendorong pelaksanaan pelatihan dan pembiasaan penggunaan data bagi pegawai Ditjen SDM untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan serta pemanfaatan data
3.3 Terwujudnya peningkatan budaya pemanfaatan data di Ditjen SDM untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti dan efisiensi operasional.	3.3.1 Menyusun dan mengimplementasikan sistem knowledge management yang berkelanjutan dengan memanfaatkan berbagai media untuk mendukung pengelolaan dan berbagi pengetahuan di Ditjen SDM
	3.3.2. Memastikan capaian implementasi SATUSEHAT SDM menjadi salah satu agenda dalam pembahasan isu strategis lintas sektor secara berkala
	3.3.3. Menyusun dan menerapkan mekanisme umpan balik pada setiap produk pemanfaatan data untuk memastikan kualitas, relevansi, dan kebermanfaatannya



Misi 4: Mendorong kolaborasi dalam ekosistem digital SDM

Luaran	Kegiatan
<p>4.1. Terjalinya kemitraan strategis antar stakeholder A-B-C-G-M (academician, business, community, government, media) untuk mengakomodasi kebutuhan pada setiap tahapan journey nakes dan named dari fase pendidikan hingga masuk ke pasar tenaga kerja SDM</p>	<p>4.1.1. Formalisasi forum koordinasi lintas A-B-C-G-M melalui pembentukan Technical Working Group</p>
	<p>4.1.2 Melakukan perencanaan kemitraan strategis stakeholder A-B-C-G-M yang berpotensi terlibat dengan SATUSEHAT SDM untuk penguatan/perluasan ekosistem SATUSEHAT SDM</p>
	<p>4.1.3 Menghubungkan platform data SATUSEHAT SDM dengan platform data lainnya terkait journey nakes dan named, seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, LPDP, BKN, BKD, INA-CRR, Kemendikti Saintek dan K/L/D/I lainnya</p>
	<p>4.1.4 Mengoptimalkan peran swasta untuk memfasilitasi kegiatan pelatihan bagi nakes dan named</p>
	<p>4.1.5 Mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk mengukur dampak dan keberlanjutan kemitraan strategis lintas A-B-C-G-M</p>
<p>4.2. Terlibatnya A-B-C-G-M untuk mendukung komunikasi, informasi, dan edukasi terkait SATUSEHAT SDM ke basis pengguna masing-masing</p>	<p>4.2.1 Mengoordinasikan dan menyebarkan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait SDM melalui saluran komunikasi multi-channel</p>
	<p>4.2.2 Melakukan advokasi pemanfaatan SATUSEHAT SDM kepada A-B-C-G-M melalui platform masing-masing</p>
	<p>4.2.3 Mengoptimalkan peran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sebagai perpanjangan tangan helpdesk untuk memberikan dukungan teknis dan operasional kepada tenaga kesehatan di daerah</p>
<p>4.3. Pemanfaatan dan/atau pertukaran data SATUSEHAT SDM untuk dibagipakaikan kepada lintas A-B-C-G-M</p>	<p>4.3.1 Menyusun mekanisme pemanfaatan dan/atau pertukaran data untuk dibagipakaikan kepada lintas A-B-C-G-M termasuk untuk keperluan riset/publikasi</p>
	<p>4.3.2 Menerima hasil riset/analisis kebijakan dari penggunaan/pemanfaatan data SATUSEHAT SDM untuk peningkatan kebijakan SDM</p>
	<p>4.3.3 Menyusun mekanisme pemanfaatan data SATUSEHAT SDM yang bisa diakses publik</p>

Executive Summary

The SATUSEHAT SDMK Roadmap 2025–2029 presents a comprehensive plan to strengthen information systems and optimize the utilization of Human Resources for Health (HRH) data to support policy-making and HRH management in Indonesia. This initiative aims to improve the quality and equitable distribution of HRH, ensuring healthcare services for all, enhancing public health, and achieving national and global development goals.

Current situation analysis indicates that SATUSEHAT SDMK, as Indonesia's HRH information system, faces several challenges. These include fragmented data and applications, overlapping data entry processes, lack of standardization in data management, and limited national interoperability and data integration. Issues related to users' digital literacy and the capacity of HRH to manage information systems also require attention, while opportunities for partnerships within the ecosystem remain underutilized. These findings highlight the urgent need for short- and medium-term strategic plans to address technical and adaptive challenges for the optimal implementation of SATUSEHAT SDMK.

In response to these challenges, the SATUSEHAT SDMK Roadmap 2025–2029 outlines a series of strategic missions. The roadmap emphasizes the importance of enhancing IT infrastructure and architectural reliability, focusing on strengthening IT systems to support HRH data interoperability and integration while ensuring robust data security and privacy. Additionally, it advocates for the establishment of structured data governance through the development of high-quality data management frameworks and organizational policies that promote data integrity, address inconsistencies and duplication, and foster transparency and accountability. Building HRH capacity and competence is also a key priority, with an emphasis on enhancing the digital literacy of healthcare professionals through targeted training and development programs, enabling them to effectively manage information technology and utilize data for strategic HRH policy-making. Furthermore, the roadmap underscores the need to promote collaboration within the digital HRH ecosystem, encouraging partnerships among Academia, Business, Community, Government, and Media (A-B-C-G-M) to accelerate healthcare innovation, support sustainable health solutions, and ensure the effective implementation of data-driven health policies.

Through these strategic missions, the SATUSEHAT SDMK Roadmap 2025–2029 aspires to establish a resilient, integrated, and future-ready HRH information system that drives impactful health outcomes and supports Indonesia's broader health and development objectives.



Mission 1: Strengthening IT infrastructure and architectural reliability

Outcomes	Activities
<p>1.1 Achieve seamless and integrated management of HRH data through effective integration and interoperability mechanisms in the SATUSEHAT SDMK application</p>	<p>1.1.1 Design and establish standardized data exchange mechanisms to support interoperability in the SATUSEHAT SDMK application</p>
	<p>1.1.2 Implement service bus technology as a middleware for data and system integration within SATUSEHAT SDMK</p>
	<p>1.1.3 Develop and enforce API (Application Programming Interface) standards to ensure seamless data and system integration</p>
<p>1.2 Ensure security in the integration and interoperability process by implementing encryption, authentication, and authorization protocols that comply with established standards</p>	<p>1.2.1 Implement technical mechanisms for personal data protection (PDP)</p>
	<p>1.2.2 Apply a multi-layered security framework aligned with ISO 27001:2022 across all connected systems to ensure information security</p>
<p>1.3. Optimize server performance to support smooth operations and data management within the system</p>	<p>1.3.1 Develop and implement a backup plan for IT infrastructure to anticipate server downtime.</p>
	<p>1.3.2 Adjust server capacity to handle SATUSEHAT SDMK usage under various conditions and scenarios</p>
	<p>1.3.3 Implement an automated alerting and incident tracking system to monitor system security and health in real-time, enabling quick threat detection and incident response</p>



Mission 2: Achieving structured and high-quality data governance

Outcomes	Activities
<p>2.1 Implement standardized data governance across all SATUSEHAT SDMK platforms to enhance data quality and reliability</p>	<p>2.1.1 Conduct formal cross-directorate coordination regularly to enhance data governance and organizational development in SATUSEHAT SDMK</p>
	<p>2.1.2 Map data and information needs for each planned program</p>
	<p>2.1.3 Optimize healthcare workforce data standards to support interoperable data exchange and integration</p>
	<p>2.1.4 Enhance the health workforce data dictionary to facilitate interoperable data exchange and integration</p>
	<p>2.1.5 Implement data privacy policies in SATUSEHAT SDMK</p>
	<p>2.1.6 Review policies related to SATUSEHAT SDMK development</p>
	<p>2.1.7 Develop mechanisms for data updates and multi-level validation to improve SATUSEHAT SDMK data quality</p>
	<p>2.1.8 Establish an integrated monitoring and evaluation mechanism that enables real-time tracking of data governance, data quality, and utilization, ensuring seamless data integration into the SATUSEHAT SDMK platform to support periodic evaluation reports</p>
<p>2.2 Utilization of SATUSEHAT SDMK data for policy development</p>	<p>2.2.1 Provide a comprehensive, interactive, and user-centric dashboard tailored to the needs of respective directorates</p>
	<p>2.2.2 Develop technical guidelines for the utilization of SATUSEHAT SDMK data for healthcare facilities and healthcare professionals</p>
	<p>2.2.3 Manage data access requests and prioritize data inquiries within the SATUSEHAT SDMK system</p>

Outcomes	Activities
<p>2.3. Establishment of a complaint management mechanism for the utilization of SATUSEHAT SDMKG</p>	<p>2.3.1 Develop a coordination and evaluation mechanism for cross-directorate program management</p>
	<p>2.3.2. Establish an internal communication channel to align complaints with a centralized helpdesk team for handling SATUSEHAT SDMKG-related issues</p>
	<p>2.3.3 Conduct socialization of official Standard Operating Procedures (SOP) for complaint management related to SATUSEHAT SDMKG for healthcare facilities and professionals</p>
	<p>2.3.4 Formulate action plans based on routine evaluations of complaints received regarding SATUSEHAT SDMKG</p>
<p>2.4. Fulfillment of NHWA data requirements from SATUSEHAT SDMKG</p>	<p>2.4.1 Conduct data requirement mapping for NHWA based on available data from SATUSEHAT SDMKG</p>
	<p>2.4.2 Organize coordination forums with stakeholders to build a shared commitment and develop an integrated NHWA governance structure aligned with national policies</p>
	<p>2.4.3 Develop a dedicated dashboard based on NHWA indicators to maximize the utilization of SATUSEHAT SDMKG on a broader scale</p>



Mission 3: Developing HRH capacity and competence in utilizing the SATUSEHAT SDMK digital system

Outcomes	Activities
<p>3.1 Establish the Data Champion program within the Directorate General of HRH to enhance capacity in managing and utilizing SATUSEHAT SDMK data optimally and sustainably</p>	<p>3.1.1 Appoint and operationalize Data Champions in each unit of the Directorate General of HRH to strengthen strategic data management and utilization</p>
	<p>3.1.2 Enhance the quality and competency of Data Champions through training, certification, and skill development related to data management and utilization</p>
<p>3.2 Implement the Digital Leadership program within the Directorate General of HRH to drive effective, adaptive, and sustainable digital transformation in HRH management</p>	<p>3.2.1 Develop and implement the Digital Leadership program to ensure policymakers possess the knowledge, willingness, and capabilities to address digital transformation challenges</p>
	<p>3.2.2 Define data requirements to support outputs, outcomes, and impact by systematically identifying and documenting data needs</p>
	<p>3.2.3 Promote training and habitual data usage among HRH Directorate staff to enhance understanding and skills in data management and utilization</p>
<p>3.3 Foster a data-driven culture within the Directorate General of HRH to support evidence-based decision-making and enhance operational efficiency</p>	<p>3.3.1 Develop and implement a sustainable knowledge management system utilizing various media to support knowledge sharing and management within the Directorate General of HRH</p>
	<p>3.3.2 Ensure that the implementation progress of SATUSEHAT SDMK is regularly included as part of strategic cross-sectoral discussions</p>
	<p>3.3.3 Establish and apply a feedback mechanism for each data utilization product to ensure quality, relevance, and effectiveness</p>



Mission 4: Strengthening collaboration in the digital HRH ecosystem

Luaran	Kegiatan
<p>4.1 Establish strategic partnerships among stakeholders from Academia, Business, Community, Government, and Media (A-B-C-G-M) to accommodate workforce needs at every stage of the HRH journey, from education to labor market entry</p>	<p>4.1.1 Formalize a cross-sectoral coordination forum by establishing a Technical Working Group</p>
	<p>4.1.2 Plan strategic partnerships with potential A-B-C-G-M stakeholders to strengthen and expand the SATUSEHAT SDM ecosystem</p>
	<p>4.1.3 Integrate SATUSEHAT SDM data platforms with other relevant workforce journey platforms, including BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, LPDP, BKN, BKD, INA-CRR, Kemendikti Saintek, and other relevant ministries/institutions</p>
	<p>4.1.4 Optimize private sector engagement to facilitate training programs for healthcare professionals</p>
	<p>4.1.5 Develop a monitoring and evaluation mechanism to assess the impact and sustainability of cross-sectoral partnerships</p>
<p>4.2. Engage stakeholders from A-B-C-G-M to support communication, information dissemination, and education regarding SATUSEHAT SDM within their respective user bases</p>	<p>4.2.1 Coordinate and disseminate communication, information, and education on HRH through multi-channel communication platforms</p>
	<p>4.2.2 Advocate for the utilization of SATUSEHAT SDM among A-B-C-G-M stakeholders via their respective platforms</p>
	<p>4.2.3 Optimize the role of local government agencies (OPD) as an extended helpdesk to provide technical and operational support for healthcare professionals at the regional level</p>
<p>4.3 Enable the utilization and exchange of SATUSEHAT SDM data across A-B-C-G-M to support collaborative initiatives and policy development</p>	<p>4.3.1 Develop a mechanism for data utilization and exchange across A-B-C-G-M stakeholders, including for research and publication purposes</p>
	<p>4.3.2 Accept research and policy analysis findings from the utilization of SATUSEHAT SDM data to enhance HRH policy development</p>
	<p>4.3.3 Establish a public access mechanism for SATUSEHAT SDM data utilization</p>

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
<i>Executive Summary</i>	ix
Daftar Isi	xv
Daftar Tabel	xvii
Daftar Gambar	xviii
Daftar Singkatan	xix

Bab 1 Pendahuluan

1

1.1. Latar Belakang	2
1.2. Ruang Lingkup	3
1.3. Penyusunan Peta Jalan SATUSEHAT SDM 2025-2029	4
1.3.1. Alur Penyusunan	4
1.3.2. Metodologi Penelitian	5
1.3.2.1. Observasi dan Pemetaan Masalah	5
1.3.2.2. Sintesis Temuan	6
1.3.2.3. Perumusan Peta Jalan	6
1.3.2.4. Operasionalisasi	6
1.4. Theory of Change Peta Jalan SATUSEHAT SDM 2025-2029	7

Bab 2 Analisis Situasi

2

2.1. Analisis Situasi Arsitektur Teknologi Informasi	10
2.2. Analisis Situasi Tata Kelola Data dan Organisasi	17
2.3. Analisis Situasi Kapasitas SDM Internal	23
2.4. Analisis Situasi Ekosistem SDM	27

Bab 3 Peta Jalan SATUSEHAT SDM 2025-2029

3

3.1. Tema 1: Arsitektur Teknologi Informasi	37
3.2. Tema 2: Tata Kelola Data dan Organisasi	42
3.3. Tema 3: Kapasitas SDM Internal	51
3.4. Tema 4: Ekosistem (Kemitraan Strategis) SATUSEHAT SDM	56

Bab 4 Operasionalisasi Peta Jalan SATUSEHAT SDM

4

4.1. Rekomendasi Kegiatan Tahunan	63
4.2. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi	68
4.2.1. Tema 1: Arsitektur Teknologi Informasi	68
4.2.2. Tema 2: Tata Kelola Data dan Organisasi	72
4.2.3. Tema 3: Peningkatan Kapasitas SDM Internal	80
4.2.4. Tema 4: Ekosistem (Kemitraan Strategis)	84
SATUSEHAT SDM	
4.3. Analisis Risiko dan Mitigasi	89
Ucapan Terima Kasih	93

Daftar Pustaka	94
Lampiran 1. Tema 1: Teknologi Informasi	95
Lampiran 2. Tema 2: Tata Kelola Data dan Organisasi	97
Lampiran 3. Tema 3: Kapasitas SDM	102
Lampiran 4. Tema 4: Ekosistem (Kemitraan Strategis)	105
Lampiran 5. Daftar Aplikasi di Internal Ditjen SDM KEMENKES	109
Lampiran 6. Indikator Prioritas NHTA (WHO)	113
Lampiran 7. Pemetaan Direktorat dan Kebutuhan Data terkait SATUSEHAT SDM	114
Lampiran 8. Rekomendasi Peran SDM Operasionalisasi SATUSEHAT SDM	119
Lampiran 9. Peran dan Fungsi Data Champion, Forum Koordinasi Internal SATUSEHAT SDM, dan Technical Working Group SATUSEHAT SDM	120
Lampiran 10. Tinjauan Kebijakan	121

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rincian Kegiatan Tema 1: Arsitektur Teknologi Informasi	37
Tabel 3.2 Rincian kegiatan tema 2: Tata Kelola Data dan Organisasi	42
Tabel 3.3 Rincian Kegiatan Tema 3: Peningkatan Kapasitas SDM Internal	51
Tabel 3.4 Rincian Kegiatan Tema 4: Ekosistem (Kemitraan Strategis) SATUSEHAT SDM	56
Tabel 4.1 Rekomendasi Kegiatan Tahunan dalam Implementasi Peta Jalan SATUSEHAT SDM	64
Tabel 4.2 Monitoring dan Evaluasi Tema 1: Arsitektur Teknologi Informasi	68
Tabel 4.3 Monitoring dan Evaluasi Tema 2: Tata Kelola Data dan Organisasi	72
Tabel 4.4 Monitoring dan Evaluasi Tema 3: Kapasitas SDM	80
Tabel 4.5 Monitoring dan Evaluasi Tema 4: Ekosistem (Kemitraan Strategis)	84
Tabel 4.6 Analisis Risiko dan Rencana Mitigasi Peta Jalan SATUSEHAT SDM 2025-2029	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Alur Penyusunan Peta Jalan SATUSEHAT SDM 2025-2029	4
Gambar 1.2. Metodologi Penelitian Peta Jalan SATUSEHAT SDM 2025-2029	5
Gambar 1.3. Theory of Change Peta Jalan SATUSEHAT SDM 2025-2029	7
Gambar 2.1. Aspek Analisis Situasi Teknologi Informasi	10
Gambar 2.2. Arsitektur SATUSEHAT SDM	11
Gambar 2.3. Modul dan Fungsi Utama Layanan Perizinan Terintegrasi Teknologi Informasi	13
Gambar 2.4. Modul dan Fungsi Utama dalam Integrasi Data SDM	14
Gambar 2.5. Value Chain SATUSEHAT SDM	15
Gambar 2.6. Dekomposisi Diagram Bisnis Proses SATUSEHAT SDM	15
Gambar 2.7. Aspek Analisis Situasi Tata Kelola Data dan Organisasi	18
Gambar 2.8. Alur Peta Lintas Fungsi dan Pengembangan SATUSEHAT SDM	18
Gambar 2.9. Aspek Analisis Situasi Kapasitas SDM Internal	23
Gambar 2.10. Kapasitas SDM (Staf Internal dan end-user)	24
Gambar 2.11. Best Practice di Daerah terkait Pengembangan Kapasitas SDM	24
Gambar 2.12. Kolaborasi Pentahelix Ekosistem SATUSEHAT SDM	27
Gambar 2.13 Journey nakes dan named dari fase produksi (pendidikan) hingga masuk ke pasar tenaga kerja	29
Gambar 2.14 Aspek Analisis Situasi Ekosistem (Kemitraan Strategis) SATUSEHAT SDM	31
Gambar 3.1 Diagram hubungan antar-tema dalam Peta Jalan SATUSEHAT SDM	36
Gambar 3.2 Ilustrasi Enterprise Service Bus sebagai solusi integrasi aplikasi	39
Gambar 3.3 Pemetaan Peran dan Value dari Technical Working Group SATUSEHAT SDM	59
Gambar 3.4 Alur hubungan TWG (Technical Working Group), Forum Koordinasi Internal SATUSEHAT SDM dengan stakeholder lainnya	62

Daftar Singkatan

A-B-C-G-M	<i>Academician, Business, Community, Government, Media</i>
BKPK	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
Pusdatin	Pusat Data dan Informasi
TTO	<i>Technology Transformation Office</i>
Ditjen SDM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
SDMK	Sumber Daya Manusia Kesehatan
Named	Tenaga medis
Nakes	Tenaga kesehatan
KKI	Konsil Kedokteran Indonesia
Passkas	Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan
PMO	<i>Project Management Officer</i>
TWG	<i>Technical Working Group</i>
SWOT	<i>Strength, Weakness, Opportunities, and Threats</i>
ToC	<i>Theory of Change</i>
NHWA	<i>National Health Workforce Account</i>
WHO	<i>World Health Organization</i>
Timker Datin	Tim Kerja Data dan Informasi
Fasyankes	Fasilitas Pelayanan Kesehatan
API	<i>Application Programming Interface</i>
RIBK	Rencana Induk Bidang Kesehatan
MoU	Memorandum of Understanding

Daftar Singkatan

SI-SDMK	Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
DTPK	Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan
LTO	<i>Long Term Outcome</i>
SDMK	Sumber Daya Manusia Kesehatan
PDP	Pelindungan Data Pribadi
DHTS	<i>Digital Health Transformation Strategy</i>
CSAT	<i>Customer Satisfaction</i>

Pendahuluan

SATUSEHAT SDMKB bertujuan untuk menyediakan data yang selaras dengan Indikator Rencana Induk Berbasis Kesehatan (RIBK), meliputi kuantitas, kualitas, dan distribusi SDMKB yang memadai di seluruh Indonesia.

01.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Sejak tahun 2012, Indonesia telah menyelenggarakan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SI-SDMK) sebagai upaya efisiensi dan optimalisasi pengumpulan data tenaga kesehatan. Sistem ini kemudian dikembangkan menjadi SATUSEHAT SDM, yang memberikan peluang bagi tenaga kesehatan (nakes) untuk secara mandiri memperbarui dan mengelola data mereka. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi informasi yang diperlukan dalam perencanaan dan pengelolaan tenaga kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2022)

Sebelum dikembangkannya SATUSEHAT SDM, pengelolaan data Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Indonesia masih bersifat terfragmentasi, dikelola secara terpisah oleh berbagai institusi, seperti fasilitas kesehatan, pemerintah daerah, dan organisasi profesi, tanpa sistem terpusat. Hal ini menyebabkan inkonsistensi data, duplikasi informasi, serta layanan perizinan yang tidak tersentralisasi, yang berdampak pada rendahnya akurasi dan kepercayaan terhadap data. Perbedaan format dan kurangnya standarisasi antar entitas semakin menghambat integrasi dan pemanfaatan data secara efektif. Selain itu, layanan perizinan yang tersebar di berbagai lembaga memperlambat penerbitan izin, meningkatkan biaya administrasi, serta berisiko menimbulkan kehilangan dokumen penting, yang pada akhirnya menghambat nakes dalam memberikan layanan secara optimal.

Dalam konteks standar global, *World Health Organization (WHO)* melalui *National Health Workforce Account (NHWA)* menekankan pentingnya sistem informasi tenaga kesehatan yang mampu menyediakan data strategis yang komprehensif, mulai dari jumlah lulusan tenaga kesehatan, jumlah dan jenis tenaga yang tersedia, hingga tingkat atrisi mereka.

Pemantauan migrasi tenaga kesehatan, baik yang masuk maupun keluar dari Indonesia, juga menjadi bagian penting dalam perencanaan tenaga kesehatan yang berkelanjutan. Selain itu, sistem ini diharapkan dapat mendukung pelaporan yang efektif terkait Regulasi Kesehatan Internasional.

Di tingkat nasional, SATUSEHAT SDM bertujuan untuk menyediakan data yang selaras dengan Indikator Rencana Induk Berbasis Kesehatan (RIBK), meliputi kuantitas, kualitas, dan distribusi SDM yang memadai di seluruh Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan pengelolaan data yang berkualitas serta pemanfaatan data yang optimal dalam ekosistem kesehatan, sehingga kebijakan nakes dapat berbasis data yang akurat dan terintegrasi secara nasional maupun internasional. Hal ini juga penting karena SATUSEHAT SDM merupakan bagian dari SATUSEHAT secara keseluruhan, yang merupakan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN). SIKN mencakup berbagai aspek, seperti data pelayanan kesehatan, teknologi kesehatan, surveilans penyakit, dan indikator kesehatan lainnya. Sistem ini juga didesain untuk terintegrasi dengan sistem informasi fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk puskesmas, rumah sakit, dan klinik, sebagaimana diatur dalam PP No. 28 Tahun 2024.

Peta Jalan SATUSEHAT SDM 2025-2029 dirancang untuk memperbarui sekaligus menyempurnakan Peta Jalan SI-SDMK 2021-2024. Penyusunan peta jalan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kemajuan terkini dalam teknologi informasi kesehatan serta dinamika kebijakan yang melingkupinya. Melalui peta jalan ini, SATUSEHAT SDM dapat berjalan semakin optimal sebagai bagian integral dari ekosistem SATUSEHAT, yang mencakup berbagai sistem dan platform digital guna mendukung pengelolaan sumber daya manusia kesehatan dan meningkatkan layanan kesehatan secara nasional.

1.2. Ruang Lingkup

Dokumen Peta Jalan SATUSEHAT SDM 2025-2029 dirancang untuk memperkuat sistem informasi dan pemanfaatan data SDM dalam mengelola dan meningkatkan kualitas serta distribusi SDM di Indonesia. Peta jalan disusun dengan mempertimbangkan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) dan *Digital Health Transformation Strategy* (DHTS) untuk memastikan integrasi dan keberlanjutan transformasi digital di sektor kesehatan. Peta jalan ini juga dirancang agar selaras dengan regulasi nasional seperti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta memastikan kepatuhan terhadap standar internasional.

Fokus utama peta jalan ini mencakup empat aspek, yakni:

1. Arsitektur Teknologi Informasi

Peta jalan mencakup pengembangan sistem SATUSEHAT SDM yang didesain untuk mendukung integrasi dan interoperabilitas dengan berbagai sistem SDM lainnya. Proses bisnis, arsitektur sistem, backbone teknologi, serta mekanisme keamanan dan privasi menjadi prioritas utama untuk memastikan sistem berjalan dengan optimal. Selain itu, peta jalan ini juga menjelaskan penerapan mekanisme teknis seperti framework keamanan berlapis berbasis standar ISO 27001:2022 dan penerapan perlindungan data pribadi (PDP).

2. Tata Kelola Data dan Organisasi

Peta jalan mengatur kebijakan, prosedur, dan struktur yang diperlukan untuk memastikan pertukaran dan pemanfaatan data SATUSEHAT SDM antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

3. Adopsi Digital oleh SDM Kesehatan

Peran adopsi digital oleh SDM menjadi kunci dalam peta jalan ini. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi profesi dilibatkan untuk mengoptimalkan SATUSEHAT SDM sebagai alat pengambilan kebijakan berbasis data. Fokus juga diberikan pada peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan digital, pengelolaan *knowledge management*, serta implementasi mekanisme retensi nakes.

4. Pengembangan Ekosistem SATUSEHAT SDM

Aspek ini berfokus pada perencanaan kemitraan strategis melalui kolaborasi antara akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media (A-B-C-G-M).

Meskipun peta jalan ini mencakup pengelolaan SDM secara keseluruhan, fokusnya terbatas pada aspek kegiatan yang mendukung transformasi digital. Dengan demikian, aspek lain dalam sistem kesehatan yang tidak berkaitan langsung dengan digitalisasi tidak termasuk dalam cakupan peta jalan ini.



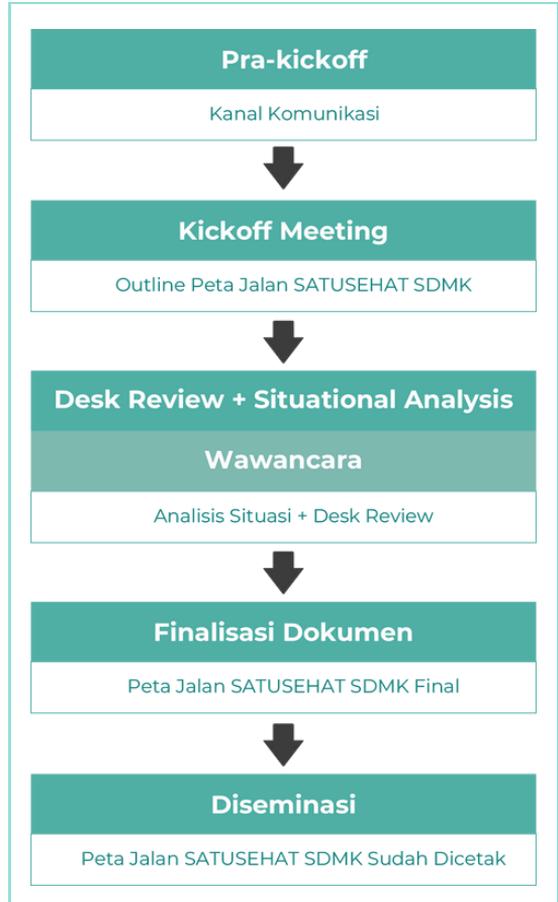
1.3. Penyusunan Peta Jalan SATUSEHAT SDM 2025-2029

1.3.1. Penyusunan Peta Jalan SATUSEHAT SDM 2025-2029

Penyusunan Peta Jalan SATUSEHAT SDM 2025-2029 dilaksanakan dengan alur seperti Gambar 1.1. Proses dimulai dengan *kickoff meeting* pada 10 September 2024 untuk menyelaraskan objektif Peta Jalan SATUSEHAT SDM 2025-2029, diikuti oleh *desk review*, analisis situasi, dan *in-depth interview* guna mengevaluasi kondisi terkini SATUSEHAT SDM.

Penyusunan kemudian dilanjutkan dengan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk memvalidasi temuan sebelumnya dengan fokus pada empat tema: teknologi informasi, tata kelola data dan organisasi, kapasitas SDM, dan ekosistem SDM. Proses diakhiri dengan mengkonsolidasikan temuan-temuan terkait SATUSEHAT SDM menjadi peta jalan yang strategis dan komprehensif untuk periode 2025-2029.

Perumusan Peta Jalan SATUSEHAT SDM 2025-2029 melibatkan para pemangku kepentingan guna mengakomodasi berbagai perspektif, serta memastikan rekomendasi kegiatan yang telah diturunkan dalam peta jalan disepakati dan dapat diimplementasikan.



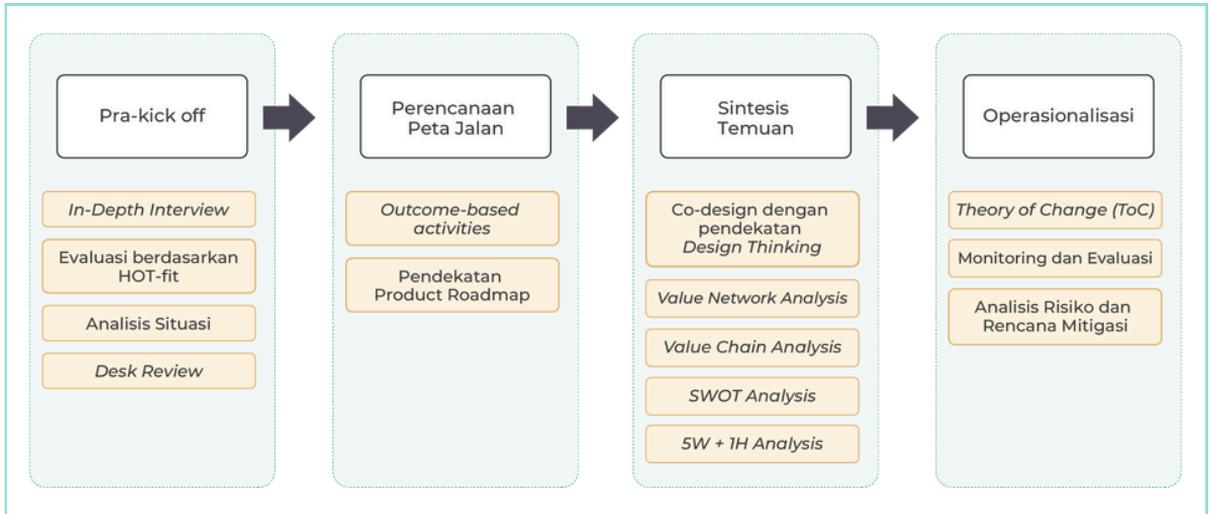
Gambar 1.1. Alur Penyusunan Peta Jalan SATUSEHAT SDM 2025-2029



1.3.2. Metodologi Penelitian

Pengembangan Peta Jalan SATUSEHAT SDM 2025-2029 menggunakan metodologi sistematis yang mencakup identifikasi masalah, perumusan strategi, serta perencanaan implementasi yang matang.

Proses penyusunan dikembangkan dalam empat tahapan: observasi permasalahan, sintesis temuan, perencanaan, dan operasionalisasi (Gambar 1.2).



Gambar 1.2. Metodologi Penelitian Peta Jalan SATUSEHAT SDM 2025-2029

1.3.2.1. Observasi dan Pemetaan Masalah

Observasi masalah dimulai dengan memetakan kondisi terkini implementasi Peta Jalan SI-SDMK 2021-2024 di Ditjen SDM,

serta dengan mengidentifikasi berbagai inisiatif digital government guna mengembangkan SATUSEHAT SDM.



Pendekatan yang digunakan dalam proses ini meliputi tahapan berikut:



Desk Review terhadap kebijakan yang dapat menjadi referensi dalam penyusunan Peta Jalan SATUSEHAT SDM 2025-2029.



Evaluasi dari dimensi HOT-fit (Human, Organization, and Technology fit model). Proses ini dilakukan untuk mengevaluasi peta jalan di periode sebelumnya dengan mengamati dari sisi kompetensi SDM, tata kelola organisasi, dan infrastruktur teknologi.



Analisis Situasi guna memahami tantangan dan peluang dalam implementasi program ini. Analisis digunakan untuk mengidentifikasi kendala utama, dan intervensi yang bisa dilakukan.



Wawancara dengan Pemangku Kepentingan (In-depth Interview) untuk menggali perspektif dan masukan dari berbagai pihak yang terlibat.

1.3.2.2. Sintesis Temuan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh dari SATUSEHAT SDM, dilakukan Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) untuk menilai empat aspek utama, yakni: arsitektur teknologi informasi, tata kelola data dan organisasi, kapasitas SDM, dan ekosistem SATUSEHAT SDM.

Selain itu, Analisis 5W+1H (*Who, What, Where, When, Why, and How*) digunakan untuk memperdalam pemahaman dan memastikan bahwa setiap masalah yang diidentifikasi lebih kontekstual dan relevan.

Pendekatan *design thinking* diterapkan dalam penyusunan Peta Jalan SATUSEHAT SDM untuk memastikan solusi yang berpusat pada pengguna. Metode ini digunakan untuk memahami kebutuhan dan tantangan pemangku kepentingan, mendorong inovasi dalam penyusunan kebijakan, serta meningkatkan empati terhadap pengguna akhir, termasuk tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan direktorat yang memanfaatkan dashboard SATUSEHAT SDM.

Proses ini dilakukan secara iteratif, memastikan setiap rekomendasi yang dihasilkan dari analisis SWOT tetap relevan dengan kondisi di lapangan. Untuk memahami keterlibatan berbagai aktor dalam pengembangan SATUSEHAT SDM, diterapkan *Value Network Analysis* guna mengidentifikasi interdependensi dan potensi kolaborasi antar pemangku kepentingan. Sementara itu, *Value Chain Analysis* digunakan untuk menentukan area fokus SATUSEHAT SDM di Ditjen SDM.

1.3.2.3. Perumusan Peta Jalan

Fase berikutnya melibatkan perumusan peta jalan dengan memastikan pendekatan bertahap dan berorientasi pada hasil dalam pengembangan tenaga kesehatan:

1. Pendekatan **Product Roadmap** digunakan untuk merancang rencana implementasi yang terstruktur dan bertahap, memastikan setiap intervensi dibangun berdasarkan masalah, runut, dan logis.
2. Kegiatan Berbasis Hasil (**Outcome-based Activities**) ditetapkan untuk memastikan bahwa semua inisiatif kegiatan turunan peta jalan berkontribusi langsung pada luaran yang terukur. Pendekatan ini memprioritaskan metrik kinerja, akuntabilitas, dan keberlanjutan jangka panjang.

1.3.2.4. Operasionalisasi

Dalam hal memastikan bahwa Peta jalan SATUSEHAT SDM 2025-2029 dapat dioperasionalkan, peta jalan disusun dengan indikator keberhasilan, *timeline*, serta rekomendasi *person-in-charge* (PIC) yang bertanggung jawab pada setiap kegiatan. Di samping itu, peta jalan juga dilengkapi elemen-elemen operasionalisasi berikut:

1. Rekomendasi Operasionalisasi Kegiatan Prioritas yang bisa diimplementasi untuk setiap tahunnya
2. Strategi Monitoring dan Evaluasi guna memastikan efektivitas pelaksanaan
3. Analisis Risiko dan Rencana Mitigasi untuk mengantisipasi tantangan yang mungkin muncul dalam operasionalisasi program

Tak hanya itu, kerangka *Theory of Change* (ToC) juga disertakan dalam rangka menjembatani kesenjangan antara perencanaan dan eksekusi. Kerangka ini memperlihatkan keterhubungan antara intervensi dari peta jalan dengan hasil utama yang diharapkan, sehingga memungkinkan pemantauan dan evaluasi implementasi peta jalan secara sistematis.

Dalam implementasinya, ToC tidak hanya menetapkan apa yang harus dicapai tetapi juga bagaimana mencapainya melalui intervensi yang jelas. Dengan menekankan keterkaitan antar-hasil, pendekatan ini membantu pemangku kepentingan dalam ekosistem SATUSEHAT SDM untuk memahami langkah-langkah yang diperlukan secara transparan dan sistematis.

1.4. Theory of Change Peta Jalan SATUSEHAT SDM 2025-2029

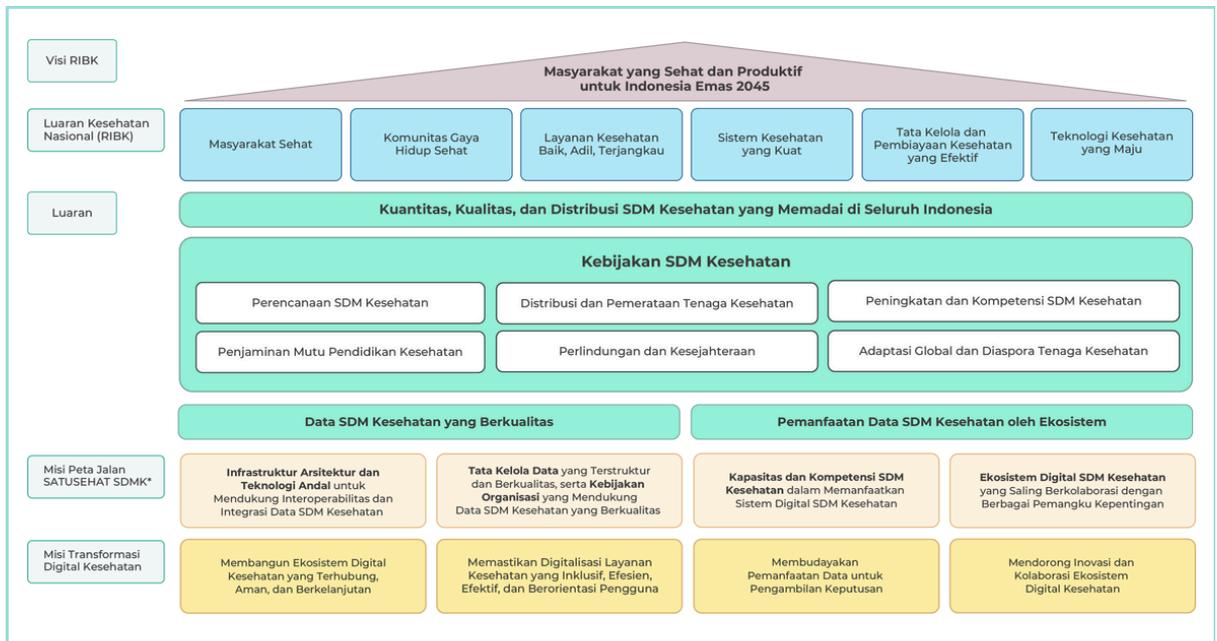
Peta Jalan SATUSEHAT SDM 2025-2029 mendukung visi “Masyarakat Sehat dan Produktif menuju Indonesia Emas 2045”. Hubungan antara peta jalan ini divisualisasikan dalam *Theory of Change* (ToC) (Gambar 1.3), yang merupakan pendekatan perencanaan partisipatif untuk menerjemahkan tujuan jangka panjang Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) ke dalam langkah-langkah strategis. Melalui kerangka sebab-akibat yang sistematis, ToC membantu memastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan di Peta Jalan SATUSEHAT SDM 2025-2029 memiliki dampak yang terukur dan selaras dengan tujuan utama.

Demi mewujudkan visi RIBK, Peta Jalan SATUSEHAT SDM 2025-2029 diarahkan untuk memastikan kuantitas, kualitas, dan distribusi SDM kesehatan yang memadai di seluruh Indonesia.

Pencapaian ini didukung oleh berbagai kebijakan strategis, meliputi:

1. Perencanaan SDM kesehatan berbasis kebutuhan nasional
2. Distribusi tenaga kesehatan yang merata
3. Penjaminan mutu pendidikan kesehatan
4. Perlindungan dan kesejahteraan SDM kesehatan
5. Peningkatan kompetensi SDM kesehatan
6. Adaptasi global dan diaspora tenaga kesehatan

Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada dua faktor utama, yakni: (1) pengelolaan data SDM kesehatan yang berkualitas, dan (2) pemanfaatan data oleh ekosistem kesehatan. Keduanya diharapkan terwujud melalui implementasi empat misi utama Peta Jalan SATUSEHAT SDM 2025-2029 yang diturunkan dari misi Transformasi Sistem Kesehatan Digital atau DHTS Kementerian Kesehatan .



Gambar 1.3. Theory of Change Peta Jalan SATUSEHAT SDM 2025-2029



Analisis Situasi

Analisis situasi SATUSEHAT
SDMK dilakukan dengan
mengevaluasi peta jalan
tahun sebelumnya serta
mempertimbangkan SWOT
berdasarkan hasil
wawancara dengan
para pemangku
kepentingan terlibat.

02.

2. Analisis Situasi

Analisis situasi SATUSEHAT SDM dilakukan dengan mengevaluasi peta jalan SATUSEHAT SDM 2021-2023, serta mempertimbangkan SWOT berdasarkan hasil wawancara dengan para pemangku kepentingan.

Analisis situasi didasarkan pada empat fokus Peta Jalan SATUSEHAT SDM 2025-2029 yakni: (1) Arsitektur teknologi informasi, (2) Tata kelola data dan organisasi, (3) Kapasitas SDM, dan (4) Ekosistem SDM.

Gambar 2.1. Aspek Analisis Situasi Teknologi Informasi



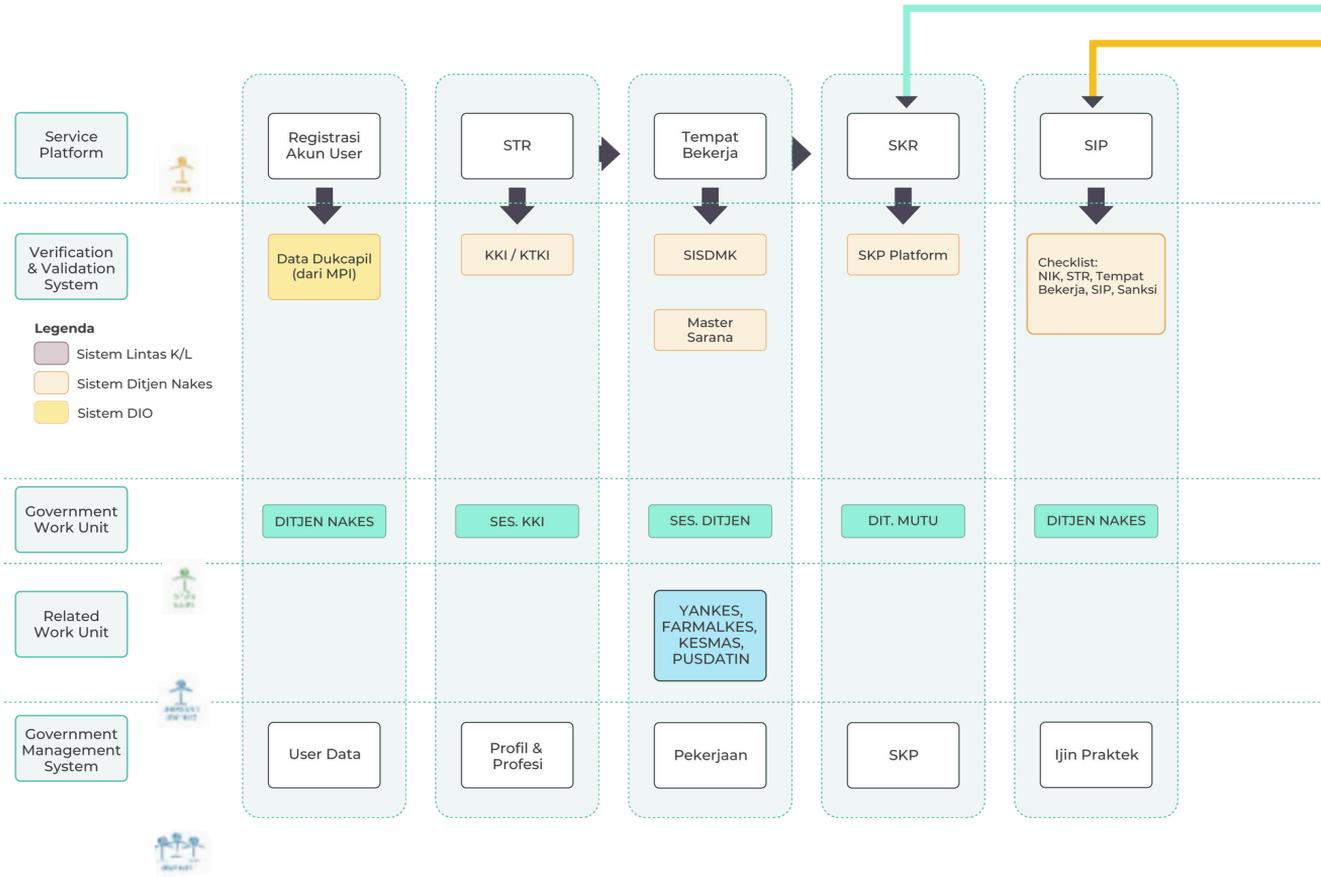
2.1. Analisis Situasi Arsitektur Teknologi Informasi

1 Integrasi dan Interoperabilitas SATUSEHAT SDM

SATUSEHAT SDM telah dikembangkan sebagai bagian dari ekosistem SATUSEHAT yang terhubung dengan berbagai platform internal ([Lampiran 5](#)) dan eksternal Kementerian Kesehatan, bertujuan untuk menyediakan layanan terintegrasi bagi nakes dan named dari fase pendidikan hingga masuk ke pasar tenaga kerja.

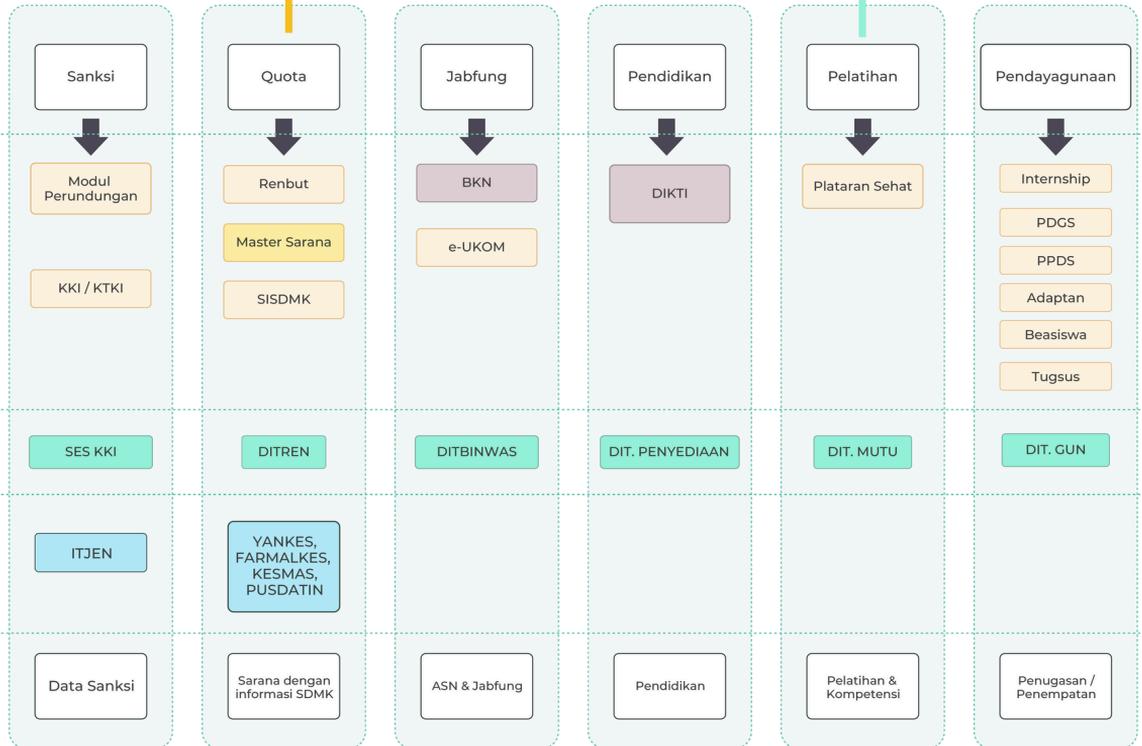
Penerapan akses SSO memungkinkan nakes mengakses layanan secara lebih mudah dan efisien, mendukung berbagai kebutuhan administrasi dan perizinan dalam satu sistem terpadu (Gambar 2.2).

SATUSEHAT

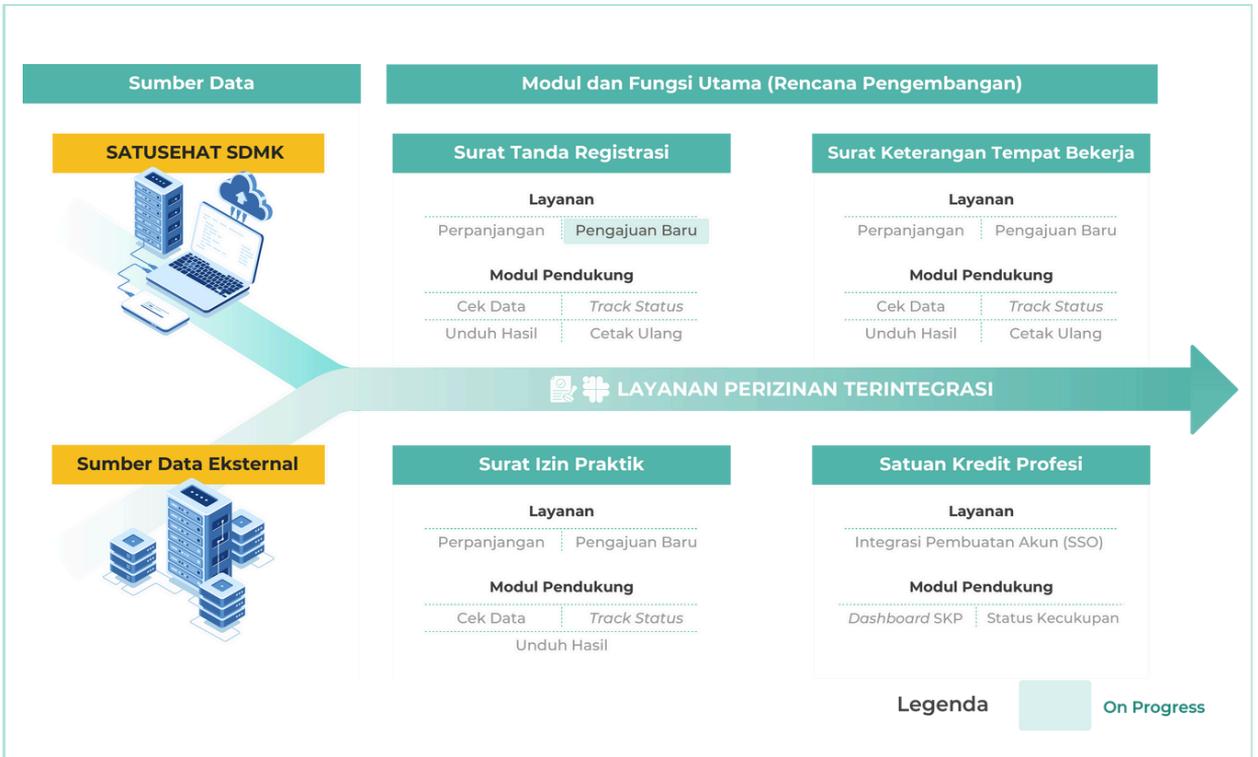


Gambar 2.2 Arsitektur SATUSEHAT SDMK

SDMK



(Sumber: Pusdatin/TTO)



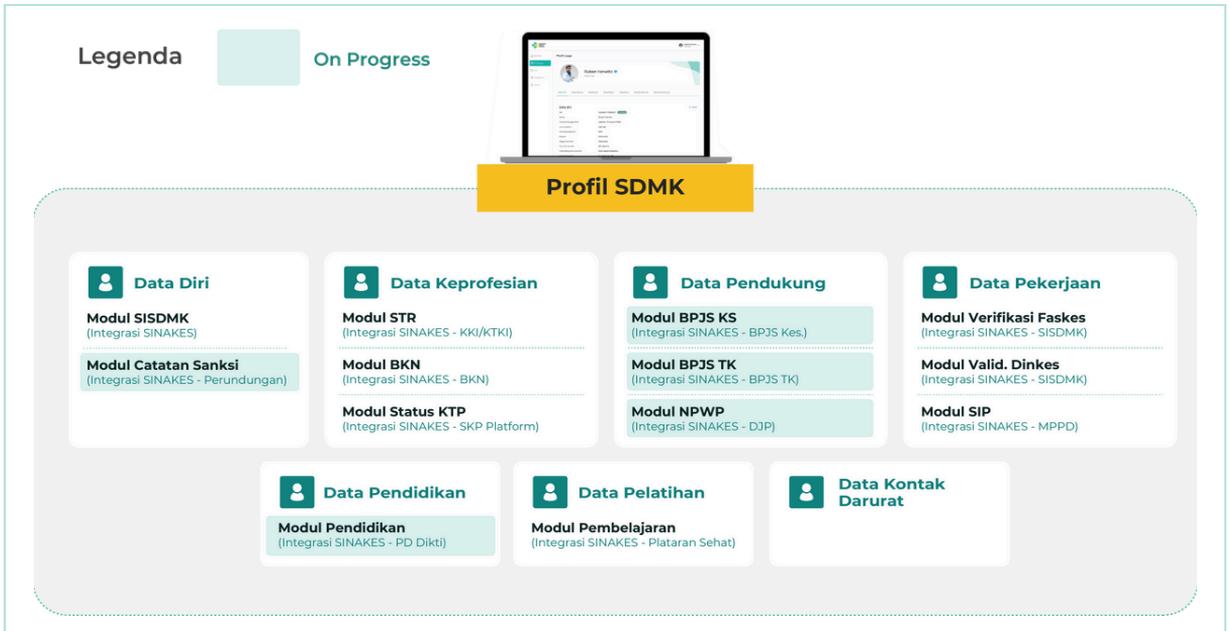
Gambar 2.3. Modul dan Fungsi Utama Layanan Perizinan Terintegrasi Teknologi Informasi (Sumber: Pusdatin/TTO)

”Hingga Desember 2024, Pusdatin/TTO mengungkapkan ada sekitar 2,3 juta nakes dan named sudah terdaftar menjadi pengguna SATUSEHAT SDM.”

Selain itu, SATUSEHAT SDM juga menyederhanakan proses pengajuan perizinan bagi nakes dan named, seperti pemrosesan sekitar 1,45 juta STR bagi nakes dan named dengan proses yang lebih efisien, dan adanya penyederhanaan proses pengajuan Surat Pengajuan Tempat Praktik.

Saat ini, pengembangan modul dan fungsi utama dalam pengintegrasian layanan perizinan bagi nakes dan named telah diakomodasi oleh Pusdatin/TTO, dan akan terus dikembangkan (Gambar 2.3).

Sementara, profil SDM di SATUSEHAT SDM yang terdiri dari data diri, keprofesian, pendukung, pekerjaan, pendidikan, pelatihan dan kontak darurat juga dikembangkan meskipun ada beberapa yang masih dalam proses seperti modul BPJS baik Kesehatan maupun Tenaga Kerja hingga keterhubungan data dengan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan untuk data NPWP. Selain itu ada juga kebutuhan data dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi milik Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Gambar 2.4).



Gambar 2.4. Modul dan Fungsi Utama dalam Integrasi Data SDMK (Sumber: Pusdatin/TTO)

“SATUSEHAT SDMK telah dirancang untuk mendukung fungsi Ditjen SDMK dalam pengelolaan tenaga kesehatan, mulai dari produksi hingga peningkatan dan pengawasan mutu SDMK.”

Fungsi utama ini, kemudian, diturunkan menjadi proses bisnis yang lebih spesifik, memastikan bahwa setiap tahapan perjalanan tenaga kesehatan dapat didukung secara sistematis dalam satu ekosistem digital.

Dalam konteks SATUSEHAT SDMK, integrasi dan interoperabilitas sistem telah menjadi area fokus penting. Meskipun sejumlah proses bisnis yang mendukung inisiatif ini telah berhasil terdefiniskan, ada kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan prioritas pengembangan lebih lanjut. Ini menunjukkan bahwa meskipun langkah awal telah diambil untuk menetapkan kerangka kerja operasional, masih terdapat ruang yang signifikan untuk perbaikan dalam hal integrasi data dan efisiensi sistem.

Meningkatkan prioritas pengembangan berarti mengalokasikan lebih banyak sumber daya dan perhatian untuk mempercepat integrasi sistem dan memperkuat interoperabilitas antara SATUSEHAT SDMK dengan platform atau sistem terkait lainnya. Hal ini penting karena integrasi yang efektif memungkinkan pertukaran data yang lancar, memastikan bahwa informasi kesehatan dapat diakses secara *real-time* oleh semua pemangku kepentingan yang relevan.

Dengan demikian, langkah selanjutnya melibatkan evaluasi ulang prioritas saat ini dan mengidentifikasi area kritis di mana peningkatan dapat membawa dampak signifikan terhadap operasional secara keseluruhan. Selain itu, ini juga membutuhkan komitmen dari semua tingkat organisasi untuk memastikan bahwa pengembangan sistem tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi tetapi juga menyelaraskan dengan kebutuhan kesehatan yang terus berubah dan harapan dari masyarakat.

Gambar 2.5.
Value Chain SATUSEHAT SDMK (Diadaptasi dari value chain DHTS)



Gambar 2.6.
Dekomposisi Diagram Bisnis Proses SATUSEHAT SDMK (Diadaptasi dari dekomposisi diagram bisnis proses DHTS)

FUNGSI UTAMA	PROSES BISNIS						
Pengoleksian dan integrasi data SDMK	Registrasi <i>User</i> dan Verifikasi	<i>Import</i> Data dan Sinkronisasi	Integrasi Data	Validasi Data	Kontrol Kualitas Data	Feedback <i>User</i>	Visualisasi Data
Perizinan SDMK	Perpanjangan STR	Perizinan SIP	Pengumpulan SKP				
Perencanaan Tenaga Kerja SDMK	Perencanaan Wilayah	Perencanaan Institusi	Analisis Beban Kerja	Standar Minimal			
Pemenuhan dan Alokasi SDMK	Pemenuhan ASN	Penugasan Khusus	Pemenuhan Beasiswa	Perencanaan Produksi			
Peningkatan Mutu SDMK	Pembelajaran LMS	Pembelajaran Plataran Sehat					
Pemantauan dan Pengawasan SDMK	Jabatan Fungsional	Pencatatan <i>black-box</i> etika	Pengaduan				
Manajemen Akses dan Keamanan	Kontrol Akses <i>User</i>	Enkripsi	Regular Audit				
FUNGSI PENDUKUNG	PROSES BISNIS						
IT dan Infrastruktur yang tersertifikasi ISO 270001	<i>Maintenance</i> Sistem	Manajemen <i>Database</i>	Manajemen <i>server & storage</i>	Backup dan Perencanaan <i>Disaster Recovery</i>			
Peningkatan Kapasitas SDMK	Sesi Pelatihan SDMK	Dukungan Teknis dan Layanan <i>Helpdesk</i>		Dokumentasi (panduan) <i>user</i>			
Kebijakan dan Peraturan SDMK	Penyelarasan Kebijakan	<i>Compliance</i> ke privasi data		Pemenuhan data NHTWA			
Kemitraan & Keterlibatan Pemangku Kepentingan	Komunikasi pemangku kepentingan	<i>Update</i> rutin dengan <i>stakeholder</i>		Monitoring dan evaluasi program	Kolaborasi dengan organisasi kesehatan		
Perbaikan & Inovasi Berkelanjutan	Pengelolaan Feedback	Evaluasi Berkelanjutan					

2



Kinerja Infrastruktur Server

Dalam konteks pengembangan dan peningkatan aplikasi SATUSEHAT SDMK, infrastruktur teknologi, khususnya kapasitas server, menjadi salah satu fokus utama yang perlu mendapatkan perhatian serius. Meskipun saat ini kapasitas server yang ada dianggap cukup mumpuni dalam menangani berbagai operasi, masalah terus muncul terkait dengan akses bersamaan (*concurrent access*) yang tinggi dan kendala akses dari wilayah timur Indonesia. Isu-isu ini tidak hanya mencerminkan kebutuhan untuk penyesuaian kapasitas teknis yang lebih besar tapi juga menyoroti perlunya strategi yang lebih komprehensif dalam mengoptimalkan distribusi sumber daya dan ketersediaan sistem.

Peningkatan kapasitas server bisa meliputi pemasangan server tambahan dan penggunaan teknologi cloud untuk skalabilitas yang lebih dinamis dan efisien. Teknologi *cloud*, khususnya, dapat menawarkan solusi yang efektif dalam menghadapi tantangan akses dari wilayah geografis yang luas seperti Indonesia, terutama wilayah timur yang sering mengalami hambatan koneksi. Selain itu, implementasi *Disaster Recovery Center (DRC)* dapat secara signifikan mengurangi gangguan operasional yang disebabkan oleh *concurrent access*, memastikan bahwa sistem dapat terus beroperasi secara lancar. Langkah-langkah ini akan membantu dalam mengatasi kendala teknis yang ada, memperkuat infrastruktur teknologi SATUSEHAT SDMK, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna.

3



Infrastruktur Teknologi

Aplikasi SATUSEHAT SDMK telah berhasil mengimplementasikan standar keamanan informasi ISO 27001:2022, sebuah langkah penting yang menunjukkan komitmen terhadap perlindungan dan keamanan data. Implementasi standar ini memastikan bahwa semua aspek keamanan informasi dikelola secara efektif, menawarkan kerangka kerja sistematis untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi kesehatan. Hal ini sangat krusial mengingat sensitivitas data yang dihadapi oleh aplikasi yang beroperasi di sektor kesehatan.

Meskipun sudah ada kemajuan signifikan dalam penerapan ISO 27001:2022, implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di SATUSEHAT SDMK masih belum menyeluruh. Kendala utama dalam penerapan ini adalah ketiadaan panduan yang lengkap dan kebutuhan untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap sistem yang ada. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa semua elemen dari UU PDP diimplementasikan ke dalam SATUSEHAT SDMK, memperkuat kepatuhan dan meningkatkan tata kelola data pribadi.

Mengingat SATUSEHAT SDMK akan semakin terintegrasi dengan berbagai platform lain dalam sistem kesehatan, ada kebutuhan mendesak untuk tidak hanya mempertahankan standar ISO 27001:2022 di SATUSEHAT SDMK tetapi juga mendorong implementasi standar yang sama di semua platform yang terhubung. Ini akan memastikan bahwa seluruh ekosistem yang terintegrasi beroperasi dengan standar keamanan yang tinggi, mendukung interoperabilitas yang aman dan efisien. Dengan demikian, setiap platform yang terkait perlu memiliki kerangka kerja keamanan yang kompatibel dan konsisten, menciptakan lingkungan data yang terlindungi secara keseluruhan dan mendukung kepercayaan pengguna serta pemangku kepentingan.

4



Monitoring, Evaluasi, dan Keberlanjutan

SATUSEHAT SDM menghadapi beberapa tantangan dalam mengelola dan mengamankan infrastrukturnya, khususnya dalam aspek **monitoring kesehatan server**. Saat ini, belum ada mekanisme pengawasan yang efektif untuk mendeteksi akses yang tidak normal atau percobaan peretasan, dan juga tidak ada sistem yang memadai untuk pelacakan insiden peretasan yang memungkinkan aksi tindak lanjut. Ketidakhadiran sistem ini meninggalkan celah keamanan yang signifikan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, menempatkan integritas dan keamanan data yang dikelola oleh SATUSEHAT SDM dalam risiko tinggi. Pengembangan dan implementasi sistem pengawasan yang komprehensif menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa semua aktivitas jaringan terpantau, dan segala upaya peretasan atau akses tidak sah dapat segera diidentifikasi dan diatasi.

Dari perspektif keberlanjutan operasional, sejauh ini pembiayaan dan penggunaan sumber daya di SATUSEHAT SDM telah dilakukan secara normatif. Artinya, kesiapan anggaran dan penggunaan sumber daya server yang ada telah diandalkan tanpa adanya strategi jangka panjang yang konkret untuk adaptasi atau ekspansi. Hal ini menciptakan potensi masalah di masa depan, terutama jika kebutuhan akan layanan digital terus bertumbuh atau terjadi perubahan mendadak dalam permintaan layanan. Mengembangkan strategi keberlanjutan yang lebih proaktif dan menyeluruh, yang mencakup alokasi anggaran khusus untuk pembaruan teknologi dan peningkatan kapasitas server, akan menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa SATUSEHAT SDM dapat terus beroperasi secara efektif dan efisien, memenuhi kebutuhan pengguna tanpa gangguan.

2.2. Analisis Situasi Tata Kelola Data dan Organisasi

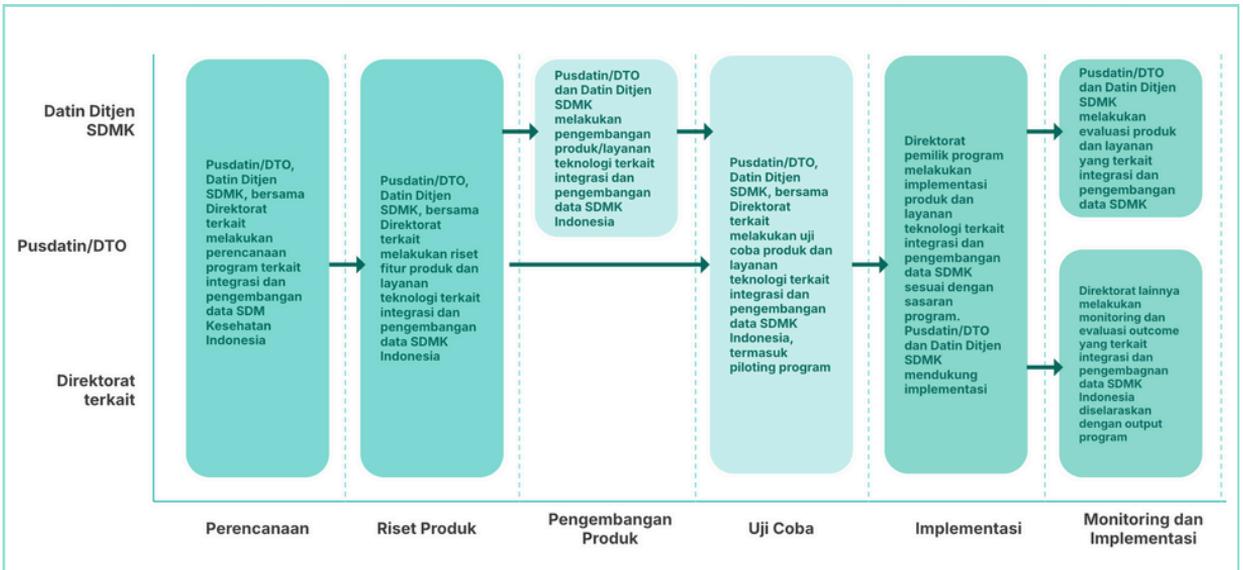
Analisis tata kelola data SATUSEHAT SDM dilakukan dengan memperhatikan aspek terkait *Generic Data Management Process* seperti pada Gambar 2.7.

Saat ini, Ditjen SDM, Pusdatin/TTO, dan direktorat pemilik program di Ditjen SDM telah saling berkoordinasi dalam pengembangan SATUSEHAT SDM dan pemanfaatan data SATUSEHAT SDM seperti Gambar 2.8. Analisis Situasi juga dilakukan pada tiap tahapan alur lintas fungsi pada gambar 2.8.



Analisis tata kelola data SATUSEHAT SDM dilakukan dengan memperhatikan aspek terkait *Generic Data Management Process* seperti pada Gambar 2.7.

Gambar 2.7. Aspek Analisis Situasi Tata Kelola Data dan Organisasi



Gambar 2.8. Alur Peta Lintas Fungsi dan Pengembangan SATUSEHAT SDM (Diadaptasi dari Alur Peta Lintas Fungsi dan Integrasi Data Kesehatan DHTS)

1



Perencanaan Data

Dalam hal perencanaan data SATUSEHAT SDM, saat ini telah dilakukan upaya secara situasional untuk memetakan kebutuhan direktorat di Ditjen SDM dan data-data yang diperlukan, seperti kebutuhan data SATUSEHAT SDM untuk perencanaan nasional, produksi nakes/named, pemenuhan nakes/named, dan peningkatan mutu (Lampiran 7). Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan sinkronisasi data lintas lembaga dan direktorat, sehingga pengelolaan informasi tenaga kesehatan dapat lebih terstruktur dan berbasis bukti.

Namun, hingga saat ini, SATUSEHAT SDM masih belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan tersebut, dikarenakan adanya prioritas teknis lain yang lebih mendesak. Selain itu, hal ini disebabkan oleh kurangnya fokus perencanaan secara makro yang bisa dilakukan dalam bentuk pertemuan antar direktorat secara berkala untuk membahas perencanaan data, yang menyebabkan belum tersedianya cetak biru yang komprehensif untuk sistem data nakes dan named yang lebih efektif dan terintegrasi.

Selain perlunya perencanaan strategis terkait kebutuhan data, keterbatasan integrasi antar sistem juga menjadi tantangan utama, misalnya terkait keterhubungan data pendidikan, pelatihan, dan kualifikasi nakes/named yang belum terhubung secara optimal. Apabila sistem belum terintegrasi, SATUSEHAT SDM mengalami kesulitan dalam menyediakan gambaran komprehensif terkait kebutuhan dan distribusi nakes/named secara nasional. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan **kerangka kerja perencanaan data yang lebih sistematis dan kolaboratif**, yang memungkinkan interoperabilitas antara SATUSEHAT SDM dengan platform internal maupun eksternal untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam pengelolaan tenaga kesehatan di Indonesia.

2



Pengumpulan Data

Konsistensi dan akurasi data dalam SATUSEHAT SDM masih menghadapi tantangan, meskipun telah tersedia kamus data yang dapat diakses secara publik. Beberapa kasus terkait perbedaan format nama, NIK yang tidak sinkron dengan basis data kependudukan, serta duplikasi data akibat tenaga kesehatan yang bekerja di lebih dari satu fasilitas menjadi salah satu permasalahan. Ketidaksesuaian ini berpotensi mengganggu akurasi analisis kebutuhan tenaga kesehatan, yang pada akhirnya berdampak pada perencanaan distribusi SDM kesehatan dan alokasi tenaga kesehatan (nakes/named) yang tidak optimal.

Fragmentasi dan ketidaksesuaian antar sistem menjadi kendala dalam integrasi data, meskipun SATUSEHAT SDM telah mencakup semua profesi tenaga kesehatan dengan tingkat akurasi data mencapai 80%. Ketidaksesuaian antara SATUSEHAT SDM dengan sistem lain, seperti MPP Digital, BKN, dan PDDIKTI, menyebabkan tumpang tindih data serta kesulitan dalam pemanfaatannya untuk analisis yang lebih akurat. Duplikasi data dan keterbatasan interoperabilitas juga menghambat proses pengambilan keputusan berbasis data. Dengan adanya rencana pengembangan yang mengintegrasikan lebih banyak sistem, baik internal, maupun eksternal, maka upaya untuk memastikan standardisasi agar kualitas data semakin baik tetap perlu dilakukan.

Selain itu, keamanan data menjadi aspek krusial dalam pengelolaan SATUSEHAT SDM, mengingat sistem ini menyimpan informasi sensitif seperti NIK, izin praktik tenaga kesehatan, dan diharapkan dapat terhubung dengan data terkait rekam medis. Tanpa kebijakan perlindungan data yang kuat, misalnya seperti implementasi enkripsi, pembatasan akses berbasis peran, serta pengawasan sistem secara berkala, risiko kebocoran dan penyalahgunaan data akan semakin tinggi.

3



Pemrosesan Data

Mekanisme input data oleh tenaga kesehatan (*nakes/named*) secara langsung melalui SATUSEHAT SDM telah meningkatkan kualitas data dibandingkan skema sebelumnya, di mana input data dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan (*fasyankes*). Namun, tantangan muncul karena tidak semua tenaga kesehatan secara rutin memperbarui data mereka, mengingat belum adanya ketentuan atau kewajiban yang mengharuskan pengkinian data secara berkala, kecuali untuk keperluan spesifik seperti perpanjangan STR seumur hidup, pembuatan SIP, pelaporan SKP, atau mengikuti pelatihan di Plataran Sehat. Banyak tenaga kesehatan hanya memperbarui data mereka saat menjelang pembaruan SIP, sementara ada pula yang masih belum memahami prosedur pembaruan data atau cara mengupdate informasi dengan benar. Akibatnya, kualitas data menjadi stagnan dan tidak selalu mencerminkan kondisi *real-time* tenaga kesehatan di lapangan.

Validasi data secara berjenjang tetap diperlukan untuk memastikan akurasi dan kesesuaian informasi tenaga kesehatan di setiap wilayah. Proses ini harus melibatkan verifikasi dari *fasyankes* dan validasi dari dinas kesehatan guna memastikan data yang tercatat sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Namun, agar efektif, upaya ini harus didukung dengan sosialisasi dan pelatihan yang lebih intensif bagi tenaga kesehatan, sehingga mereka lebih proaktif dalam melakukan pembaruan data. Tanpa pembaruan rutin dan validasi yang kuat, pemetaan tenaga kesehatan menjadi kurang akurat, yang dapat berdampak pada perencanaan dan distribusi SDM kesehatan yang tidak optimal. Di sisi lain, kewajiban *fasyankes* dalam melakukan verifikasi data secara berkala dapat menjadi beban tambahan, terutama bagi fasilitas kesehatan yang memiliki keterbatasan tenaga administrasi. Mekanisme pengkinian data, verifikasi dan validasi yang lebih efisien diperlukan untuk memastikan kualitas data *nakes/named* di Indonesia.

4



Pemanfaatan Data

SATUSEHAT SDM telah mengembangkan *dashboard* analitik yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai direktorat di Ditjen SDM, memungkinkan pemantauan kompetensi tenaga kesehatan, pelatihan, dan perkembangan karier *nakes/named* secara lebih komprehensif. Dengan integrasi data dari berbagai sumber seperti SKP Platform dan Plataran Sehat, sistem ini berpotensi besar dalam mendukung pemetaan kebutuhan SDM kesehatan yang lebih akurat dan strategis. Beberapa *dashboard* yang diharapkan tersedia meliputi *Dashboard* SATUSEHAT SDM (publik), *Dashboard* Perencanaan (publik), *Dashboard* Monitoring Penerbitan SIP (*private*), serta *Dashboard* IKK dan IKP. Selain itu, diperlukan pula *dashboard* khusus yang mengakomodasi indikator-indikator *National Health Workforce Accounts* (NHWA) WHO, sehingga SATUSEHAT SDM dapat memastikan pemenuhan standar global dalam pengelolaan tenaga kesehatan di Indonesia.

Pemanfaatan data di SATUSEHAT SDM juga diperlukan untuk memberikan *tagging* tenaga kesehatan (*nakes/named*) di data *nakes/named*. *Tagging* ini memungkinkan identifikasi tenaga kesehatan berdasarkan STR pendidikan, peningkatan kompetensi, program *internship* dan *fellowship* yang diikuti, serta pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Selain itu, *tagging* ini dapat digunakan untuk memantau tenaga kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) yang berhak menerima insentif, serta mengidentifikasi tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelanggaran disiplin dan perundungan.

Selain itu, tingginya jumlah permintaan data yang harus ditangani oleh Ditjen SDM menjadi tantangan tersendiri, yang tanpa mekanisme pengelolaan yang baik dapat memperlambat respons terhadap permintaan yang mendesak. Setiap permintaan perlu disertai dengan deadline, spesifikasi data yang jelas, serta format yang dibutuhkan, sehingga proses pemrosesan dapat berjalan lebih efisien.

Selain itu, prioritas pengerjaan data perlu ditetapkan, mengingat keterbatasan SDM yang menangani permintaan tersebut. **Namun, pemanfaatan SATUSEHAT SDMK masih menghadapi tantangan terkait belum tersedianya petunjuk teknis yang jelas** belum lengkap menyebabkan kebingungan dalam pengumpulan dan penerapan kebijakan berbasis data. Terutama petunjuk teknis yang yang mencakup sosialisasi, panduan pelaksanaan, pendampingan, dan pelatihan implementasi SATUSEHAT SDMK untuk fasyankes dan nakes/named.

5



Koordinasi Internal

Koordinasi internal dalam pengelolaan SATUSEHAT SDMK telah didukung oleh kerangka hukum yang jelas, seperti Permenkes dan UU No. 17 Tahun 2023, yang memberikan landasan bagi tata kelola organisasi dan pengelolaan data tenaga kesehatan. Selain itu, upaya *transfer knowledge* antara Pusdatin/TTO dan Datin Ditjen SDMK telah dilakukan untuk memastikan keberlanjutan serta distribusi tanggung jawab dalam mengelola data secara efektif. Namun, masih terdapat kelemahan dalam koordinasi antar tim, terutama dalam pemetaan peran dan tanggung jawab *stakeholder* pemilik program. Ketidakjelasan terkait penanggung jawab (PIC) dalam beberapa program sering kali menyebabkan keterlambatan dalam implementasi kebijakan serta integrasi data yang lebih luas, sehingga menghambat efektivitas koordinasi secara keseluruhan.

Peningkatan efektivitas koordinasi memerlukan pemetaan peran dan tanggung jawab yang lebih terstruktur dalam pengembangan SATUSEHAT SDMK agar menghindari tumpang tindih tugas dan meningkatkan efisiensi kerja antar tim. Meskipun transfer knowledge telah berjalan, diperlukan mekanisme yang lebih sistematis dan berkelanjutan guna memastikan bahwa tim memiliki kapabilitas yang solid serta responsif terhadap perubahan kebijakan atau teknologi yang berkembang.

6



Koordinasi Eksternal

Salah satu langkah strategis yang telah dilakukan adalah penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Kemendagri dan Kemenkes, yang mendukung pertukaran data antara SATUSEHAT SDMK dan MPP Digital. Namun, hingga saat ini, mekanisme permintaan data ke pihak eksternal masih cenderung mengandalkan pendekatan informal, seperti hubungan personal, yang menyebabkan ketidakpastian dalam standar operasional. Kurangnya prosedur formal ini dapat menghambat efisiensi dalam penyediaan data tenaga kesehatan serta memperlambat proses koordinasi antar lembaga.

Perubahan dalam struktur organisasi, termasuk rotasi pegawai yang sebelumnya berperan sebagai penghubung koordinasi data, sering kali menyebabkan hilangnya kesinambungan dalam kerja sama lintas lembaga. Jika tidak ada sistem dokumentasi yang memadai, koordinasi dapat terhenti atau berjalan tidak optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur dan terdokumentasi, seperti pembuatan SOP formal dalam permintaan data, sistem pencatatan perjanjian kerja sama yang diperbarui secara berkala, serta platform komunikasi resmi antar lembaga.



7

Monitoring dan Evaluasi Program

Proses *monitoring* dan evaluasi (*money*) dalam SATUSEHAT SDM masih berjalan secara situasional, tanpa regulasi tertulis yang mengatur mekanisme *monitoring* dan evaluasi secara sistematis. Absennya prosedur formal menyebabkan banyak program berjalan tanpa pemantauan dan evaluasi berkala, sehingga efektivitas pengendalian menjadi lemah. Tanpa sistem evaluasi yang jelas, inkonsistensi dalam implementasi program dapat terjadi, serta kesulitan dalam mengukur dampak dan efektivitas dari berbagai inisiatif yang telah dilakukan.

Untuk meningkatkan efektivitas pemantauan, diperlukan mekanisme *money* yang lebih komprehensif dengan indikator kinerja yang jelas serta mekanisme tindak lanjut yang terstruktur. Sehingga, koordinasi antar pemangku kepentingan perlu diperkuat dan perlu dirutinkan secara berkala, sehingga kebijakan dapat disesuaikan secara lebih cepat dan tepat berdasarkan temuan evaluasi.

8

Mekanisme Pengaduan

Mekanisme pengaduan di SATUSEHAT SDM telah berjalan dengan sistem distribusi aduan ke tim terkait, sesuai dengan topik aduannya. Namun, tantangan masih muncul dalam hal responsivitas *helpdesk*, di mana beberapa pengguna merasa bahwa waktu tanggapan masih lambat dan solusi yang diberikan tidak selalu tepat. Selain itu, jawaban yang diberikan sering kali bersifat umum dan kurang personal, sehingga tidak sepenuhnya relevan dengan permasalahan spesifik yang dihadapi oleh tenaga kesehatan di lapangan. Keterbatasan keahlian teknis pada tim *helpdesk*, terutama di level pertama (L1), juga menjadi hambatan dalam menangani permasalahan yang lebih kompleks, menyebabkan beberapa aduan membutuhkan waktu lebih lama untuk terselesaikan.

Untuk meningkatkan efektivitas mekanisme pengaduan, peningkatan kompetensi tim *helpdesk* menjadi langkah krusial, terutama melalui pelatihan teknis yang lebih rutin dan mendalam dalam menyelesaikan masalah spesifik terkait SATUSEHAT SDM. Selain itu, penyederhanaan dan standarisasi jalur pengaduan diperlukan agar pengguna tidak mengalami kebingungan. Saat ini, setiap sistem yang terhubung di SATUSEHAT SDM memiliki kontak pengaduan masing-masing, sehingga kerap menimbulkan kebingungan bagi nakes/named untuk melaporkan aduan. Dengan mekanisme pengaduan yang lebih terintegrasi, responsif, dan berbasis data, SATUSEHAT SDM dapat memberikan layanan yang lebih cepat, akurat, serta sesuai dengan kebutuhan tenaga kesehatan.



2.3 Analisis Situasi Kapasitas SDM Internal

Gambar 2.9. Aspek Analisis Situasi Kapasitas SDM Internal



Data Champion

Terwujudnya program Data Champion pada Ditjen SDMK untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan dan pemanfaatan data SS-SDMK secara optimal dan berkelanjutan.



Budaya Pemanfaatan Data

Terwujudnya peningkatan budaya pemanfaatan data di Ditjen SDMK untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti dan efisiensi operasional.



Kepemimpinan Digital

Terwujudnya program Digital Leadership pada Ditjen SDMK untuk mendorong transformasi digital yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan dalam pengelolaan SDM kesehatan.



Peningkatan Kapasitas Pengelola

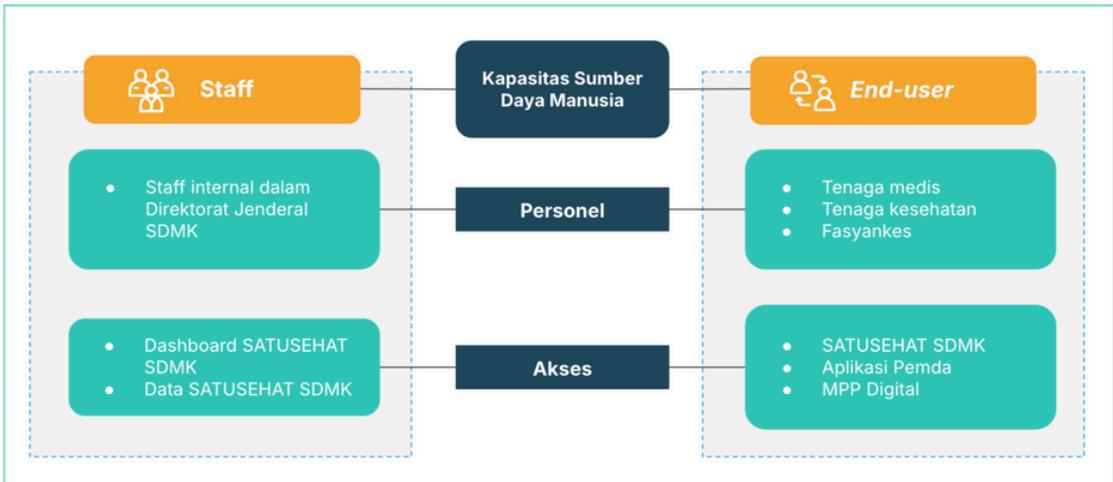
Terwujudnya peningkatan kapasitas pengelolaan SATUSEHAT SDMK yang efektif dan berkelanjutan untuk mendukung pengelolaan data SDM kesehatan secara optimal.

Dalam upaya memperkuat pengelolaan dan pemanfaatan data dalam aplikasi SATUSEHAT SDMK, perlu dilakukan beberapa perbaikan dan penyesuaian strategis yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas SDM.

Pertama, sangat diperlukan penunjukan resmi *data champion*, yang akan bertindak sebagai penanggung jawab utama untuk data yang dihasilkan dan digunakan dalam SATUSEHAT SDMK. Kedua, untuk membudayakan pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan, integrasi data dengan Key Performance Indicators (KPI) perlu diperkuat sebagai solusi untuk menciptakan budaya kerja yang berbasis data.

Selanjutnya, terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan komitmen dan keberpihakan para pejabat di tingkat eselon 2 terhadap pemanfaatan data, mengingat saat ini masih terlihat kurangnya dukungan yang signifikan dari mereka.

Terakhir, peningkatan kapasitas para pengelola data juga harus diperhatikan, khususnya dalam hal sosialisasi ke *end-user* dan penyediaan manual penggunaan yang jelas untuk SATUSEHAT SDMK, sehingga memastikan semua pengguna dapat memanfaatkan sistem ini dengan efektif dan efisien. Implementasi langkah-langkah ini akan secara substansial meningkatkan kinerja dan efektivitas aplikasi SATUSEHAT SDMK dalam mendukung layanan kesehatan di Indonesia.



Gambar 2.10. Kapasitas SDM (Staf Internal dan end-user)

<p>Surabaya - SSW Alfa</p> <p>Menyediakan layanan pendampingan dan konsultasi bagi fasyankes untuk mengikuti update terkini terkait Satu Sehat.</p>	<p>Jakarta - JakEvo</p> <p>Menggiatkan sosialisasi Satu Sehat ke tingkat Sudinkes melalui surat pemberitahuan/surat edaran ke nakes/named untuk membuat akun Satu Sehat.</p> <p>Menempatkan PJ Data di Puskesmas Kecamatan untuk memberikan bimtek dan validasi akun Satu Sehat.</p>	<p>Kendari - MPP Digital</p> <p>Menyediakan manual book yang berisi 18 FAQ bagi pengusul MPP Digital.</p> <p>Dinas Kesehatan Kendari</p> <p>Melakukan monitoring dan evaluasi ke faskes (Klinik, puskesmas, RS, dan optik) terkait Satu Sehat.</p>
---	--	--

Gambar 2.11. Best Practice di Daerah terkait Pengembangan Kapasitas SDM

Dari temuan riset, terdapat sejumlah praktik baik dari Pemerintah Daerah yang dapat diterapkan untuk mendukung rencana pengembangan Kapasitas SDM di masa mendatang.

1. **Data Champion**
2. **Budaya Pemanfaatan Data**
3. **Digital Leadership**
4. **Peningkatan Kapasitas Pengelola**



1 Data Champion

“Penerapan praktik baik dalam pengelolaan data oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan potensi yang signifikan dan dapat diterapkan pada skala yang lebih luas.”

Contohnya, pendekatan yang diterapkan oleh DKI Jakarta, di mana setiap penanggung jawab data ditempatkan di Puskesmas Kecamatan untuk memberikan bimbingan teknis (bimtek) dan validasi akun SATUSEHAT SDM, telah menunjukkan hasil yang menggembirakan dalam meningkatkan akurasi dan keandalan data kesehatan. Namun, implementasi serupa yang telah dilakukan di Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan (Ditjen SDM) belum sepenuhnya efektif karena masih kekurangan mekanisme yang terintegrasi secara keseluruhan.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah potensi mutasi atau rotasi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai pasca menjadi Data Champion. Situasi ini menciptakan siklus yang berulang di mana setiap penggantian *Data Champion* seringkali dimulai tanpa peningkatan kualitas berkelanjutan dari pendahulunya, sehingga memperlambat proses peningkatan kapabilitas pengelolaan data.

Selain itu, terdapat juga kekhawatiran dari ASN atau pegawai mengenai beban tugas tambahan yang mungkin timbul dari peran sebagai *Data Champion*. Hal ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk menciptakan sistem pendukung yang lebih baik, yang tidak hanya mengandalkan pelatihan. Strategi ini diharapkan dapat mengatasi kekhawatiran tentang tugas tambahan dan juga meningkatkan kestabilan serta kontinuitas dalam peran *Data Champion* di setiap unit kesehatan.

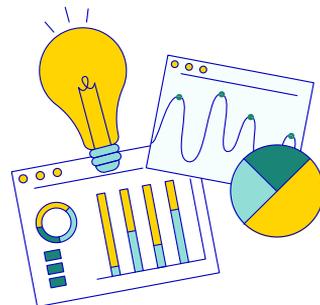
2 Budaya Pemanfaatan Data

“Akses ke dashboard Satu Sehat telah diberikan kepada perwakilan dari berbagai direktorat, sebuah langkah penting dalam upaya memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data di seluruh sektor kesehatan.”

Meskipun demikian, tantangan masih tersisa karena tidak semua staf mampu mengoptimalkan akses yang telah diberikan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam keterampilan atau pemahaman mengenai cara efektif menggunakan data dan dashboard SATUSEHAT SDM. Transformasi digital yang sedang berlangsung memberikan peluang besar untuk mengatasi kesenjangan ini melalui peningkatan kapasitas dan pengembangan kemampuan data di semua tingkatan organisasi.

Transformasi digital yang sedang berlangsung mengharuskan peningkatan kapasitas dan pengembangan kemampuan data di semua tingkatan organisasi, yang tidak hanya memungkinkan optimalisasi pemanfaatan data dan dashboard SATUSEHAT SDM oleh semua staf tetapi juga memastikan bahwa kebijakan dibuat berbasis data yang akurat.

Keterlibatan luas berbagai *stakeholder* dalam proses ini krusial untuk menciptakan budaya pemanfaatan data yang efektif dan mempercepat pengambilan keputusan yang informasi. Namun, kondisi yang terjadi saat ini dapat menghambat efisiensi pertukaran data dan analisis, sehingga penting untuk menyelaraskan kebijakan untuk mendukung implementasi transformasi digital secara efektif.



3 Digital Leadership

“Digital Leadership memainkan peran krusial dalam transformasi digital di Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan (Ditjen SDM), terutama melalui inisiatif yang dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) dan Transformation Technology Office (TTO)”.

Kedua unit ini telah menjadi katalis dalam menguatkan organisasi dan meningkatkan kemampuan manajemen data, dengan Tim Kerja Datin Ditjen SDM secara khusus memainkan peran penting dalam mengelola dan mengorkestrasi data dari platform SATUSEHAT SDM. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen lebih luas untuk memastikan bahwa digitalisasi benar-benar merambah ke seluruh aspek pengelolaan sumber daya kesehatan.

Namun, **terdapat beberapa tantangan yang masih menghambat kemajuan ini.**

01 Masih kurangnya komitmen dari pejabat eselon 2 dalam pemanfaatan data dan teknologi digital sering kali mengakibatkan adopsi inovasi yang lambat dan kurangnya kepemimpinan dalam memanfaatkan teknologi untuk keputusan berbasis data.

02 Peraturan Pemerintah (PP) yang seharusnya menguatkan digital leadership* di lingkungan Ditjen SDM belum didukung optimal secara politik dan komitmen dari stakeholder lain dalam ekosistem SATUSEHAT SDM. Regulasi seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menguatkan fondasi kebijakan dan implementasi strategi digital secara menyeluruh.

*PP No. 28 tahun 2024 tentang Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Untuk perubahan substansial, dibutuhkan upaya koordinatif yang melibatkan seluruh lapisan organisasi dalam transformasi digital agar merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam proses transformasi digital, dengan peningkatan kesadaran digitalisasi, pelatihan intensif bagi pemimpin, serta kebijakan yang mendukung visi berkelanjutan.

4 Peningkatan Kapasitas Pengelola

“Dalam upaya peningkatan kapasitas pengelola untuk platform SATUSEHAT SDM, keterlibatan aktif dari organisasi profesi telah menjadi salah satu pendorong utama.”

Organisasi-organisasi ini secara sukarela mengadakan sosialisasi dan pendampingan bagi tenaga kesehatan, membantu mereka memahami dan memanfaatkan platform dengan lebih efektif. Meskipun demikian, masih terdapat kekurangan dalam mekanisme sosialisasi dan edukasi yang efektif dan efisien untuk pengguna platform secara umum. Beberapa daerah telah menunjukkan praktik terbaik dalam hal sosialisasi dan edukasi, yang dapat dijadikan model untuk diterapkan di daerah lain. Selain itu, terdapat peluang untuk kolaborasi dengan sektor swasta atau *startup* di bidang kesehatan teknologi, yang dapat membantu dalam mensosialisasikan dan meningkatkan adopsi platform SATUSEHAT SDM.

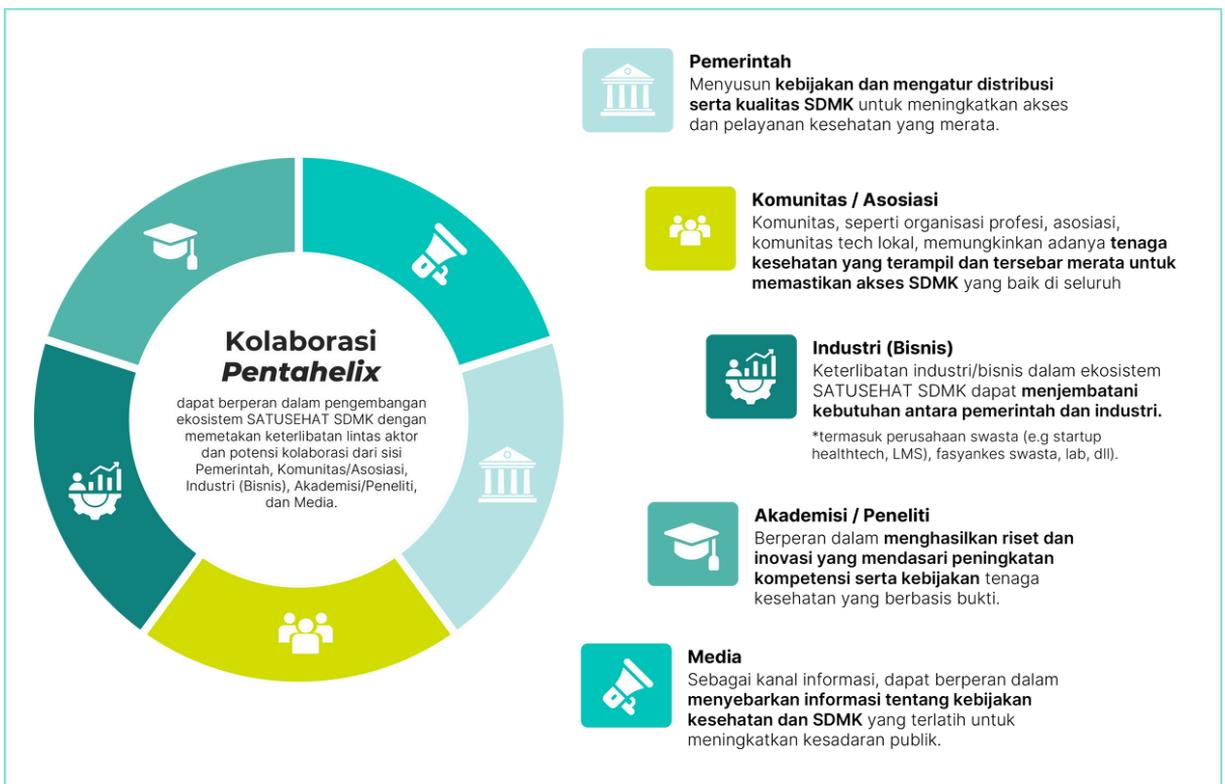
Namun, **masih terdapat hambatan signifikan yang menghambat adopsi merata platform SATUSEHAT SDM di beberapa daerah, terutama karena kendala teknis, keterbatasan sumber daya, dan minimnya koordinasi antar pihak terkait.**

Hal ini menekankan perlunya strategi yang lebih terintegrasi dan terkoordinasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas medis, untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan memastikan bahwa manfaat dari platform SATUSEHAT SDM dapat dirasakan secara luas oleh semua pengguna potensial.

2.4. Analisis Situasi Ekosistem SDM

Analisis situasi ekosistem (kemitraan strategis) SATUSEHAT SDM dilakukan dengan pendekatan multi-sumber, termasuk wawancara mendalam (*in-depth interview*), diskusi kelompok terarah (FGD), serta analisis perjalanan (*journey*) tenaga kesehatan (Gambar 2.13) dari fase produksi hingga masuk ke pasar tenaga kerja kesehatan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami kondisi terkini ekosistem SDM serta mengidentifikasi peluang kolaborasi strategis yang dapat dikembangkan.

Selain itu, dilakukan pula analisis kolaborasi berbasis model pentahelix (Gambar 2.12), yang melibatkan pemerintah, industri/bisnis, komunitas/asosiasi, akademisi/peneliti, dan media, guna memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam ekosistem SATUSEHAT SDM. Dalam kolaborasi pentahelix, pihak yang terlibat antara lain: pemerintah, industri (bisnis), komunitas/asosiasi, akademisi/peneliti, dan media seperti yang dideskripsikan di Gambar 2.12.



Gambar 2.12 Kolaborasi Pentahelix Ekosistem SATUSEHAT SDM
(diadaptasi dari kolaborasi pentahelix SATUSEHAT)

BAGAIMANA

**perjalanan
nakes/named dari fase
produksi (pendidikan)
hingga masuk ke pasar
tenaga kerja?**

→ **Gambar 2.13.**

→ **Journey nakes/named dari fase produksi (pendidikan) hingga masuk ke pasar tenaga kerja**

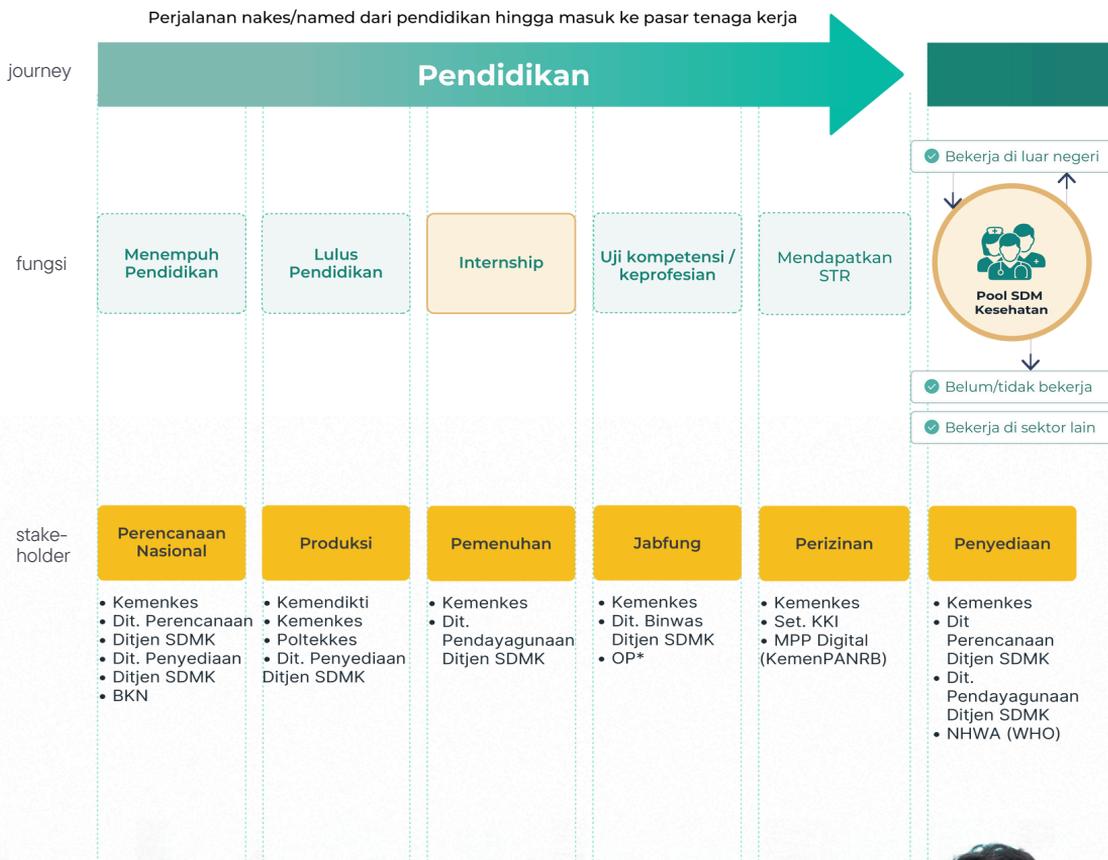
Legenda

Hijau

Tenaga Kesehatan (nakes) -
Tenaga Medis (named)

Kuning

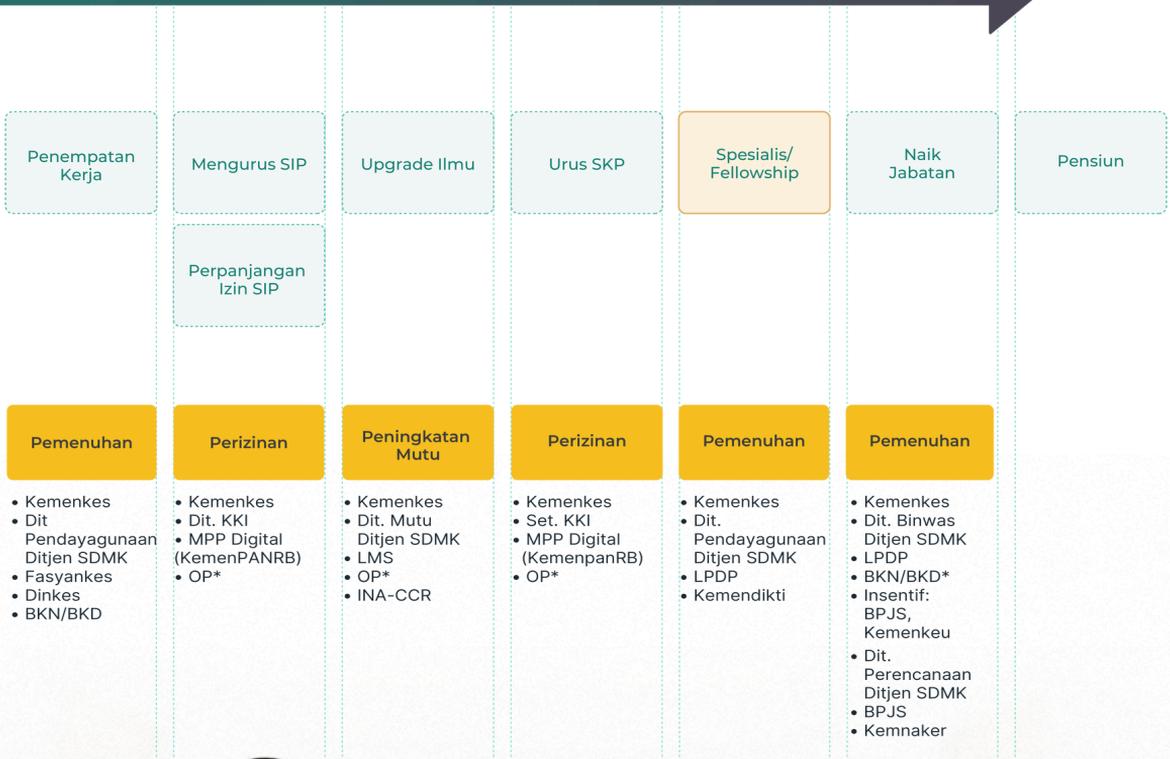
Hanya Tenaga Medis (named)



Sumber gambar: Canva

Perjalanan nakes/named dari pendidikan hingga masuk ke pasar tenaga kerja

Pasar Tenaga Kerja



Gambar 2.14. Aspek Analisis Situasi Ekosistem (Kemitraan Strategis) SATUSEHAT SDM



Kemitraan dan pelibatan aktor

Perlunya ada unit di Kemenkes yang secara aktif mengembangkan kemitraan, mengeksplorasi bentuk-bentuk kemitraan, dan melayani kebutuhan mitra



Pengawasan

Perlunya ada unit di Kemenkes dan mekanisme pengawasan aktor-aktor di ekosistem yang memanfaatkan atau mengumpulkan data SDM



Aktivasi komunitas/asosiasi di daerah

Keterlibatan komunitas/asosiasi daerah dalam turut serta menyebarkan informasi termutakhir terkait SATUSEHAT SDM, dan bisa juga sebagai sarana pengumpulan feedback untuk perbaikan



Akses serta pertukaran data dan informasi

Perlunya ada standarisasi data, pembuatan playbook, mekanisme akses, sosialisasi/pelatihan untuk pihak yang mau bermitra dan memanfaatkan data SDM



Riset

Kemitraan untuk riset, memanfaatkan data dan menghasilkan rekomendasi kebijakan strategis, mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi SATUSEHAT SDM selanjutnya

1

Pemetaan aktor-aktor lintas sektor dalam journey nakes/named

“SATUSEHAT SDM merupakan bentuk kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pengelolaan tenaga kesehatan.”

Berbagai macam sistem di internal Kemenkes telah terhubung di dalam SATUSEHAT SDM, seperti SKP platform, STR (seumur hidup), perizinan SIP, dan Plataran Sehat (Gambar 2.3). Selain itu, SATUSEHAT SDM juga telah terhubung dengan sistem eksternal di luar Kemenkes seperti dengan MPP Digital (Kemenpan RB).

Namun, **jika ditinjau dari perjalanan (journey) tenaga kesehatan (nakes/named), masih terdapat banyak peluang kolaborasi yang dapat dioptimalkan untuk melibatkan lebih banyak stakeholder internal maupun eksternal.** Kendala utama yang masih dihadapi adalah kurangnya kanal koordinasi formal dan keterbukaan informasi, yang mengakibatkan silo atau fragmentasi antar institusi.

Padahal, urgensi integrasi telah disadari oleh banyak pihak, baik dari pemerintah, sektor swasta, maupun komunitas tenaga kesehatan. Oleh karena itu, pemetaan aktor lintas sektor dalam setiap tahapan perjalanan tenaga kesehatan menjadi langkah strategis guna mengidentifikasi kolaborasi potensial yang dapat memperkuat ekosistem SDM secara lebih komprehensif.

Keberlanjutan dan efektivitas ekosistem SATUSEHAT SDM sangat bergantung pada optimalisasi keterlibatan aktor eksternal, termasuk komunitas/asosiasi tenaga kesehatan, akademisi/peneliti, sektor swasta, dan media.

Jika seluruh layanan dalam ekosistem ini hanya dikelola oleh pemerintah, maka peluang inovasi dalam meningkatkan efisiensi sistem akan semakin terbatas. Namun, membangun kemitraan lintas sektor tidak terlepas dari tantangan, seperti potensi adanya ego-sektoral antar institusi dan kendala regulasi dalam menjalin kerja sama dengan pihak eksternal.

2 Pelibatan sektor swasta untuk mengakomodasi nakes/named yang belum 'tersentuh' oleh SATUSEHAT SDM

“Pelibatan sektor swasta dalam ekosistem SATUSEHAT SDM berperan penting dalam memperluas jangkauan sistem dan mendukung tenaga kesehatan (nakes/named) yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh sistem pemerintah.”

Saat ini, SATUSEHAT SDM masih berfokus pada tenaga kesehatan di bawah regulasi pemerintah, sementara industri kesehatan swasta memiliki potensi besar dalam menyediakan data yang lebih komprehensif dan mendukung pengambilan kebijakan yang lebih adaptif.

Selain itu, **sektor swasta dapat berkontribusi dalam peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui program pelatihan dan pengembangan kompetensi** yang dapat diintegrasikan dengan Plataran Sehat di SATUSEHAT SDM. Namun, integrasi ini menghadapi tantangan seperti potensi konflik kepentingan antara keuntungan bisnis dan kebijakan kesehatan publik, serta keragaman kebutuhan tenaga kesehatan di berbagai fasilitas yang dapat menyulitkan standarisasi sistem. Perlu adanya kepastian terkait mekanisme regulasi yang jelas serta forum koordinasi yang transparan, sehingga sektor swasta dapat berkontribusi secara optimal dalam ekosistem SATUSEHAT SDM tanpa mengorbankan prinsip keadilan, akses yang merata, dan keselarasan dengan kebijakan nasional.

3 Keterlibatan komunitas/asosiasi dengan basis massa untuk penyebaran informasi SATUSEHAT SDM

“Komunitas dan asosiasi profesi memiliki peran penting dalam mendukung SATUSEHAT SDM, terutama dalam membantu tenaga kesehatan (nakes/named) menyampaikan kendala yang mereka hadapi.”

Meskipun telah tersedia *helpdesk* SATUSEHAT SDM, nakes/named juga tetap melaporkan permasalahan mereka kepada komunitas atau asosiasi profesi tempat mereka bernaung. Dari diskusi dengan nakes/named, diketahui bahwa eskalasi isu dan pencarian solusi sering kali dilakukan melalui asosiasi profesi atau komunitas, yang kemudian menjembatani komunikasi dengan pihak terkait.

Peran ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa komunitas/asosiasi profesi di wilayah memiliki peranan strategis untuk turut serta membantu dalam proses komunikasi, informasi, dan edukasi terkait SATUSEHAT SDM ke nakes/named di wilayah masing-masing. Hal ini ditambah dengan fakta bahwa tidak mungkin proses komunikasi, informasi, dan edukasi hanya dilakukan oleh internal Ditjen SDM Kemenkes saja, tanpa adanya bantuan keterlibatan dari komunitas/asosiasi di daerah.

Keterlibatan komunitas/asosiasi juga dapat diperkuat melalui peran komunitas sebagai narasumber dalam peningkatan mutu nakes/named atau dengan mendukung inisiatif seperti Plataran Sehat.

4 Peran akademisi/peneliti untuk memberikan feedback pengembangan SATUSEHAT SDM, dan meningkatkan pemanfaatan data SATUSEHAT SDM

“Akademisi dan peneliti memiliki peran strategis dalam pengembangan SATUSEHAT SDM, terutama dalam memberikan umpan balik berbasis data dan kajian ilmiah untuk meningkatkan efektivitas sistem dalam pengambilan kebijakan.”

Dengan keahlian yang mendalam (*deep expertise*) di bidang terkait, akademisi dapat berkontribusi dalam *monitoring* dan evaluasi (Monev) sistem serta memberikan wawasan inovatif untuk mengoptimalkan efektivitas dan pemanfaatan SATUSEHAT SDM. Selain itu, kolaborasi dengan akademisi membuka peluang riset dan pertukaran data yang saling menguntungkan, di mana peneliti dapat memanfaatkan data SATUSEHAT SDM untuk kepentingan studi, sementara pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian tersebut untuk memperkuat kebijakan SDM kesehatan berbasis bukti.

5 Potensi media untuk terlibat dalam Komunikasi, Informasi, dan Edukasi

“Media dan kanal komunikasi publik memiliki jangkauan luas yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) untuk meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan (nakes dan named) mengenai SATUSEHAT SDM.”

Dengan penyampaian informasi yang efektif, media dapat membantu mempercepat adopsi sistem ini serta menjadi wadah umpan balik bagi pengembang SATUSEHAT SDM, sehingga dapat menyesuaikan layanan berdasarkan kebutuhan pengguna di lapangan. Namun, salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman teknis dari media, yang membuat pemberitaan terkadang bergantung pada narasi narasumber tanpa penjelasan yang cukup mendalam. Hal ini berisiko menciptakan informasi yang bias atau tidak sepenuhnya akurat, yang justru dapat memperkeruh persepsi tenaga kesehatan terhadap sistem.



Sumber gambar: Canva





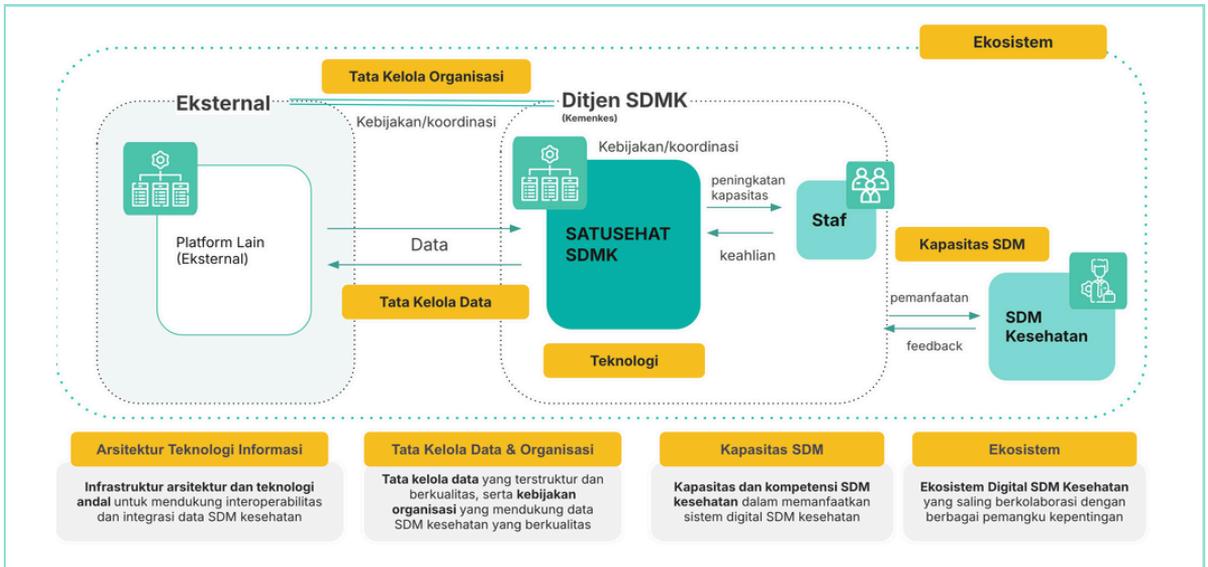
Peta Jalan SATUSEHAT SDMK 2025-2029

03.

3. Peta Jalan SATUSEHAT SDMK 2025-2029

SATUSEHAT SDMK dirancang menjadi ekosistem digital yang mendukung pengelolaan data dan informasi SDMK secara lebih efisien. Dengan infrastruktur arsitektur dan teknologi yang andal, sistem ini memungkinkan interoperabilitas dan integrasi data antara berbagai platform, baik internal maupun eksternal Kementerian Kesehatan. Teknologi ini memastikan data dapat diakses dan dibagi pakaikan secara optimal guna mendukung koordinasi serta pengambilan keputusan berbasis bukti.

Namun, keberhasilan sistem tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada tata kelola data dan organisasi yang terstruktur serta kebijakan yang efektif. Direktorat Jenderal SDMK berperan penting dalam memastikan alur data yang akurat, valid, dan dapat digunakan untuk mendukung kebijakan SDMK berbasis data.



Gambar 3.1 Diagram hubungan antar-tema dalam Peta Jalan SATUSEHAT SDMK
 Sumber: Dokumen Analisis Think Policy, 2025

“Selain teknologi dan tata kelola, keberhasilan SATUSEHAT SDMK juga ditentukan oleh kapasitas dan kompetensi SDM kesehatan dalam memanfaatkan sistem digital ini.”

Peningkatan kapasitas dan pelatihan menjadi prioritas agar tenaga kesehatan dapat mengoptimalkan sistem dalam menunjang layanan yang lebih efisien. Lebih dari sekadar sistem informasi, **SATUSEHAT SDMK merupakan bagian dari ekosistem digital yang terintegrasi**, di mana kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci utama. Dengan ekosistem yang berkembang dan berkelanjutan, transformasi digital SDMK dapat terus berjalan secara adaptif, efektif, dan berkualitas.

Strategi dalam peta jalan ini mencakup **luaran, rangkaian kegiatan, serta indikator keberhasilan sebagai tolok ukur pencapaian setiap kegiatan**. Selain itu, bagian ini juga menetapkan **Penanggung Jawab (PIC)** untuk memastikan implementasi berjalan efektif.

Detail lebih lanjut tersedia dalam **Lampiran 1-4**, yang mencakup *timeline* pelaksanaan, dependensi antar kegiatan, serta penentuan skala prioritas dari setiap kegiatan, memberikan gambaran menyeluruh tentang strategi yang diimplementasikan.

3.1. Tema 1: Arsitektur Teknologi Informasi

Tema Arsitektur Teknologi Informasi berfokus pada penguatan sistem SATUSEHAT SDM untuk mendukung pengelolaan data SDM kesehatan yang lebih terintegrasi, aman, dan andal.

Tabel 3.1. Rincian Kegiatan Tema 1: Arsitektur Teknologi Informasi

Luaran	Rincian Kegiatan
<p>1.1. Terwujudnya mekanisme integrasi dan interoperabilitas yang efektif untuk mendukung pengelolaan data SDM kesehatan secara terintegrasi melalui aplikasi SATUSEHAT SDM.</p>	<p>1.1.1. Merancang dan menetapkan mekanisme pertukaran data yang terstandar untuk mendukung interoperabilitas dalam aplikasi SATUSEHAT SDM.</p> <p>PIC: Datin Ditjen SDM, Pusdatin/TTO</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Menjaga transaksi data paling lambat 2 detik untuk setiap transaksi Tersedianya dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria dalam proses pertukaran data
	<p>1.1.2. Menerapkan layanan service bus sebagai perantara untuk integrasi data dan sistem dalam aplikasi SATUSEHAT SDM.</p> <p>PIC: Pusdatin/TTO, Datin Ditjen SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> 100% Platform yang memerlukan data SDM terintegrasi dengan SATUSEHAT SDM Menjaga transaksi data paling lambat 2 detik untuk setiap transaksi Menjaga kepatuhan terhadap SLA sebesar 99.9% setiap tahunnya
	<p>1.1.3. Mengembangkan dan menerapkan standar API (Application Programming Interface) untuk mendukung integrasi data dan sistem dalam aplikasi SATUSEHAT SDM.</p> <p>PIC: Pusdatin/TTO, Datin Ditjen SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Menjaga transaksi data paling lambat 2 detik untuk setiap transaksi Standar interoperabilitas diadopsi oleh minimal 80% platform mitra

Luaran	Rincian Kegiatan
<p>1.2. Terjaminnya keamanan dalam proses integrasi dan interoperabilitas sistem melalui penerapan protokol enkripsi, otentikasi, dan otorisasi yang sesuai standar</p>	<p>1.2.1. Menerapkan mekanisme teknis implementasi perlindungan data pribadi (PDP). PIC: Pusdatin/TTO, Datin Ditjen SDM INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya fitur untuk persetujuan penggunaan data pribadi • Menjaga rata-rata CSAT 85% untuk setiap 3 bulan
	<p>1.2.2. Menerapkan framework keamanan berlapis dengan standar ISO 27001:2022 pada setiap sistem yang akan saling terhubung untuk memastikan keamanan informasi. PIC: Pusdatin/TTO, Datin Ditjen SDM INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya fitur untuk mengakses log transaksi data • Menjaga persentase akses terindikasi ancaman paling tinggi 25% • Menjaga rata-rata CSAT 85% untuk setiap 3 bulan
<p>1.3. Terjaminnya kinerja server yang optimal untuk mendukung kelancaran operasional dan pengelolaan data pada sistem.</p>	<p>1.3.1. Menyusun dan mengimplementasikan rencana cadangan untuk infrastruktur teknologi guna mengantisipasi downtime server. PIC: Pusdatin/TTO, Datin Ditjen SDM INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjaga kepatuhan terhadap SLA sebesar 99.9% setiap tahunnya • Menjaga rata-rata CSAT 85% untuk setiap 3 bulan • Menjaga kepatuhan terhadap SLA sebesar 99.9% setiap tahunnya • Tersedianya fitur untuk mendeteksi ancaman dan atau gangguan
	<p>1.3.2. Penyesuaian kapabilitas server untuk mengelola penggunaan SATUSEHAT SDM dalam berbagai macam situasi dan kondisi. PIC: Pusdatin/TTO, Datin Ditjen SDM INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjaga kepatuhan terhadap SLA sebesar 99.9% setiap tahunnya • 2. Menjaga rata-rata CSAT 85% untuk setiap 3 bulan
	<p>1.3.3. Menerapkan sistem automated alerting dan incident tracking system untuk memonitor keamanan dan kesehatan sistem secara real-time sehingga dapat mendeteksi ancaman serta insiden dengan cepat. PIC: Pusdatin/TTO, Datin Ditjen SDM INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjaga kepatuhan terhadap SLA sebesar 99.9% setiap tahunnya • Tersedianya fitur untuk mendeteksi ancaman/gangguan • Menjaga rata-rata CSAT 85% untuk setiap 3 bulan • Menjaga persentase akses terindikasi ancaman paling tinggi 25%

SATUSEHAT SDM akan memperkuat mekanisme integrasi dan interoperabilitas yang efektif melalui penerapan layanan *service bus*, pengembangan standar API, dan merancang pertukaran data yang terstandar untuk mendukung pengelolaan data SDM kesehatan secara terintegrasi.

Keamanan dalam proses integrasi dan interoperabilitas sistem dijamin melalui penerapan protokol enkripsi, otentikasi, *framework* keamanan berlapis sesuai ISO 27001:2022, serta mekanisme perlindungan data pribadi untuk memastikan keamanan informasi. Performa server dioptimalkan melalui pengelolaan infrastruktur teknologi yang meliputi rencana cadangan, penyesuaian kapabilitas server, serta sistem pelacakan insiden dan peringatan otomatis untuk monitoring keamanan dan kondisi sistem secara *real-time*.

3.1.1. Rincian Kegiatan Tema 1

Luaran 1.1.

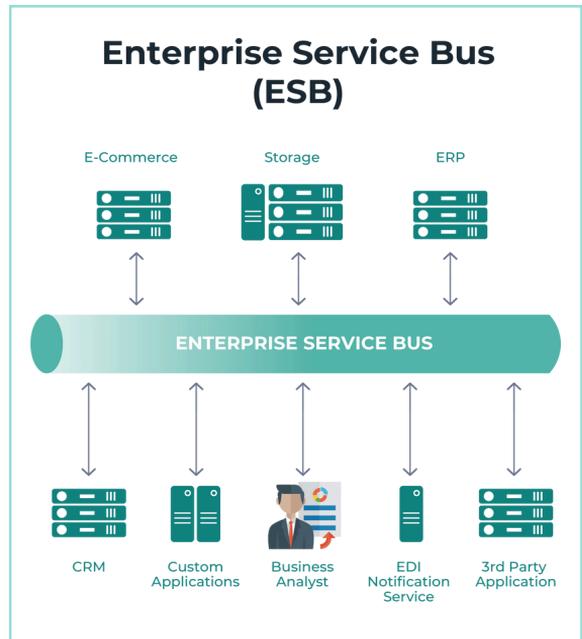
Terwujudnya mekanisme integrasi dan interoperabilitas yang efektif untuk mendukung pengelolaan data SDM kesehatan secara terintegrasi melalui aplikasi SATUSEHAT SDM.

▶ Kegiatan 1.1.1:

Merancang dan menetapkan mekanisme pertukaran data yang terstandar untuk mendukung interoperabilitas dalam aplikasi SATUSEHAT SDM. Dalam upaya meningkatkan interoperabilitas antar sistem, SATUSEHAT SDM akan merancang dan menetapkan standar pertukaran data yang memungkinkan berbagai sistem kesehatan untuk berkomunikasi dan berbagi informasi secara efektif. Standar ini memastikan bahwa data yang dikirim dan diterima melintasi *platform* tetap konsisten, akurat, dan tepat waktu, sehingga mengurangi kesalahan dan duplikasi data. Dengan penerapan standar yang ketat ini, aplikasi SATUSEHAT SDM memastikan bahwa data dapat diintegrasikan dari berbagai sumber tanpa hambatan, memfasilitasi analisis yang lebih mendalam dan pengambilan keputusan yang informasi.

▶ Kegiatan 1.1.2:

Menerapkan layanan *service bus* sebagai perantara untuk integrasi data dan sistem dalam aplikasi SATUSEHAT SDM. Layanan *service bus* telah diterapkan sebagai solusi teknis untuk memfasilitasi komunikasi dan pertukaran data antara sistem yang terpisah (Gambar 3.2). *Service bus* berfungsi sebagai mediator yang mengatur dan mengoptimalkan aliran data, menangani permintaan dan respons antar sistem, serta mendukung berbagai format dan protokol komunikasi. Penggunaan *service bus* meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan keandalan dalam pertukaran data, membantu mengatasi kompleksitas teknis yang sering muncul dalam integrasi sistem kesehatan yang luas.



Gambar 3.2 Ilustrasi Enterprise Service Bus sebagai solusi integrasi aplikasi

▶ **Kegiatan 1.1.3:**
Mengembangkan dan menerapkan standar API (*Application Programming Interface*) untuk mendukung integrasi data dan sistem dalam aplikasi SATUSEHAT SDM.

Pengembangan dan implementasi standar API yang seragam merupakan langkah kunci lain dalam memperkuat interoperabilitas sistem dalam aplikasi SATUSEHAT SDM. API memungkinkan berbagai aplikasi dan sistem untuk berinteraksi secara *seamless*, menyediakan antarmuka yang konsisten untuk pertukaran data dan fungsi-fungsi sistem. Dengan API, SATUSEHAT SDM dapat terhubung dengan aplikasi eksternal, mengakses layanan data, dan menyediakan informasi kepada pengguna dengan cara yang aman dan terkontrol. Penerapan API ini mendukung inovasi dan skalabilitas sistem kesehatan, memungkinkan adaptasi cepat terhadap kebutuhan yang berubah dan integrasi teknologi baru.

Luaran 1.2.

Terjaminnya keamanan dalam proses integrasi dan interoperabilitas sistem melalui penerapan protokol enkripsi, otentikasi, dan otorisasi yang sesuai standar.

▶ **Kegiatan 1.2.1:**
Menerapkan mekanisme teknis implementasi perlindungan data pribadi (PDP). Untuk memperkuat perlindungan data pribadi, SATUSEHAT SDM merencanakan untuk mengimplementasikan mekanisme teknis khusus yang dirancang untuk menjaga kerahasiaan dan integritas informasi pribadi. Mekanisme ini meliputi berbagai teknik dan alat yang memastikan data pribadi dijaga dari penggunaan yang tidak semestinya atau akses tanpa izin.

Langkah-langkah ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, enkripsi data saat istirahat dan saat pengiriman, serta kebijakan ketat mengenai penggunaan dan pengaksesan data. Implementasi ini mencerminkan komitmen SATUSEHAT SDM untuk mematuhi regulasi perlindungan data seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, memperkuat kepercayaan pengguna dalam mengelola informasi kesehatan mereka.

▶ **Kegiatan 1.2.2:**
Menerapkan *framework* keamanan berlapis dengan standar ISO 27001:2022 pada setiap sistem yang akan saling terhubung untuk memastikan keamanan informasi. Penerapan *framework* keamanan berlapis sesuai dengan standar ISO 27001:2022 merupakan langkah penting dalam memastikan keamanan informasi antar sistem yang terintegrasi di SATUSEHAT SDM. *Framework* ini mencakup pengelolaan risiko keamanan yang komprehensif, pengendalian akses, pengauditan keamanan secara berkala, dan manajemen insiden keamanan yang efektif. Dengan mendefinisikan dan menerapkan lapisan keamanan yang ketat pada setiap sistem yang saling terhubung, SATUSEHAT SDM menjamin bahwa semua komponen infrastruktur teknologinya mampu menanggulangi ancaman keamanan siber serta melindungi data kritical dari kerusakan atau pencurian. *Framework* ini tidak hanya menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik organisasi dalam konteks kesehatan di Indonesia tetapi juga memenuhi standar keamanan internasional.

Luaran 1.3.

Terjaminnya kinerja server yang optimal untuk mendukung kelancaran operasional dan pengelolaan data pada sistem.

▶ Kegiatan 1.3.1:

Menyusun dan mengimplementasikan rencana cadangan untuk infrastruktur teknologi guna mengantisipasi *downtime server*. Untuk mengantisipasi potensi *downtime server* yang dapat mengganggu operasional sistem, SATUSEHAT SDM telah menyusun dan akan mengimplementasikan rencana cadangan yang komprehensif. Rencana ini mencakup penggunaan *server* cadangan, sistem pencadangan data, dan prosedur pemulihan bencana yang detail. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meminimalisir waktu henti tidak terduga dan memastikan bahwa sistem dapat segera kembali beroperasi dengan minimal gangguan.

Dengan rencana cadangan yang *robust*, sistem SATUSEHAT SDM mampu menyediakan layanan yang konsisten dan andal, bahkan dalam situasi darurat atau ketika server utama mengalami masalah.

▶ Kegiatan 1.3.2:

Penyesuaian kapabilitas server untuk mengelola penggunaan SATUSEHAT SDM dalam berbagai macam situasi dan kondisi.

Mengingat beragamnya kebutuhan dan kondisi penggunaan sistem SATUSEHAT SDM, maka perlu dilakukan penyesuaian kapabilitas server untuk memenuhi tuntutan tersebut. Penyesuaian ini termasuk meningkatkan kapasitas penyimpanan, memperkuat kecepatan pemrosesan data, dan meningkatkan fitur keamanan server. Ini memungkinkan sistem untuk menangani volume data yang besar serta beragam transaksi pengguna secara simultan tanpa mengalami penurunan performa. Langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua pengguna sistem, dari berbagai tingkat layanan kesehatan, mendapatkan akses yang cepat dan handal.

▶ Kegiatan 1.3.3:

Menerapkan sistem *automated alerting* dan *incident tracking system* untuk memonitor keamanan dan kesehatan sistem secara *real-time* sehingga dapat mendeteksi ancaman serta insiden dengan cepat. Untuk memonitor keamanan dan kesehatan sistem secara *real-time*, SATUSEHAT SDM perlu menerapkan sistem *automated alerting* dan *incident tracking*. Sistem ini dilengkapi dengan teknologi deteksi yang canggih untuk mengidentifikasi ancaman dan insiden secepat mungkin. Alat pemantauan ini mengirimkan notifikasi otomatis kepada tim teknis ketika potensi masalah terdeteksi, memungkinkan mereka untuk segera mengambil tindakan korektif. Fitur ini memainkan peran kritical dalam menjaga integritas dan kinerja sistem secara keseluruhan, memastikan bahwa sistem tetap aman dan beroperasi dengan efisiensi maksimal setiap saat.

3.2. Tema 2: Tata Kelola Data dan Organisasi

Tema Tata Kelola Data dan Organisasi menekankan pentingnya **standar tata kelola data di seluruh platform SATUSEHAT SDM, pemanfaatan data untuk kebijakan, mekanisme pengelolaan pengaduan, dan pemenuhan kebutuhan data NHWA.**

Tabel 3.2. Rincian kegiatan tema 2: Tata kelola data dan organisasi

Luaran	Rincian Kegiatan
<p>2.1. Terimplementasinya tata kelola data yang terstandar di seluruh platform SATUSEHAT SDM untuk mendorong peningkatan kualitas data</p>	<p>2.1.1. Melaksanakan koordinasi formal lintas direktorat yang dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan tata kelola data dan organisasi dalam pengembangan SATUSEHAT SDM.</p> <p>PIC: Ditjen SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi formal dilaksanakan secara berkala (triwulan) dengan adanya keterlibatan data champion dari setiap direktorat. Pertemuan koordinasi formal melingkupi: kualitas data, pemetaan kebutuhan data, proses bisnis, tata kelola, kebijakan terkait SATUSEHAT SDM, serta monitoring dan evaluasi program. • Terdapat dokumentasi berisi hasil diskusi koordinasi formal lintas direktorat, dan diturunkan menjadi rencana aksi
	<p>2.1.2. Melakukan pemetaan kebutuhan data dan informasi dari setiap program yang direncanakan.</p> <p>PIC: Ditjen SDM, Pusdatin/TTO, Datin Ditjen SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya peta kebutuhan data dan informasi, serta pertukaran data yang diperlukan oleh setiap Direktorat pada platform SATUSEHAT SDM, yang disusun berdasarkan hasil forum koordinasi internal SATUSEHAT SDM. Pemetaan data kebutuhan seperti: data STR pendidikan, peningkatan kompetensi, magang, <i>fellowship</i>, data kompetensi/pelatihan, named nakes DTPK untuk insentif, data pelanggaran disiplin dan perundungan, dan data-data lainnya yang perlu dipetakan berdasarkan kebutuhan tiap direktorat.
	<p>2.1.3. Mengoptimalkan standar data terkait tenaga kesehatan untuk mendukung pertukaran dan integrasi data secara <i>interoperable</i>.</p> <p>PIC: Pusdatin/TTO, Datin Ditjen SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya kesepakatan MoU terkait <i>Data Transfer Agreement</i> untuk mendukung pertukaran dan integrasi data dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait • Tersedianya dokumen protokol interoperabilitas yang memuat standar data terbaru, berfungsi sebagai panduan untuk pembaruan dan penilaian berkala

Luaran	Rincian Kegiatan
<p>2.1. Terimplementasinya tata kelola data yang terstandar di seluruh platform SATUSEHAT SDM untuk mendorong peningkatan kualitas data</p>	<p>2.1.4. Mengoptimalkan kamus data terkait tenaga kesehatan untuk mendukung pertukaran dan integrasi data secara interoperable.</p> <p>PIC: Pusdatin/TTO, Datin Ditjen SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen kamus data terbaru yang berfungsi sebagai panduan untuk pembaruan dan penilaian berkala
	<p>2.1.5. Melakukan implementasi kebijakan privasi data pada SATUSEHAT SDM.</p> <p>PIC: Pusdatin/TTO, Datin Ditjen SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen kebijakan privasi data dan mekanisme teknis untuk perlindungan data • Terlaksananya audit privasi data secara berkala dengan mengukur penilaian dampak PDP (<i>privacy impact assessment</i>) • Terlaksananya kegiatan sosialisasi kepada K/L/D/I yang sudah terhubung dengan SATUSEHAT SDM untuk meningkatkan kesadaran atas privasi dan keamanan data sesuai PDP dan ISO 27001: 2002
	<p>2.1.6. Melakukan tinjauan kebijakan terkait pengembangan SATUSEHAT SDM</p> <p>PIC: Ditjen SDM, Pusdatin/TTO, Datin Ditjen SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen analisis kebijakan yang bertujuan mengembangkan SATUSEHAT SDM agar relevan dengan kebijakan yang berlaku seperti UU PDP, SIKN, dan lainnya • Tersedianya dokumen rekomendasi kebijakan, rencana kerja, serta indikator yang mendukung pengembangan SATUSEHAT SDM
	<p>2.1.7. mekanisme pengkinian data dan validasi data berjenjang untuk meningkatkan kualitas data SATUSEHAT SDM.</p> <p>PIC: Ditjen SDM, Pusdatin/TTO, Datin Ditjen SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya mekanisme pengkinian data bagi nakes/named terkait data SATUSEHAT SDM • Tersedianya mekanisme validasi berjenjang bagi fasyankes dan dinkes terkait data SATUSEHAT SDM
	<p>2.1.8. Mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi terpadu yang mampu memantau secara real-time tata kelola data, kualitas data, dan pemanfaatannya, serta memastikan integrasi data ke dalam platform SATUSEHAT SDM untuk mendukung penerbitan laporan evaluasi berkala.</p> <p>PIC: Ditjen SDM, Pusdatin/TTO, Datin Ditjen SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya mekanisme pemantauan seluruh komponen monitoring dan evaluasi yang mencakup: kualitas data, performa sistem, proses bisnis, tata kelola, kebijakan di lingkungan Kementerian Kesehatan, dan manajemen sistem informasi, pemanfaatan data oleh K/L/D/I, dan kepatuhan terhadap standar NHTA • Terlaksananya penilaian <i>data quality assessment</i> secara berkala

Luaran	Rincian Kegiatan
<p>2.2. Pemanfaatan data SATUSEHAT SDM untuk pengembangan kebijakan</p>	<p>2.2.1. Menyediakan dashboard yang komprehensif, interaktif, dan sesuai kebutuhan direktorat (pengguna). PIC: Pusdatin/TTO, Datin Ditjen SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat <i>dashboard</i> yang menampilkan data SDM sesuai kebutuhan direktorat (e.g <i>Dashboard</i> SDM, Dashboard SIP, <i>Dashboard</i> IKK/IKP, Dashboard Perencanaan) • <i>Dashboard</i> yang tersedia terus diperbarui secara berkala mengikuti perkembangan kebutuhan direktorat pemilik program dan pengguna SATUSEHAT SDM • Meningkatnya efisiensi operasional melalui penyediaan data dan laporan yang dapat diakses secara real-time. • Stakeholder di berbagai level (pusat dan daerah) dapat memantau kinerja dan capaian terkait pengelolaan SDM kesehatan dengan lebih efektif. • Meningkatnya jumlah laporan strategis kebijakan SDM yang memanfaatkan visualisasi data SATUSEHAT SDM
	<p>2.2.2. Menyusun panduan teknis pemanfaatan SATUSEHAT SDM untuk fasyankes dan nakes/named. PIC: Ditjen SDM, Pusdatin/TTO, Datin Ditjen SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen petunjuk teknis yang mencakup sosialisasi, panduan pelaksanaan, pendampingan, dan pelatihan implementasi SATUSEHAT SDM untuk fasyankes dan nakes/named • Dokumen petunjuk teknis diperbarui secara berkala sesuai perkembangan SATUSEHAT SDM
	<p>2.2.3. Pengelolaan permintaan akses data dan prioritas permintaan data SATUSEHAT SDM. PIC: Datin Ditjen SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen resmi SOP yang mengatur mekanisme permintaan data yang disertai dengan tenggat waktu, data spesifik, dan format data yang dibutuhkan • Tersedianya platform/dokumentasi yang disepakati dalam forum koordinasi internal SATUSEHAT SDM terkait permintaan akses dan prioritas data

Luaran	Rincian Kegiatan
<p>2.3. Tersedianya mekanisme pengelolaan pengaduan dalam pemanfaatan SATUSEHAT SDM</p>	<p>2.3.1. Menyusun mekanisme koordinasi dan evaluasi program lintas direktorat. PIC: Ditjen SDM <u>INDIKATOR KEBERHASILAN</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen resmi SOP yang mengatur mekanisme pengelolaan pengaduan
	<p>2.3.2. Membangun saluran komunikasi internal yang dapat menyelaraskan aduan dengan tim <i>helpdesk</i> terpusat terkait pengelolaan aduan SATUSEHAT SDM. PIC: Ditjen SDM, Pusdatin/TTO, Datin Ditjen SDM <u>INDIKATOR KEBERHASILAN</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya jalur komunikasi resmi pengelolaan pengaduan antara Ditjen SDM dengan tim <i>helpdesk</i> terpusat
	<p>2.3.3. Sosialisasi dokumen resmi SOP pengelolaan aduan SATUSEHAT SDM kepada fasyankes dan nakes/named. PIC: Ditjen SDM, Pusdatin/TTO, Datin Ditjen SDM <u>INDIKATOR KEBERHASILAN</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya sosialisasi SOP mekanisme pengaduan kepada tim <i>helpdesk</i>, fasyankes, dan nakes/named • Panduan dievaluasi dan diperbarui berkala sesuai kebutuhan atau regulasi terbaru
	<p>2.3.4. Menyusun langkah aksi dari evaluasi rutin terhadap aduan yang diterima terkait SATUSEHAT SDM. PIC: Ditjen SDM, Pusdatin/TTO, Datin Ditjen SDM <u>INDIKATOR KEBERHASILAN</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya langkah aksi yang diikuti dengan langkah-langkah perbaikan yang jelas dan terkoordinasi dari evaluasi rutin dari aduan yang diterima • Terjadi peningkatan pada aspek-aspek dalam SATUSEHAT SDM yang sebelumnya menjadi aduan

Luaran	Rincian Kegiatan
<p>2.4. Terpenuhinya kebutuhan data NHTWA dari SATUSEHAT SDM</p>	<p>2.4.1. Melakukan pemetaan kebutuhan data dari NHTWA dengan ketersediaan data dari SATUSEHAT SDM.</p> <p>PIC: Ditjen SDM, Pusdatin/TTO, Datin Ditjen SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dokumentasi ketersediaan data SATUSEHAT SDM untuk data NHTWA
	<p>2.4.2. Mengadakan forum koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk membangun komitmen bersama dan menyusun struktur tata kelola utama NHTWA yang terintegrasi dengan kebijakan nasional.</p> <p>PIC: Ditjen SDM, Pusdatin/TTO, Datin Ditjen SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya sosialisasi kebutuhan NHTWA ke direktorat pemilik program
	<p>2.4.3. Mengembangkan dashboard khusus berdasarkan indikator NHTWA sehingga dapat memaksimalkan penggunaan SATUSEHAT SDM dalam skala yang lebih luas.</p> <p>PIC: Datin Ditjen SDM, Pusdatin/TTO</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Terdapat dashboard yang menyediakan kebutuhan informasi berdasarkan indikator NHTWA

“Implementasi tata kelola data yang terstandar di seluruh platform SATUSEHAT SDM bertujuan untuk memastikan kualitas, interoperabilitas, dan keamanan data SDM kesehatan agar dapat digunakan secara optimal dalam pengambilan keputusan.”

Pemanfaatan data yang efektif akan mendukung pengembangan kebijakan berbasis bukti, termasuk dalam perencanaan tenaga kesehatan dan evaluasi distribusinya. Selain itu, topik 2 juga membahas terkait **mekanisme pengelolaan pengaduan terkait SATUSEHAT SDM**, memungkinkan nakes dan named dan pemangku kepentingan memberikan masukan dan menyampaikan kendala dalam pemanfaatan platform. Dalam skala global, **SATUSEHAT SDM diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan data National Health Workforce Accounts (NHTWA) WHO** untuk mendukung perencanaan tenaga kesehatan yang lebih komprehensif dan selaras dengan standar internasional.

3.2.1. Rincian Kegiatan Tema 2

Luaran 2.1.

Terimplementasinya tata kelola data yang terstandar di seluruh platform SATUSEHAT SDM untuk mendorong peningkatan kualitas data.

▶ Kegiatan 2.1.1:

Melaksanakan koordinasi formal lintas direktorat yang dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan tata kelola data dan organisasi dalam pengembangan SATUSEHAT SDM. Kegiatan ini mencakup pertemuan rutin antar direktorat di Ditjen SDM guna memastikan harmonisasi dalam perencanaan, pengelolaan data dan organisasi. Koordinasi ini bertujuan untuk menyusun standar operasional yang seragam, mengatasi kendala teknis dalam interoperabilitas data, serta meningkatkan sinergi antara berbagai unit dalam pemanfaatan data SATUSEHAT SDM. Forum ini juga berfungsi sebagai ruang diskusi untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem serta menyusun strategi peningkatan kualitas data tenaga kesehatan.

Koordinasi formal ini diharapkan setidaknya dilakukan setiap triwulan dengan melibatkan Datin Ditjen SDM, Pusdatin/TTO, direktorat-direktorat di Ditjen SDM yang diwakili oleh PMO, dan Data Champion. Pertemuan koordinasi formal ini dapat melingkupi pembahasan terkait: kualitas data, pemetaan kebutuhan data, proses bisnis, tata kelola, kebijakan terkait SATUSEHAT SDM, serta monitoring dan evaluasi program.



▶ Kegiatan 2.1.2:

Melakukan pemetaan kebutuhan data dan informasi dari setiap program yang direncanakan. Proses ini melibatkan identifikasi kebutuhan data dari berbagai program yang dikelola oleh Ditjen SDM, baik dalam aspek perencanaan tenaga kesehatan, pengelolaan kompetensi, maupun distribusi tenaga kerja (**Lampiran 7**). Pemetaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua informasi yang dikumpulkan dan diolah dalam SATUSEHAT SDM relevan, akurat, dan selaras dengan kebutuhan kebijakan kesehatan nasional. Selain itu, kegiatan ini juga membantu dalam merancang skema interoperabilitas data dengan sistem lain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan SDM kesehatan.

▶ Kegiatan 2.1.3:

Mengoptimalkan standar data terkait tenaga kesehatan untuk mendukung pertukaran dan integrasi data secara interoperable. Pengoptimalan standar data dilakukan dengan penyesuaian format, nomenklatur, dan klasifikasi data tenaga kesehatan agar dapat dengan mudah dipertukarkan dan diintegrasikan dengan berbagai sistem lain, baik internal Kemenkes maupun eksternal ke depannya, seperti BKN dan BPJS. Standarisasi ini akan mempercepat proses validasi, meminimalkan kesalahan dalam analisis data, serta meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat dan terstruktur.

▶ Kegiatan 2.1.4:

Mengoptimalkan kamus data terkait tenaga kesehatan untuk mendukung pertukaran dan integrasi data secara interoperable. Pembaruan dan optimalisasi kamus data tenaga kesehatan bertujuan untuk memastikan keseragaman istilah, klasifikasi, dan metadata yang digunakan dalam SATUSEHAT SDM. Dengan adanya kamus data yang terbaru secara berkala, proses integrasi dengan sistem lain dapat berjalan lebih lancar, serta mengurangi risiko inkonsistensi dan duplikasi data.

Selain itu, kamus data ini akan dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan kebijakan SDM kesehatan berbasis data yang lebih akurat.

- ▶ Kegiatan 2.1.5:**
Melakukan implementasi kebijakan privasi data pada SATUSEHAT SDM. Kegiatan ini meliputi penerapan regulasi perlindungan data pribadi (PDP) dalam pengelolaan informasi tenaga kesehatan di SATUSEHAT SDM, termasuk enkripsi data, pembatasan akses berbasis peran, serta mekanisme audit keamanan berkala. Implementasi ini bertujuan untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan integritas data, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi nasional seperti UU PDP dan standar internasional seperti ISO 27001:2022.
- ▶ Kegiatan 2.1.6:**
Melakukan tinjauan kebijakan terkait pengembangan SATUSEHAT SDM. Proses ini mencakup evaluasi kebijakan yang telah berjalan, identifikasi tantangan dalam implementasi, serta rekomendasi perbaikan untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan data tenaga kesehatan. Tinjauan kebijakan ini juga mempertimbangkan regulasi nasional dan global terkait kesehatan digital serta pengelolaan SDM kesehatan, sehingga SATUSEHAT SDM dapat berkembang menjadi sistem yang lebih adaptif, efektif, dan selaras dengan kebutuhan stakeholder. Tinjauan kebijakan ini perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan SATUSEHAT SDM selalu relevan dengan kebijakan terbaru.
- ▶ Kegiatan 2.1.7:**
Mengembangkan mekanisme pengkinian data dan validasi data berjenjang untuk meningkatkan kualitas data SATUSEHAT SDM. Pembaruan data tenaga kesehatan perlu dilakukan secara berkala dengan membangun sistem validasi berjenjang, di mana setiap perubahan data harus diverifikasi oleh instansi terkait, seperti fasilitas kesehatan atau dinas kesehatan setempat.

Dengan mekanisme ini, akurasi dan keandalan data SATUSEHAT SDM dapat ditingkatkan, sehingga meminimalkan risiko kesalahan informasi yang berdampak pada kebijakan dan distribusi tenaga kesehatan secara keseluruhan.

- ▶ Kegiatan 2.1.8:**
Mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi terpadu yang mampu memantau secara *real-time* tata kelola data, kualitas data, dan pemanfaatannya, serta memastikan integrasi data ke dalam platform SATUSEHAT SDM untuk mendukung penerbitan laporan evaluasi berkala. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun sistem monitoring berbasis data *real-time* yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk memantau kualitas, penggunaan, dan efektivitas SATUSEHAT SDM secara berkelanjutan. Dengan adanya mekanisme ini, laporan evaluasi dapat disusun secara berkala guna mengidentifikasi area perbaikan, menilai dampak kebijakan, serta memastikan keberlanjutan integrasi data dengan berbagai platform eksternal. Proses monitoring dan evaluasi ini dapat dilakukan dalam forum koordinasi internal yang dilakukan secara berkala.

Luaran 2.2.

Pemanfaatan data SATUSEHAT SDM untuk pengembangan kebijakan.

- ▶ Kegiatan 2.2.1:**
Menyediakan dashboard yang komprehensif, interaktif, dan sesuai kebutuhan direktorat (pengguna). *Dashboard* SATUSEHAT SDM perlu dikembangkan agar semakin komprehensif, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing direktorat, sehingga dapat menyajikan data tenaga kesehatan secara *real-time* dan mudah diakses.

Perlu pengembangan dashboard yang menampilkan data SDM Kesehatan sesuai kebutuhan direktorat (e.g *Dashboard* SDM Kesehatan, *Dashboard* Monitoring SIP, *Dashboard* IKK/IKP, *Dashboard* Perencanaan). Fitur dalam *dashboard* mencakup visualisasi data tenaga kesehatan, analisis tren, serta indikator kinerja yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu, dashboard ini akan dilengkapi dengan filter khusus untuk menyesuaikan tampilan data sesuai kebutuhan pengguna, sehingga memudahkan monitoring dan evaluasi program yang berkaitan dengan tenaga kesehatan di berbagai wilayah.

- ▶ **Kegiatan 2.2.2:**
Menyusun panduan teknis pemanfaatan SATUSEHAT SDM Kesehatan untuk fasyankes dan nakes/named. Panduan teknis akan disusun untuk membantu fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dan tenaga kesehatan (nakes/named) dalam mengakses dan memanfaatkan SATUSEHAT SDM Kesehatan secara optimal. Panduan ini mencakup prosedur input dan pembaruan data, validasi informasi, serta cara menggunakan fitur utama dalam sistem. Selain itu, panduan ini juga akan berisi solusi atas permasalahan teknis yang umum terjadi, sehingga pengguna dapat menyelesaikan kendala secara mandiri. Sosialisasi dan pelatihan juga akan dilakukan untuk memastikan pemahaman yang baik dalam implementasi sistem. Pembuatan panduan teknis ini perlu melibatkan direktorat dan tim helpdesk, sehingga panduan yang diberikan lebih kontekstual dan tepat sasaran.
- ▶ **Kegiatan 2.2.3:**
Pengelolaan permintaan akses data dan prioritas permintaan data SATUSEHAT SDM Kesehatan. Mekanisme pengelolaan akses data akan dirancang untuk mengatur dan memprioritaskan permintaan data yang masuk, sehingga penggunaan data lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan strategis.

Sistem ini akan mencakup alur permintaan resmi, batasan akses berdasarkan level pengguna, serta standar waktu respons untuk memastikan data tersedia tepat waktu. Selain itu, akan dibuat prosedur persetujuan berbasis kepentingan kebijakan dan regulasi guna menjaga keamanan serta privasi data tenaga kesehatan dalam SATUSEHAT SDM Kesehatan.

Luaran 2.3.

Tersedianya mekanisme pengelolaan pengaduan dalam pemanfaatan SATUSEHAT SDM Kesehatan

- ▶ **Kegiatan 2.3.1:**
Menyusun mekanisme koordinasi dan evaluasi program lintas direktorat. Mekanisme koordinasi dan evaluasi akan dirancang untuk memastikan sinkronisasi lintas direktorat dalam pengelolaan aduan terkait SATUSEHAT SDM Kesehatan. Mekanisme ini mencakup jadwal koordinasi rutin, pembagian peran dan tanggung jawab antar direktorat, serta prosedur evaluasi yang terstruktur. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi pola permasalahan, efektivitas penyelesaian aduan, serta rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas layanan SATUSEHAT SDM Kesehatan.
- ▶ **Kegiatan 2.3.2:**
Membangun saluran komunikasi internal yang dapat menyalurkan aduan dengan tim helpdesk terpusat terkait pengelolaan aduan SATUSEHAT SDM Kesehatan. Saluran komunikasi internal akan dibangun untuk memastikan aduan yang masuk dapat diteruskan dengan cepat dan tepat ke tim helpdesk terpusat. Sistem ini akan mencakup penggunaan platform digital untuk pencatatan dan pelacakan aduan, sehingga setiap permasalahan dapat dipantau hingga tuntas. Selain itu, standar prosedur akan diterapkan agar setiap aduan dikategorikan sesuai urgensi dan jenis masalah, sehingga penanganannya lebih efisien.

▶ **Kegiatan 2.3.3:**
Sosialisasi dokumen resmi SOP pengelolaan aduan SATUSEHAT SDM kepada fasyankes dan nakes/named.

Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan aduan akan disosialisasikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dan tenaga kesehatan (nakes/named) untuk memastikan pemahaman yang seragam dalam penyampaian dan penanganan aduan. Sosialisasi ini dilakukan melalui pelatihan, webinar, serta penyediaan materi panduan dalam format digital dan cetak, sehingga semua pihak mengetahui cara yang benar untuk mengajukan, menindaklanjuti, dan menyelesaikan aduan terkait SATUSEHAT SDM.

▶ **Kegiatan 2.3.4:**
Sosialisasi dokumen resmi SOP pengelolaan aduan SATUSEHAT SDM kepada fasyankes dan nakes/named.

Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan aduan akan disosialisasikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dan tenaga kesehatan (nakes/named) untuk memastikan pemahaman yang seragam dalam penyampaian dan penanganan aduan. Sosialisasi ini dilakukan melalui pelatihan, webinar, serta penyediaan materi panduan dalam format digital dan cetak, sehingga semua pihak mengetahui cara yang benar untuk mengajukan, menindaklanjuti, dan menyelesaikan aduan terkait SATUSEHAT SDM.



Luaran 2.4.

Terpenuhinya kebutuhan data NHWA dari SATUSEHAT SDM.

▶ **Kegiatan 2.4.1:**
Melakukan pemetaan kebutuhan data dari NHWA dengan ketersediaan data dari SATUSEHAT SDM.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mencocokkan kebutuhan data *National Health Workforce Accounts* (NHWA) dengan data yang tersedia di SATUSEHAT SDM. Pemetaan ini mencakup analisis terhadap kelengkapan, kesesuaian format, dan interoperabilitas data untuk memastikan bahwa SATUSEHAT SDM dapat mendukung pelaporan NHWA secara akurat dan sesuai standar internasional. Selain itu, proses ini juga akan membantu dalam mengisi kesenjangan data serta menentukan strategi untuk mengintegrasikan informasi yang belum tersedia dalam sistem. Indikator-indikator data NHWA yang prioritas dapat dilihat di [Lampiran 6](#).

▶ **Kegiatan 2.4.2:**
Mengadakan forum koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk membangun komitmen bersama dan menyusun struktur tata kelola utama NHWA yang terintegrasi dengan kebijakan nasional.

Forum koordinasi akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Kesehatan, lembaga pendidikan, organisasi profesi, serta mitra internasional untuk menyelaraskan tata kelola data NHWA dengan kebijakan nasional. Setidaknya, dalam forum tersebut, perlu disosialisasikan kebutuhan data NHWA kepada direktorat-direktorat di Ditjen SDM. Dalam forum ini, akan disusun kerangka kerja dan mekanisme pertukaran data yang memastikan pemenuhan standar NHWA tanpa mengabaikan regulasi nasional terkait pengelolaan data tenaga kesehatan. Selain itu, forum ini bertujuan untuk memperkuat komitmen antar lembaga dalam memanfaatkan SATUSEHAT SDM sebagai platform utama dalam perencanaan dan monitoring tenaga kesehatan.

Kegiatan 2.4.3: Mengembangkan dashboard khusus berdasarkan indikator NHTA sehingga dapat memaksimalkan penggunaan SATUSEHAT SDM dalam skala yang lebih luas. Dashboard NHTA akan dikembangkan untuk menampilkan indikator tenaga kesehatan secara lebih sistematis dan berbasis data real-time, sehingga dapat digunakan untuk pemantauan, evaluasi, serta perencanaan SDM kesehatan yang lebih efektif. Dashboard ini akan memvisualisasikan distribusi tenaga kesehatan, tren pertumbuhan, rasio tenaga kesehatan terhadap populasi, serta indikator kompetensi dan pelatihan.



3.3. Tema 3: Kapasitas SDM Internal

Tabel 3.3 Rincian Kegiatan Tema 3: Peningkatan Kapasitas SDM Internal

Luaran	Rincian Kegiatan
<p>3.1. Terwujudnya program Data Champion pada Ditjen SDM untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan dan pemanfaatan data SS-SDMK secara optimal dan berkelanjutan.</p>	<p>3.1.1. Melakukan penunjukan dan operasionalisasi Data Champion pada setiap unit di Ditjen SDM untuk memperkuat pengelolaan dan pemanfaatan data secara strategis.</p> <p>PIC: Ditjen SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman unit pada Ditjen SDM atas pengelolaan dan pemanfaatan data paling rendah sebesar 80% • Durasi ketersediaan data antara jadwal rilis dan pengumpulan tidak lebih dari 14 hari kerja • Jumlah kebijakan yang diambil untuk mendukung transformasi digital di lingkungan Ditjen SDM
	<p>3.1.2. Meningkatkan kualitas dan kompetensi Data Champion melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan keterampilan terkait pengelolaan dan pemanfaatan data.</p> <p>PIC: Ditjen SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya Data Champion yang berkualitas dan kompeten untuk mendukung pengelolaan data yang lebih efektif dan efisien di Ditjen SDM. • Durasi ketersediaan data antara jadwal rilis dan pengumpulan tidak lebih dari 14 hari kerja

Luaran	Rincian Kegiatan
<p>3.2. Terwujudnya program Digital Leadership pada Ditjen SDMK untuk mendorong transformasi digital yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan dalam pengelolaan SDM kesehatan.</p>	<p>3.2.1. Mengembangkan dan melaksanakan program Digital Leadership untuk memastikan para pengambil kebijakan memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan dalam menghadapi tantangan digital.</p> <p>PIC: Ditjen SDMK</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya pengambil kebijakan tentang teknologi digital terkini dan potensinya dalam pengelolaan SDM kesehatan. • Jumlah kebijakan yang diambil untuk mendukung transformasi digital di lingkungan Ditjen SDMK • Tersedianya rumusan kebijakan yang adaptif terhadap tantangan digital
	<p>3.2.2. Mendefinisikan kebutuhan data untuk mendukung pencapaian output, outcome, dan dampak melalui identifikasi dan dokumentasi kebutuhan data secara terstruktur.</p> <p>PIC: Ditjen SDMK, Datin Ditjen SDMK</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kebijakan yang diambil untuk mendukung transformasi digital di lingkungan Ditjen SDMK • Jumlah data yang dimanfaatkan (dilihat, diunduh, diakses) oleh stakeholder
	<p>3.2.3. Mendorong pelaksanaan pelatihan dan pembiasaan penggunaan data bagi pegawai Ditjen SDMK untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan serta pemanfaatan data.</p> <p>PIC: Ditjen SDMK, Datin Ditjen SDMK</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman ASN/Pegawai Ditjen SDMK atas pengelolaan dan pemanfaatan data paling rendah sebesar 80% • Jumlah kebijakan yang diambil untuk mendukung transformasi digital di lingkungan Ditjen SDMK • Jumlah data yang dimanfaatkan (dilihat, diunduh, diakses) oleh stakeholder • Durasi ketersediaan data antara jadwal rilis dan pengumpulan tidak lebih dari 14 hari kerja



Luaran	Rincian Kegiatan
<p>3.3. Terwujudnya peningkatan budaya pemanfaatan data di Ditjen SDMK untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti dan efisiensi operasional.</p>	<p>3.3.1. Menyusun dan mengimplementasikan sistem knowledge management yang berkelanjutan dengan memanfaatkan berbagai media untuk mendukung pengelolaan dan berbagi pengetahuan di Ditjen SDMK.</p> <p>PIC: Ditjen SDMK, Datin Ditjen SDMK</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase ASN/Pegawai Ditjen SDMK yang mengakses knowledge management system sebesar 75% setiap semesternya
	<p>3.3.2. Memastikan capaian implementasi SATUSEHAT SDMK menjadi salah satu agenda dalam pembahasan isu strategis lintas sektor secara berkala.</p> <p>PIC: Ditjen SDMK, Datin Ditjen SDMK</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • 90% Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terdaftar dan menjadi pengguna aktif di SATUSEHAT SDMK • Paling rendah 70% K/L/D/I di tingkat pusat dan daerah mengikuti pembahasan capaian implementasi SDMK dalam bentuk sosialisasi ataupun lokakarya setiap semester
	<p>3.3.3. Menyusun dan menerapkan mekanisme umpan balik pada setiap produk pemanfaatan data untuk memastikan kualitas, relevansi, dan kebermanfaatannya.</p> <p>PIC: Ditjen SDMK, Datin Ditjen SDMK, Pusdatin/TTO</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kebijakan yang diambil untuk mendukung transformasi digital di lingkungan Ditjen SDMK • Tersedianya fitur manajemen umpan balik yang dioperasikan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan data Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK), Ditjen SDMK merencanakan dan akan menginisiasi serangkaian program strategis yang bertujuan memperkuat kapasitas internal dan mendukung transformasi digital. Program *Data Champion* telah diluncurkan untuk memperkuat pengelolaan data di setiap unit melalui penunjukan individu-individu berkompeten yang akan menjalani pelatihan dan sertifikasi intensif. Sementara itu, program *Digital Leadership* bertujuan mengembangkan pemimpin-pemimpin digital yang mampu mengatasi tantangan dalam dunia digital yang dinamis, melalui program pelatihan yang mendalam dan pengembangan kompetensi digital secara terstruktur.

Selain itu, Ditjen SDMK juga berkomitmen untuk meningkatkan budaya pemanfaatan data melalui penyusunan dan penerapan sistem knowledge management yang inovatif, yang mendukung berbagi pengetahuan dan peningkatan pengambilan keputusan berbasis bukti. Kegiatan-kegiatan ini dirancang tidak hanya untuk memperkuat infrastruktur data yang ada tetapi juga untuk memastikan bahwa data dan informasi yang dihasilkan relevan dan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan di Indonesia.

3.1.1. Rincian Kegiatan Tema 3

Luaran 3.1.

Terwujudnya program *Data Champion* pada Ditjen SDM Kesehatan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan dan pemanfaatan data SS-SDMK secara optimal dan berkelanjutan.

▶ Kegiatan 3.1.1:

Melakukan penunjukan dan operasionalisasi *Data Champion* pada setiap unit di Ditjen SDM Kesehatan untuk memperkuat pengelolaan dan pemanfaatan data secara strategis. Untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan data, Ditjen SDM Kesehatan akan melaksanakan penunjukan dan operasionalisasi *Data Champion* di setiap unit. *Data Champion* ini dipilih berdasarkan keahlian dan pengalaman mereka dalam pengelolaan data dan bertugas untuk memimpin inisiatif pengelolaan data di unit mereka. Peran ini mencakup koordinasi dengan unit lain dalam pengumpulan data, memastikan kualitas data yang masuk, serta menganalisis dan menyediakan data tersebut untuk kebutuhan pengambilan keputusan strategis. Operasionalisasi ini membantu setiap unit di Ditjen SDM Kesehatan tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data tetapi juga meningkatkan kemampuan mereka untuk menggunakan data tersebut dalam mengidentifikasi tren kesehatan dan kebutuhan intervensi.

▶ Kegiatan 3.1.2:

Meningkatkan kualitas dan kompetensi *Data Champion* melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan keterampilan terkait pengelolaan dan pemanfaatan data. Ditjen SDM Kesehatan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi para *Data Champion* melalui serangkaian pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan keterampilan yang terfokus pada pengelolaan dan pemanfaatan data. Program pelatihan ini dirancang untuk memastikan bahwa *Data Champion* memiliki pemahaman yang mendalam tentang alat dan teknik analitik terbaru, keamanan data, serta hukum dan etika terkait pengelolaan data.

Luaran 3.2.

Terwujudnya program *Digital Leadership* pada Ditjen SDM Kesehatan untuk mendorong transformasi digital yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan dalam pengelolaan SDM kesehatan.

▶ Kegiatan 3.2.1:

Mengembangkan dan melaksanakan program *Digital Leadership* untuk memastikan para pengambil kebijakan memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan dalam menghadapi tantangan digital. Ditjen SDM Kesehatan akan mengembangkan dan melaksanakan program *Digital Leadership* yang komprehensif, ditujukan untuk memastikan bahwa semua pengambil kebijakan di tingkat manajemen memiliki pemahaman yang mendalam tentang potensi dan tantangan dari transformasi digital. Program ini meliputi pelatihan mengenai teknologi terbaru, manajemen perubahan, serta strategi untuk mengadopsi solusi digital secara efektif. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa para pemimpin di Ditjen SDM Kesehatan dilengkapi dengan pengetahuan, kemauan, dan kemampuan untuk mengambil keputusan strategis yang mendukung inisiatif digital, sehingga memfasilitasi transisi yang lancar ke operasional yang lebih berbasis digital.

▶ Kegiatan 3.2.2:

Mendefinisikan kebutuhan data untuk mendukung pencapaian output, outcome, dan dampak melalui identifikasi dan dokumentasi kebutuhan data secara terstruktur. Sebagai bagian dari peta jalan ini, Ditjen SDM Kesehatan juga berfokus pada penentuan dan dokumentasi kebutuhan data yang akurat untuk mendukung pencapaian output, outcome, dan dampak dari program kesehatan. Kegiatan ini melibatkan identifikasi detail dari jenis-jenis data yang diperlukan, sumber data, cara pengolahan, dan bagaimana data tersebut digunakan untuk membuat keputusan yang berbasis bukti. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas dan relevansi data yang dikumpulkan dan dianalisis tetapi juga memastikan bahwa data tersebut dapat diakses dan dimanfaatkan secara maksimal untuk peningkatan kesehatan publik.

▶ **Kegiatan 3.2.3:** **Mendorong pelaksanaan pelatihan dan pembiasaan penggunaan data bagi pegawai Ditjen SDMK untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan serta pemanfaatan data.** Untuk mendukung pengembangan keterampilan pengelolaan dan pemanfaatan data di semua level organisasi, Ditjen SDMK mendorong pelaksanaan pelatihan dan pembiasaan penggunaan data. Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan teknis staf dalam mengelola data secara efektif, dari pengumpulan hingga analisis data. Sesi pembiasaan rutin diadakan untuk memperkuat penggunaan data dalam praktik sehari-hari, sehingga memperkuat budaya berbasis data di seluruh organisasi. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan individu tetapi juga memperkuat fondasi data sebagai alat penting dalam strategi kesehatan nasional.

Luaran 3.3.

Terwujudnya peningkatan budaya pemanfaatan data di Ditjen SDMK untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti dan efisiensi operasional.

▶ **Kegiatan 3.3.1:** **Menyusun dan mengimplementasikan sistem knowledge management yang berkelanjutan dengan memanfaatkan berbagai media untuk mendukung pengelolaan dan berbagi pengetahuan di Ditjen SDMK.** Untuk memperkuat pengelolaan dan berbagi pengetahuan di Ditjen SDMK, sebuah sistem *knowledge management* yang berkelanjutan akan disusun dan diimplementasikan. Sistem ini memanfaatkan berbagai media, termasuk platform digital, *webinar*, dan lokakarya, untuk memfasilitasi distribusi pengetahuan yang efisien antar divisi dan individu. Pendekatan ini memungkinkan pengetahuan dan wawasan yang diperoleh dari data yang dikumpulkan untuk disebarluaskan secara luas, memperkaya pemahaman bersama dan meningkatkan kualitas pembuatan kebijakan.

▶ **Kegiatan 3.3.2:** **Memastikan capaian implementasi SATUSEHAT SDMK menjadi salah satu agenda dalam pembahasan isu strategis lintas sektor secara berkala.** Sebagai bagian dari upaya untuk memastikan implementasi efektif dari aplikasi SATUSEHAT SDMK, Ditjen SDMK perlu memasukkan capaian dan perkembangan aplikasi ini sebagai salah satu agenda tetap dalam pembahasan isu strategis lintas sektor. Pertemuan ini diadakan secara berkala, memungkinkan semua stakeholder terkait untuk tetap terinformasi tentang kemajuan, tantangan, dan solusi yang berkaitan dengan implementasi aplikasi. Dengan demikian, Ditjen SDMK memastikan bahwa aplikasi SATUSEHAT SDMK terus beradaptasi dan berinovasi sesuai dengan kebutuhan sektor kesehatan yang dinamis, serta mendapatkan dukungan yang kuat dari berbagai pihak.

▶ **Kegiatan 3.3.3:** **Menyusun dan menerapkan mekanisme umpan balik pada setiap produk pemanfaatan data untuk memastikan kualitas, relevansi, dan kebermanfaatannya.** Untuk terus meningkatkan kualitas dan relevansi produk pemanfaatan data, Ditjen SDMK akan menyusun dan menerapkan mekanisme umpan balik yang komprehensif pada setiap produk pemanfaatan data. Mekanisme ini memungkinkan para pengguna dan *stakeholder* untuk memberikan masukan mereka tentang bagaimana data digunakan, manfaat yang diperoleh, serta saran perbaikan. Dengan terus menerima dan memproses umpan balik ini, Ditjen SDMK dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap produk data tidak hanya memenuhi standar kualitas yang tinggi tetapi juga relevan dan bermanfaat bagi pengguna. Proses ini penting untuk mempertahankan integritas dan kebermanfaatannya data dalam mendukung kebijakan kesehatan yang berbasis bukti.

3.4. Tema 4: Ekosistem (Kemitraan Strategis) SATUSEHAT SDM

Tema 4 membahas rencana kegiatan pada luaran yang berfokus untuk membangun kolaborasi lintas sektor antara akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media (A-B-C-G-M) untuk mendukung pengelolaan tenaga kesehatan dari tahap pendidikan hingga masuk ke pasar kerja. Kemitraan ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran masing-masing stakeholder dalam penguatan ekosistem SATUSEHAT SDM, termasuk dalam penyebaran informasi, edukasi, serta advokasi SATUSEHAT SDM kepada basis pengguna masing-masing stakeholder A-B-C-G-M.

Selain itu, tema ekosistem menjelaskan terkait potensi pertukaran dan pemanfaatan data secara lebih luas dan efisien baik untuk kepentingan publik maupun riset, sehingga data SATUSEHAT SDM dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih berbasis bukti, baik dalam perencanaan tenaga kesehatan maupun dalam mendukung kebijakan kesehatan nasional.

Tabel 3.4. Rincian Kegiatan Tema 4: Ekosistem (Kemitraan Strategis) SATUSEHAT SDM

Luaran	Rincian Kegiatan
<p>4.1. Terjalannya kemitraan strategis antar stakeholder A-B-C-G-M (<i>academician, business, community, government, media</i>) untuk mengakomodasi kebutuhan pada setiap tahapan journey nakes/named dari fase pendidikan hingga masuk ke pasar tenaga kerja SDM.</p>	<p>4.1.1. Formalisasi forum koordinasi lintas A-B-C-G-M melalui pembentukan <i>Technical Working Group</i>. PIC: Ditjen SDM INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat dokumen resmi yang memuat peran, fungsi, area keterlibatan, serta agenda pertemuan Technical Working Group (TWG) SATUSEHAT SDM yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal SDM. Dokumen memuat rencana kegiatan kolaboratif lintas sektor, termasuk peta kebutuhan dan sumber daya, guna mendukung kemitraan strategis dalam perjalanan nakes mulai dari fase pendidikan hingga masuk ke pasar tenaga kerja • Peresmian TWG SATUSEHAT SDM melalui Surat Penunjukan Langsung oleh Direktur Jenderal SDM. Surat penunjukan memuat deskripsi tugas, wewenang, serta target utama TWG dalam mengkoordinasikan kolaborasi lintas A-B-C-G-M <p>4.1.2. Melakukan perencanaan kemitraan strategis stakeholder A-B-C-G-M yang berpotensi terlibat dengan SATUSEHAT SDM untuk penguatan/perluasan ekosistem SATUSEHAT SDM. PIC: TWG SATUSEHAT SDM INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya pedoman kemitraan strategis untuk perluasan ekosistem SATUSEHAT SDM yang berisi <i>framework</i> (kerangka kerja) dalam penentuan stakeholder, serta stakeholder map. Dokumen ini dapat berisi mitra-mitra strategis, baik di internal Kemenkes, serta eksternal Kemenkes yang berpotensi terlibat dalam ekosistem SATUSEHAT SDM dan potensi kolaborasinya • Tersusunnya rencana aksi kolaboratif yang jelas setelah penandatanganan MoU

Luaran	Rincian Kegiatan
<p>4.1. Terjalannya kemitraan strategis antar stakeholder A-B-C-G-M (<i>academician, business, community, government, media</i>) untuk mengakomodasi kebutuhan pada setiap tahapan journey nakes/named dari fase pendidikan hingga masuk ke pasar tenaga kerja SDM</p>	<p>4.1.3. Menghubungkan platform data SATUSEHAT SDM dengan platform data lainnya terkait journey nakes/named, seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, LPDP, BKN, BKD, INA-CRR, Kemensainsdikti dan K/L/D/I lainnya.</p> <p>PIC: TWG SATUSEHAT SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya regulasi resmi yang mengatur kerangka kerja kemitraan lintas platform data • Tersedianya dokumentasi teknis yang mengonfirmasi kesesuaian standar integrasi dan interoperabilitas antar platform yang terlibat • Terwujudnya kesepakatan MoU terkait <i>Data Transfer Agreement</i> untuk mendukung pertukaran dan integrasi data dengan A-B-C-G-M terkait
	<p>4.1.4. Mengoptimalkan peran swasta untuk memfasilitasi kegiatan pelatihan bagi nakes/named.</p> <p>PIC: TWG SATUSEHAT SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya kanal komunikasi resmi yang menghubungkan Direktorat Peningkatan Mutu dengan pihak swasta untuk koordinasi program pelatihan bagi nakes/named
	<p>4.1.5. Mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk mengukur dampak dan keberlanjutan kemitraan strategis lintas A-B-C-G-M.</p> <p>PIC: TWG SATUSEHAT SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen resmi yang memuat kerangka monitoring dan evaluasi untuk kemitraan strategis lintas A-B-C-G-M • Tersedianya mekanisme untuk merespons hasil evaluasi dengan langkah-langkah perbaikan atau penguatan terhadap kemitraan
<p>4.2. Terlibatnya A-B-C-G-M untuk mendukung komunikasi, informasi, dan edukasi terkait SATUSEHAT SDM ke basis pengguna masing-masing</p>	<p>4.2.1. Mengoordinasikan dan menyebarkan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait SDM melalui saluran komunikasi multi-channel.</p> <p>PIC: TWG SATUSEHAT SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen resmi mekanisme kolaborasi KIE seperti kolaborasi dengan swasta untuk melaksanakan kegiatan pelatihan bagi nakes/named
	<p>4.2.2. Melakukan advokasi pemanfaatan SATUSEHAT SDM kepada A-B-C-G-M melalui platform masing-masing.</p> <p>PIC: TWG SATUSEHAT SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya sosialisasi peluang kolaborasi pemanfaatan dan keamanan data SATUSEHAT SDM untuk keperluan riset dan pengembangan kebijakan kepada lintas A-B-C-G-M • Terselenggaranya pertemuan dan diskusi pengembangan SATUSEHAT SDM dengan keterlibatan aktif dari A-B-C-G-M

Luaran	Rincian Kegiatan
<p>4.2. Terlibatnya A-B-C-G-M untuk mendukung komunikasi, informasi, dan edukasi terkait SATUSEHAT SDM ke basis pengguna masing-masing</p>	<p>4.2.3. Mengoptimalkan peran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sebagai perpanjangan tangan helpdesk untuk memberikan dukungan teknis dan operasional kepada tenaga kesehatan di daerah.</p> <p>PIC: TWG SATUSEHAT SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat kanal komunikasi resmi antara pemerintah daerah dan pusat dalam pengelolaan aduan terkait SATUSEHAT SDM • Tersebar nya dokumen petunjuk teknis helpdesk SATUSEHAT SDM untuk digunakan oleh OPD • Persentase masalah yang berhasil diselesaikan oleh OPD terkait SATUSEHAT SDM
<p>4.3. Pemanfaatan dan/atau pertukaran data SATUSEHAT SDM untuk dibagipakaikan kepada lintas A-B-C-G-M</p>	<p>4.3.1. Menyusun mekanisme pemanfaatan dan/atau pertukaran data untuk dibagipakaikan kepada lintas A-B-C-G-M termasuk untuk keperluan riset/publikasi.</p> <p>PIC: TWG SATUSEHAT SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen resmi mekanisme pemanfaatan dan/atau pertukaran data lintas A-B-C-G-M yang aman dan terstandarisasi • Tersusun nya kebijakan berbagi data lintas A-B-C-G-M yang diterima semua pihak • Tersusun nya ketentuan segmentasi dan pembatasan akses data tertentu bagi A-B-C-G-M
	<p>4.3.2. Menerima hasil riset/analisis kebijakan dari penggunaan/pemanfaatan data SATUSEHAT SDM untuk peningkatan kebijakan SDM.</p> <p>PIC: TWG SATUSEHAT SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat dokumentasi dari hasil riset/analisis kebijakan dari penggunaan/pemanfaatan data SATUSEHAT SDM oleh akademisi, publik, maupun swasta • Hasil riset/analisis kebijakan diinformasikan dalam pertemuan koordinasi formal tim internal SATUSEHAT SDM untuk dijadikan insight bagi peningkatan SATUSEHAT SDM, dan SDM Indonesia
	<p>4.3.3. Menyusun mekanisme pemanfaatan data SATUSEHAT SDM yang bisa diakses publik.</p> <p>PIC: TWG SATUSEHAT SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen resmi mekanisme pemanfaatan data SATUSEHAT SDM bagi publik • Tersusun nya ketentuan segmentasi dan pembatasan akses data tertentu bagi publik

3.4.1. Rincian Kegiatan Tema 4

Luaran 4.1.

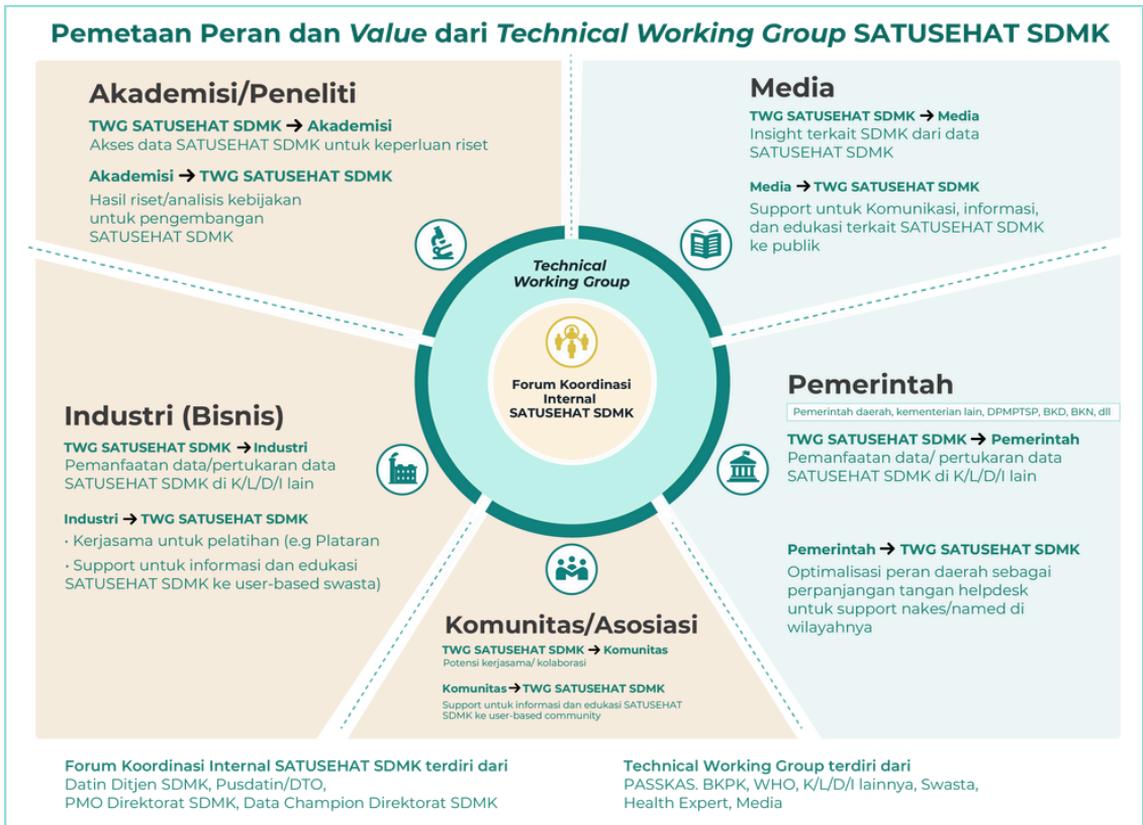
Terjalinnnya kemitraan strategis antar stakeholder A-B-C-G-M (*academician, business, community, government, media*) untuk mengakomodasi kebutuhan pada setiap tahapan journey nakes/named dari fase pendidikan hingga masuk ke pasar tenaga kerja SDMk.

Kegiatan 4.1.1:

Formalisasi forum koordinasi lintas A-B-C-G-M melalui pembentukan Technical Working Group. *Technical Working Group* (TWG) akan dibentuk sebagai forum koordinasi lintas akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media (A-B-C-G-M) untuk memperkuat kolaborasi dalam pengembangan SATUSEHAT SDMk.

Forum ini akan bertugas menyusun kerangka kerja kolaborasi, menetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing stakeholder, serta mengidentifikasi peluang kerja sama strategis. TWG juga akan menjadi wadah diskusi rutin guna memastikan setiap sektor dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam mendukung perjalanan tenaga kesehatan dari pendidikan hingga pasar kerja. Namun, perlu diputuskan status dari TWG SATUSEHAT SDMk ini apakah merupakan TWG tersendiri yang khusus menangani isu di SDMk, atau merupakan TWG SATUSEHAT yang ditambahkan peran untuk lebih terlibat dalam penanganan SDMk.

Gambar 3.3 menunjukkan pemetaan peran dan value dari *Technical Working Group* SATUSEHAT SDMk dengan A-B-C-G-M yang telah diturunkan pada setiap kegiatan di tema 4: Ekosistem.



Gambar 3.3 Pemetaan Peran dan Value dari Technical Working Group SATUSEHAT SDMk

▶ **Kegiatan 4.1.2:**
Melakukan perencanaan kemitraan strategis stakeholder A-B-C-G-M yang berpotensi terlibat dengan SATUSEHAT SDM untuk penguatan/pelebaran ekosistem SATUSEHAT SDM. Perencanaan kemitraan strategis akan dilakukan dengan memetakan stakeholder potensial yang dapat berkontribusi dalam pengembangan dan implementasi SATUSEHAT SDM. Proses ini mencakup identifikasi kebutuhan tenaga kesehatan di berbagai sektor, analisis potensi kolaborasi dengan pihak akademik dan industri, serta penyusunan strategi keterlibatan komunitas dan media (dapat dilihat di Gambar 2.13 terkait journey nakes/named).

▶ **Kegiatan 4.1.3:**
Menghubungkan platform data SATUSEHAT SDM dengan platform data lainnya terkait journey nakes/named, seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, LPDP, BKN, BKD, INA-CRR, Kemensainsdikti dan K/L/D/I lainnya. Integrasi platform data SATUSEHAT SDM dengan sistem eksternal bertujuan untuk meningkatkan interoperabilitas dan pertukaran informasi lintas lembaga terkait perjalanan tenaga kesehatan. Koneksi dengan sistem seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, LPDP untuk beasiswa pendidikan, serta BKN dan BKD untuk status kepegawaian akan memastikan bahwa data tenaga kesehatan selalu mutakhir dan dapat digunakan untuk perencanaan SDM yang lebih akurat. Selain itu, integrasi dengan INA-CRR dan Kemensainsdikti akan membantu melihat riset dan publikasi yang dilakukan oleh nakes/named sebagai dasar dalam pemantauan pengembangan kompetensi dan karir tenaga kesehatan.

▶ **Kegiatan 4.1.4:**
Mengoptimalkan peran swasta untuk memfasilitasi kegiatan pelatihan bagi nakes/named. Pihak swasta memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui penyelenggaraan pelatihan, workshop, dan sertifikasi berbasis kebutuhan industri. Kemitraan ini akan difokuskan pada pengembangan keterampilan teknis dan digitalisasi layanan kesehatan, sehingga tenaga kesehatan dapat lebih siap menghadapi tantangan sistem kesehatan modern.

▶ **Kegiatan 4.1.5:**
Mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk mengukur dampak dan keberlanjutan kemitraan strategis lintas A-B-C-G-M. Agar kemitraan strategis yang terjalin dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata, diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi (Monev) yang terstruktur. Sistem Monev ini akan mencakup pengukuran efektivitas program kerja sama, analisis dampak kemitraan terhadap peningkatan SDM kesehatan, serta identifikasi area yang perlu diperbaiki. Selain itu, evaluasi rutin akan memastikan bahwa kemitraan tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan tenaga kesehatan, serta dapat terus diperkuat untuk meningkatkan ekosistem SATUSEHAT SDM secara berkelanjutan.

Luaran 4.2.

Terlibatnya A-B-C-G-M untuk mendukung komunikasi, informasi, dan edukasi terkait SATUSEHAT SDM ke basis pengguna masing-masing.



Kegiatan 4.2.1:

Mengoordinasikan dan menyebarkan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait SDMk melalui saluran komunikasi multi-channel. Untuk meningkatkan pemahaman dan adopsi SATUSEHAT SDMk, akan dilakukan koordinasi penyebaran informasi melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial, website resmi, webinar, serta kampanye digital dan *offline*. Pendekatan multi-channel ini bertujuan agar informasi tentang kebijakan, fitur, dan manfaat SATUSEHAT SDMk dapat menjangkau tenaga kesehatan, akademisi, komunitas, serta masyarakat luas secara efektif. Selain itu, penyebaran informasi akan disesuaikan dengan target audiens masing-masing sektor (A-B-C-G-M), memastikan pesan yang disampaikan lebih relevan dan mudah dipahami.



Kegiatan 4.2.2:

Melakukan advokasi pemanfaatan SATUSEHAT SDMk kepada A-B-C-G-M melalui platform masing-masing. Advokasi SATUSEHAT SDMk akan dilakukan dengan melibatkan setiap sektor dalam menyebarkan manfaat dan urgensi penggunaan platform ini melalui kanal mereka masing-masing. Akademisi dapat menggunakannya dalam riset dan pengajaran, sektor bisnis dapat mengintegrasikannya dalam layanan kesehatan digital, komunitas dapat mengedukasi tenaga kesehatan lokal, pemerintah akan memanfaatkan data untuk kebijakan, dan media akan memperluas jangkauan informasi ke masyarakat. Dengan pendekatan ini, SATUSEHAT SDMk dapat lebih cepat diadopsi, mendapatkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, serta meningkatkan kesadaran tenaga kesehatan akan pentingnya pengelolaan data berbasis digital.



Kegiatan 4.2.3:

Mengoptimalkan peran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sebagai perpanjangan tangan helpdesk untuk memberikan dukungan teknis dan operasional kepada tenaga kesehatan di daerah. OPD dapat dioptimalkan sebagai helpdesk regional untuk memberikan dukungan teknis, pelatihan, serta solusi atas kendala operasional yang dihadapi tenaga kesehatan dalam menggunakan SATUSEHAT SDMk. Dengan adanya perpanjangan tangan di daerah, tenaga kesehatan dapat memperoleh bantuan lebih cepat dan kontekstual. Selain itu, OPD juga akan berperan dalam memastikan kepatuhan tenaga kesehatan dalam memperbarui data mereka, menyosialisasikan kebijakan terbaru, serta membantu memfasilitasi integrasi SATUSEHAT SDMk dengan sistem lokal yang ada di daerah.

Luaran 4.3.

Pemanfaatan dan/atau pertukaran data SATUSEHAT SDMk untuk dibagipakaikan kepada lintas A-B-C-G-M.



Kegiatan 4.3.1:

Menyusun mekanisme pemanfaatan dan/atau pertukaran data untuk dibagipakaikan kepada lintas A-B-C-G-M termasuk untuk keperluan riset/publikasi. Agar data SATUSEHAT SDMk dapat dimanfaatkan secara optimal oleh akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media (A-B-C-G-M), diperlukan mekanisme yang jelas terkait pertukaran dan pemanfaatan data. Mekanisme ini mencakup protokol keamanan data, persyaratan akses, serta skema perizinan bagi pengguna eksternal yang ingin menggunakan data untuk riset, publikasi, atau pengembangan layanan. Dengan adanya regulasi yang ketat namun tetap fleksibel, data dapat digunakan secara produktif tanpa melanggar aspek privasi dan kepatuhan terhadap kebijakan perlindungan data.

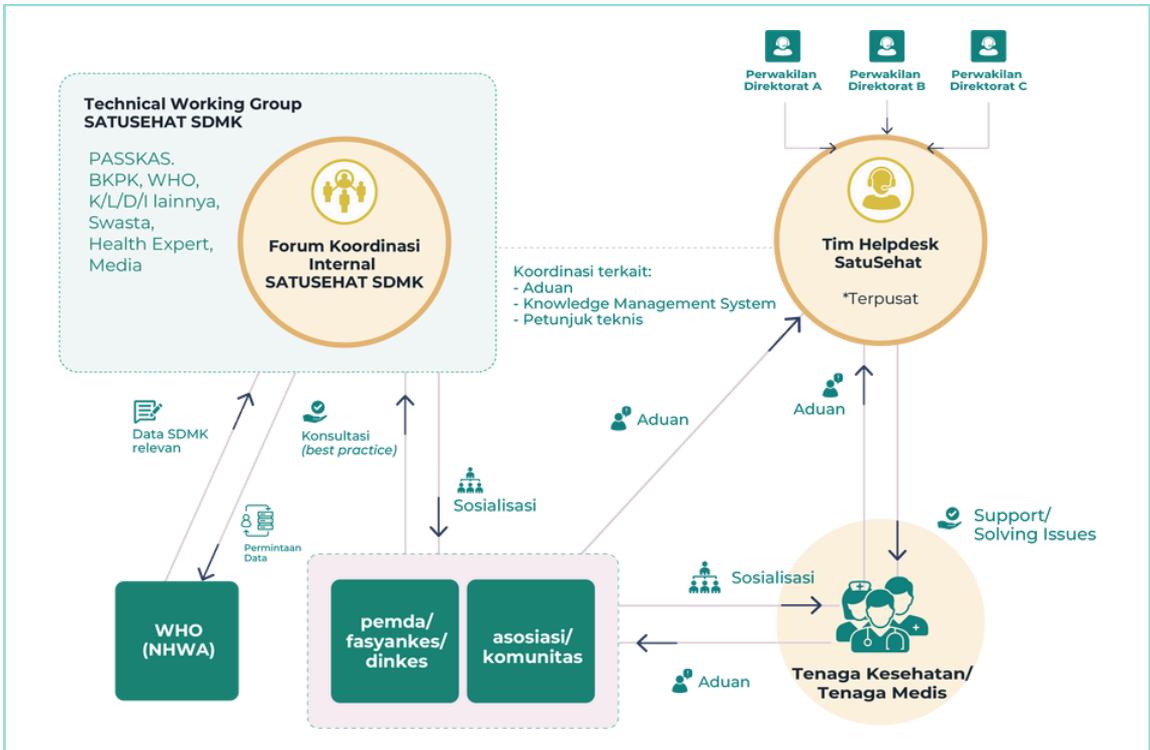
Kegiatan 4.3.2:

Menerima hasil riset/analisis kebijakan dari penggunaan/pemanfaatan data SATUSEHAT SDM untuk peningkatan kebijakan SDM. Sebagai bagian dari siklus pemanfaatan data, SATUSEHAT SDM akan menerima dan mengelola hasil riset serta analisis kebijakan yang dibuat oleh akademisi atau lembaga penelitian yang menggunakan data platform ini. Hasil penelitian ini akan digunakan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan SDM, baik dalam perencanaan tenaga kesehatan, distribusi SDM, hingga penguatan ekosistem layanan kesehatan digital. Mekanisme umpan balik ini akan memastikan bahwa data SATUSEHAT SDM tidak hanya dikonsumsi oleh pengguna eksternal tetapi juga berkontribusi dalam peningkatan kebijakan dan operasional sistem kesehatan di Indonesia.

Kegiatan 4.3.3:

Menyusun mekanisme pemanfaatan data SATUSEHAT SDM yang bisa diakses publik. Untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi, SATUSEHAT SDM akan menyusun mekanisme pemanfaatan data yang dapat diakses publik, dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan data pribadi dan regulasi yang berlaku. Mekanisme ini akan menentukan jenis data yang dapat dibagikan secara terbuka, misalnya seperti statistik tenaga kesehatan, tren distribusi SDM, serta indikator kinerja sektor kesehatan.

Keterhubungan antara *Technical Working Group* dengan pihak lainnya digambarkan dalam skema di bawah (Gambar 3.4) dengan penjelasan terkait peran *Data Champion*, *Technical Working Group*, dan Forum Koordinasi Internal SATUSEHAT SDM dielaborasi di **Lampiran 9**.



Gambar 3.4 Alur hubungan TWG (Technical Working Group), Forum Koordinasi Internal SATUSEHAT SDM dengan stakeholder lainnya

4. Operasionalisasi Peta Jalan SATUSEHAT SDM

Bab ini membahas strategi implementasi Peta Jalan SATUSEHAT SDM 2025-2029, dengan menekankan langkah-langkah operasional untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas implementasi peta jalan. Operasionalisasi ini mencakup rekomendasi kegiatan prioritas tahunan yang dirancang secara bertahap dari tahun 2025 hingga 2029, berdasarkan urgensi serta keterkaitan antar kegiatan untuk memastikan efisiensi dan keberlanjutan program.

Selain itu, dilakukan **monitoring dan evaluasi (monev) terhadap setiap luaran dalam empat tema**: teknologi informasi, tata kelola data dan organisasi, kapasitas SDM, dan ekosistem SATUSEHAT SDM, untuk memastikan bahwa setiap inisiatif berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

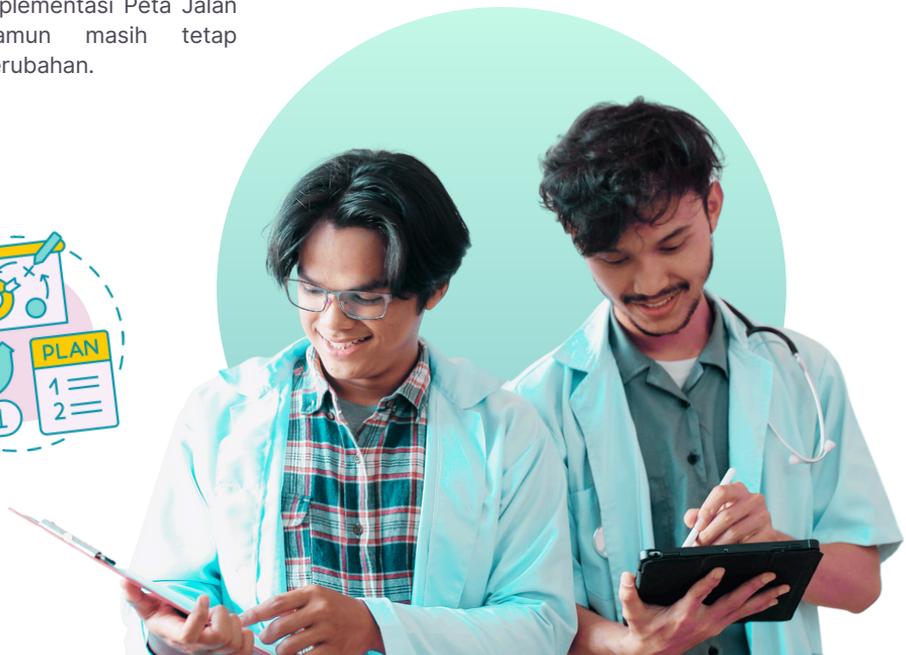
Analisis risiko juga dilakukan untuk mengidentifikasi potensi hambatan pada setiap tema, diikuti dengan strategi mitigasi yang bertujuan untuk mengurangi dampak dari risiko yang teridentifikasi. Rekomendasi operasionalisasi ini disusun agar lebih *agile* sehingga dapat menjadi panduan dalam implementasi Peta Jalan SATUSEHAT SDM, namun masih tetap memberikan ruang untuk perubahan.

4.1. Rekomendasi Kegiatan Tahunan

Dalam Peta Jalan SATUSEHAT SDM 2025-2029, rekomendasi kegiatan tahunan diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu P0 dan P1, yang mencerminkan prioritas pelaksanaan berdasarkan tingkat urgensi dan kesiapan implementasi. Namun, kegiatan tahunan ini bersifat rekomendasi sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi terkini dari Ditjen SDM dan *stakeholder* terkait.

P0 Kegiatan yang harus segera dilaksanakan karena sifatnya yang mendesak dan fundamental bagi keberhasilan inisiatif selanjutnya.

P1 Kegiatan lanjutan yang dapat dilaksanakan setelah elemen-elemen dasar yang tercakup dalam P0 terlaksana.



Tabel 4.1 Rekomendasi Kegiatan Tahunan dalam Implementasi Peta Jalan SATUSEHAT SDM 2025-2029

PO Arsitektur Teknologi Informasi

2025

Penyusunan Dasar

- 1.1.1 Merancang dan **menetapkan mekanisme pertukaran data yang terstandar** untuk mendukung interoperabilitas dalam aplikasi SATUSEHAT SDM
- 1.1.2 Menerapkan **layanan service bus sebagai perantara** untuk integrasi data dan sistem dalam aplikasi SATUSEHAT SDM
- 1.2.1 Menerapkan **mekanisme teknis implementasi perlindungan data pribadi (PDP)**
- 1.3.3 Menerapkan **sistem automated alerting dan incident tracking system** untuk memonitor keamanan dan kesehatan sistem secara *real-time* sehingga dapat mendeteksi ancaman serta insiden dengan cepat Menerapkan **layanan service bus sebagai perantara** untuk integrasi data dan sistem dalam aplikasi SATUSEHAT SDM

2026

Penguatan

- 1.1.2 Menerapkan **layanan service bus sebagai perantara** untuk integrasi data dan sistem dalam aplikasi SATUSEHAT SDM
- 1.1.3 Mengembangkan dan **menerapkan standar API (Application Programming Interface)** untuk mendukung integrasi data dan sistem dalam aplikasi SATUSEHAT SDM
- 1.3.1 Menyusun dan mengimplementasikan **rencana cadangan untuk infrastruktur teknologi** guna mengantisipasi *downtime server*

2027

Kolaborasi Strategis

- 1.3.2 **Penyesuaian kapabilitas server** untuk mengelola penggunaan SATUSEHAT SDM dalam berbagai macam situasi dan kondisi
- 1.2.1 Menerapkan **mekanisme teknis implementasi perlindungan data pribadi (PDP)**

2028

Operasionalisasi

- 1.1.2 Menerapkan **layanan service bus sebagai perantara** untuk integrasi data dan sistem dalam aplikasi SATUSEHAT SDM
- 1.2.1 Menerapkan **mekanisme teknis implementasi** perlindungan data pribadi (PDP)
- 1.2.2 Menerapkan **framework keamanan berlapis dengan standar ISO 27001:2022** pada setiap sistem yang akan saling terhubung untuk memastikan keamanan informasi

2029

Pemantapan dan Evaluasi

- 1.1.2 Menerapkan **layanan service bus sebagai perantara** untuk integrasi data dan sistem dalam aplikasi SATUSEHAT SDM
- 1.2.1 Menerapkan **mekanisme teknis implementasi** perlindungan data pribadi (PDP)
- 1.2.2 Menerapkan **framework keamanan berlapis dengan standar ISO 27001:2022** pada setiap sistem yang akan saling terhubung untuk memastikan keamanan informasi

P1 Arsitektur Teknologi Informasi

2025

Penyusunan Dasar

- 1.2.2 Menerapkan **framework keamanan berlapis dengan standar ISO 27001:2022** pada setiap sistem yang akan saling terhubung untuk memastikan keamanan informasi
- 1.1.3 **Mengembangkan dan menerapkan standar API (Application Programming Interface)** untuk mendukung integrasi data dan sistem dalam aplikasi SATUSEHAT SDM

2026

Penguatan

- 1.2.1 Menerapkan **mekanisme teknis implementasi perlindungan data pribadi (PDP)**
- 1.2.2 Menerapkan **framework keamanan berlapis dengan standar ISO 27001:2022** pada setiap sistem yang akan saling terhubung untuk memastikan keamanan informasi
- 1.3.2 **Penyesuaian kapabilitas server** untuk mengelola penggunaan SATUSEHAT SDM dalam berbagai macam situasi dan kondisi

2027

Kolaborasi Strategis

- 1.2.2 Menerapkan **framework keamanan berlapis dengan standar ISO 27001:2022** pada setiap sistem yang akan saling terhubung untuk memastikan keamanan informasi
- 1.1.2 Menerapkan **layanan service bus sebagai perantara** untuk integrasi data dan sistem dalam aplikasi SATUSEHAT SDM

PO

Tata Kelola Data Dan Organisasi

2025

Penyusunan Dasar

- 2.1.1 Melaksanakan **koordinasi formal lintas direktorat** yang dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan tata kelola data dan organisasi dalam pengembangan SATUSEHAT SDM
- 2.1.2 Melakukan **pemetaan kebutuhan data dan informasi** dari setiap program yang direncanakan
- 2.3.1 Menyusun **mekanisme koordinasi dan evaluasi program** lintas direktorat
- 2.1.5 Melakukan **implementasi kebijakan privasi** data pada SATUSEHAT SDM
- 2.4.4 Menyusun **langkah aksi dari evaluasi rutin** terhadap aduan yang diterima terkait SATUSEHAT SDM

2026

Penguatan

- 2.1.3 Mengoptimalkan **standar data** terkait tenaga kesehatan untuk mendukung pertukaran dan integrasi data secara *interoperable*.
- 2.1.4 Mengoptimalkan **kamus data** terkait tenaga kesehatan untuk mendukung pertukaran dan integrasi data secara *interoperable*.
- 2.1.7 Mengembangkan **mekanisme pengkinian data dan validasi data berjenjang** untuk meningkatkan kualitas data SATUSEHAT SDM.
- 2.2.1 Menyediakan **dashboard** yang komprehensif, interaktif, dan sesuai kebutuhan direktorat (pengguna).
- 2.1.8 Mengembangkan **mekanisme monitoring dan evaluasi terpadu** yang mampu memantau secara real-time tata kelola data, kualitas data, dan pemanfaatannya, serta memastikan integrasi data ke dalam platform SATUSEHAT SDM untuk mendukung penerbitan laporan evaluasi berkala.
- 2.4.1 Melakukan **pemetaan kebutuhan data** dari NHTA dengan ketersediaan data dari SATUSEHAT SDM.

2027

Kolaborasi Strategis

- 2.1.6 Melakukan **tinjauan kebijakan** terkait pengembangan SATUSEHAT SDM.
- 2.2.1 Menyediakan **dashboard** yang komprehensif, interaktif, dan sesuai kebutuhan direktorat (pengguna).
- 2.2.2 Menyusun **panduan teknis** pemanfaatan SATUSEHAT SDM untuk fasyankes dan nakes/named.

2028

Operasionalisasi

- 2.2.3 Pengelolaan **permintaan akses data dan prioritas permintaan** data SATUSEHAT SDM.
- 2.3.3 **Sosialisasi dokumen resmi** SOP pengelolaan aduan SATUSEHAT SDM kepada fasyankes dan nakes/named.

2029

Pemantapan dan Evaluasi

- 2.3.1 Melakukan **tinjauan kebijakan** mengenai pemanfaatan SATUSEHAT SDM dan sistem informasi lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- 2.3.2 Melakukan **advokasi kebijakan** untuk memastikan SATUSEHAT SDM relevan dengan kebijakan-kebijakan terbaru.
- 2.4.4 Menyusun **langkah aksi dari evaluasi rutin** terhadap aduan yang diterima terkait SATUSEHAT SDM.

P1

Tata Kelola Data Dan Organisasi

2025

Penyusunan Dasar

- 2.3.2 Membangun **saluran komunikasi internal** yang dapat menyelaraskan aduan dengan tim *helpdesk* terpusat terkait pengelolaan aduan SATUSEHAT SDM
- 2.5.2 Mengadakan **forum koordinasi** dengan pemangku kepentingan untuk membangun komitmen bersama dan menyusun struktur tata kelola utama NHTA yang terintegrasi dengan kebijakan nasional.

2026

Penguatan

- 2.1.8 Mengembangkan **mekanisme monitoring dan evaluasi terpadu** yang mampu memantau secara *real-time* tata kelola data, kualitas data, dan pemanfaatannya, serta memastikan integrasi data ke dalam platform SATUSEHAT SDM untuk mendukung penerbitan laporan evaluasi berkala.

PO

Kapasitas SDM

2025

Penyusunan Dasar

- 3.1.1 Melakukan **penunjukan dan operasionalisasi Data Champion** pada setiap unit di Ditjen SDMK untuk memperkuat pengelolaan dan pemanfaatan data secara strategis.
- 3.1.2 Meningkatkan **kualitas dan kompetensi Data Champion** melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan keterampilan terkait pengelolaan dan pemanfaatan data.
- 3.2.1 Mengembangkan dan melaksanakan **program Digital Leadership** untuk memastikan para pengambil kebijakan memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan dalam menghadapi tantangan digital.

2026

Penguatan

- 3.1.1 Melakukan **penunjukan dan operasionalisasi Data Champion** pada setiap unit di Ditjen SDMK untuk memperkuat pengelolaan dan pemanfaatan data secara strategis
- 3.3.1 Menyusun dan mengimplementasikan **sistem knowledge management yang berkelanjutan** dengan memanfaatkan berbagai media untuk mendukung pengelolaan dan berbagi pengetahuan di Ditjen SDMK

2027

Kolaborasi Strategis

- 3.1.1 Melakukan **penunjukan dan operasionalisasi Data Champion** pada setiap unit di Ditjen SDMK untuk memperkuat pengelolaan dan pemanfaatan data secara strategis.
- 3.2.3 Mendorong **pelaksanaan pelatihan dan pembiasaan penggunaan data** bagi pegawai Ditjen SDMK untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan serta pemanfaatan data.
- 3.3.3 Menyusun dan menerapkan **mekanisme umpan balik pada setiap produk pemanfaatan data** untuk memastikan kualitas, relevansi, dan kebermanfaatannya.

2028

Operasionalisasi

- 3.1.1 Melakukan **penunjukan dan operasionalisasi Data Champion** pada setiap unit di Ditjen SDMK untuk memperkuat pengelolaan dan pemanfaatan data secara strategis.
- 3.1.3 Menyusun dan menerapkan **mekanisme umpan balik pada setiap produk pemanfaatan data** untuk memastikan kualitas, relevansi, dan kebermanfaatannya

2029

Pemantapan dan Evaluasi

- 3.1.1 Melakukan **penunjukan dan operasionalisasi Data Champion** pada setiap unit di Ditjen SDMK untuk memperkuat pengelolaan dan pemanfaatan data secara strategis.
- 3.3.2 Memastikan **capaian implementasi SATUSEHAT SDMK menjadi salah satu agenda dalam pembahasan isu strategis** lintas sektor secara berkala.

P1

Kapasitas SDM

2025

Penyusunan Dasar

- 3.1.1 Menyusun dan mengimplementasikan **sistem knowledge management yang berkelanjutan** dengan memanfaatkan berbagai media untuk mendukung pengelolaan dan berbagi pengetahuan di Ditjen SDMK
- 3.3.3 Menyusun dan menerapkan **mekanisme umpan balik pada setiap produk pemanfaatan data** untuk memastikan kualitas, relevansi, dan kebermanfaatannya.

2026

Penguatan

- 3.2.2 Mendefinisikan **kebutuhan data** untuk mendukung pencapaian *output*, *outcome*, dan dampak melalui identifikasi dan dokumentasi kebutuhan data secara terstruktur.
- 3.2.3 Mendorong **pelaksanaan pelatihan dan pembiasaan penggunaan data** bagi pegawai Ditjen SDMK untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan serta pemanfaatan data.
- 3.3.2 Memastikan **capaian implementasi SATUSEHAT SDMK menjadi salah satu agenda dalam pembahasan isu strategis** lintas sektor secara berkala.

P0 Ekosistem

2025

Penyusunan Dasar

- 4.1.1 **Formalisasi forum koordinasi lintas A-B-C-G-M** melalui pembentukan Technical Working Group.
- 4.1.2 Melakukan **perencanaan kemitraan strategis stakeholder A-B-C-G-M** yang berpotensi terlibat dengan SATUSEHAT SDM untuk penguatan/perluasan ekosistem SATUSEHAT SDM.

2026

Penguatan

- 4.2.1 Mengoordinasikan dan **menyebarkan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait SDM** melalui saluran komunikasi *multi-channel*.
- 4.2.2 Melakukan **advokasi pemanfaatan SATUSEHAT SDM kepada A-B-C-G-M** melalui platform masing-masing.
- 4.2.3 Mengoptimalkan peran **OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sebagai perpanjangan tangan helpdesk** untuk memberikan dukungan teknis dan operasional kepada tenaga kesehatan di daerah

2027

Kolaborasi Strategis

- 4.1.3 **Menghubungkan platform data SATUSEHAT SDM** dengan platform data lainnya terkait journey nakes/named, seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, LPDP, BKN, BKD, INA-CRR, Kemensainsdikti dan K/L/D/I lainnya.
- 4.3.1 Menyusun **mekanisme pemanfaatan dan/atau pertukaran data untuk dibagipakaikan** kepada lintas A-B-C-G-M termasuk untuk keperluan riset/publikasi.

2028

Operasionalisasi

- 4.1.4 Mengoptimalkan **peran swasta untuk memfasilitasi kegiatan pelatihan** bagi nakes/named.
- 4.1.5 Mengembangkan **mekanisme monitoring dan evaluasi** untuk mengukur dampak dan keberlanjutan kemitraan strategis lintas A-B-C-G-M.

2029

Pemantapan dan Evaluasi

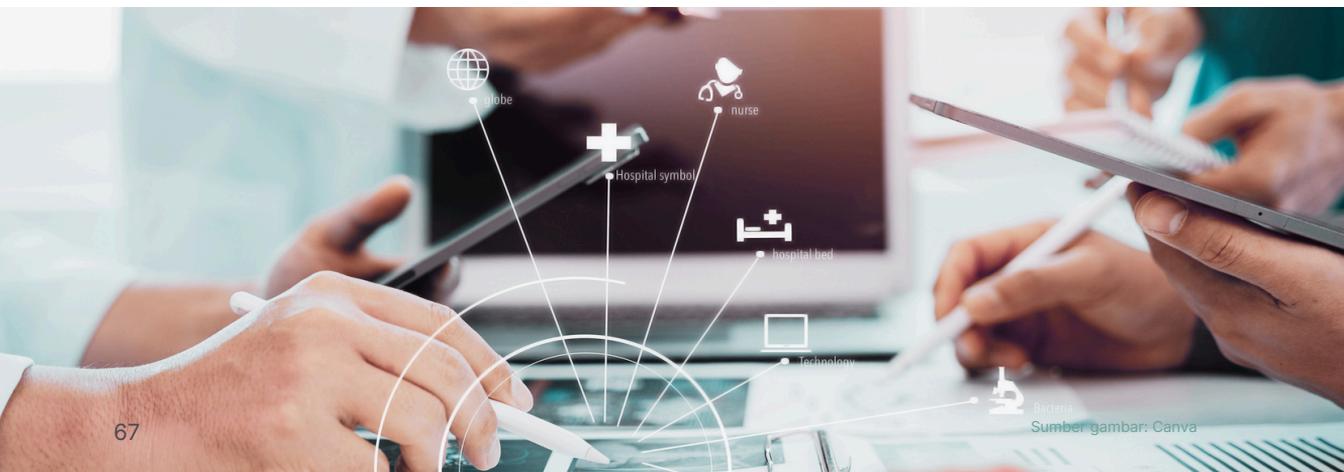
- 4.4.2 Menyusun **SOP dalam penggunaan atau pemanfaatan data SATUSEHAT SDM** untuk keperluan riset dan publikasi bagi lintas A-B-C-G-M.
- 4.4.3 Menerima **hasil riset/analisis kebijakan dari penggunaan/pemanfaatan data SATUSEHAT SDM** untuk peningkatan kebijakan SDM.

P1 Kapasitas SDM

2025

Penyusunan Dasar

- 4.2.3 Mengoptimalkan **peran OPD sebagai perpanjangan tangan helpdesk** untuk memberikan dukungan teknis dan operasional kepada tenaga kesehatan di daerah.



4.2 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Sub-bab ini menjelaskan proses monitoring dan evaluasi yang diterapkan untuk memastikan keberhasilan implementasi Peta Jalan SATUSEHAT SDM.

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berkesinambungan untuk menilai progres implementasi, mengidentifikasi tantangan, serta melakukan perbaikan yang diperlukan. Mekanisme monitoring dan evaluasi ini diterapkan pada setiap kegiatan serta luaran dari setiap tema yang ada.

4.2.1 Tema 1: Arsitektur Teknologi Informasi

Tabel 4.2 Monitoring dan Evaluasi Tema 1: Arsitektur Teknologi Informasi

Luaran	Rincian Kegiatan	Aspek yang Diukur
1.1. Terwujudnya mekanisme integrasi dan interoperabilitas yang efektif untuk mendukung pengelolaan data SDM kesehatan secara terintegrasi melalui aplikasi SATUSEHAT SDM.	1.1.1 Merancang dan menetapkan mekanisme pertukaran data yang terstandar untuk mendukung <i>interoperabilitas</i> dalam aplikasi SATUSEHAT SDM.	Kecepatan Transaksi Data <ul style="list-style-type: none"> Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu transaksi data. Cara Pengukuran: Mengukur durasi respons setiap transaksi data. Satuan: Detik Frekuensi Penghitungan: Per Transaksi
	INDIKATOR KEBERHASILAN <ul style="list-style-type: none"> Menjaga transaksi data paling lambat 2 detik untuk setiap transaksi Tersedianya dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam proses pertukaran data 	Ketersediaan Dokumen NSPK <ul style="list-style-type: none"> Persentase dokumen NSPK yang tersedia dan dapat diakses. Cara Pengukuran: Pemeriksaan dokumen yang tersedia dalam sistem. Satuan: Persentase Frekuensi Penghitungan: Tahunan
	1.1.2 Menerapkan layanan service bus sebagai perantara untuk integrasi data dan sistem dalam aplikasi SATUSEHAT SDM	Integrasi Platform <ul style="list-style-type: none"> Persentase platform yang terintegrasi dengan SATUSEHAT SDM Cara Pengukuran: Audit platform untuk verifikasi integrasi Satuan: Persentase Frekuensi Penghitungan: Tahunan
	INDIKATOR KEBERHASILAN <ul style="list-style-type: none"> 100% platform yang memerlukan data SDM terintegrasi dengan SATUSEHAT SDM Menjaga transaksi data paling lambat 2 detik untuk setiap transaksi Menjaga kepatuhan terhadap SLA sebesar 99.9% setiap tahunnya 	Kecepatan Transaksi Data <ul style="list-style-type: none"> Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu transaksi data Cara Pengukuran: Mengukur durasi respons setiap transaksi data Satuan: Detik Frekuensi Penghitungan: Per Transaksi
		Kepatuhan SLA <ul style="list-style-type: none"> Persentase waktu layanan yang memenuhi atau melampaui SLA yang ditetapkan Cara Pengukuran: Monitoring dan pencatatan kinerja layanan sepanjang tahun Satuan: Persentase Frekuensi Penghitungan: Tahunan

Luaran	Rincian Kegiatan	Aspek yang Diukur
	<p>1.1.3 Mengembangkan dan menerapkan standar API (<i>Application Programming Interface</i>) untuk mendukung integrasi data dan sistem dalam aplikasi SATUSEHAT SDM.</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Menjaga transaksi data paling lambat 2 detik untuk setiap transaksi. Standar interoperabilitas diadopsi oleh minimal 80% platform mitra. 	<p>Kecepatan Transaksi Data</p> <ul style="list-style-type: none"> Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu transaksi data <p>Cara Pengukuran: Mengukur durasi respons setiap transaksi data Satuan: Detik Frekuensi Penghitungan: Per Transaksi</p> <hr/> <p>Adopsi Standar Interoperabilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> Persentase platform mitra yang telah mengadopsi standar interoperabilitas <p>Cara Pengukuran: Audit untuk mengkonfirmasi adopsi standar interoperabilitas Satuan: Persentase Frekuensi Penghitungan: Tahunan</p>
<p>1.2 Terjaminnya keamanan dalam proses integrasi dan interoperabilitas sistem melalui penerapan protokol enkripsi, otentikasi, dan otorisasi yang sesuai standar</p>	<p>1.2.1 Menerapkan mekanisme teknis implementasi perlindungan data pribadi (PDP)</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya fitur untuk persetujuan penggunaan data pribadi Menjaga rata-rata CSAT 85% untuk setiap 3 bulan 	<p>Fitur Persetujuan Penggunaan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya mekanisme persetujuan penggunaan data pribadi pengguna <p>Cara Pengukuran: Verifikasi keberadaan fitur persetujuan penggunaan data Satuan: Ketersediaan Frekuensi Penghitungan: Setiap 6 bulan</p> <hr/> <p>Kepuasan Pelanggan (CSAT)</p> <ul style="list-style-type: none"> Rata-rata nilai CSAT yang diberikan pengguna <p>Cara Pengukuran: Mengumpulkan dan menghitung skor CSAT dari <i>feedback</i> pengguna Satuan: Persentase Frekuensi Penghitungan: Triwulanan</p>
	<p>1.2.2 Menerapkan framework keamanan berlapis dengan standar ISO 27001:2022 pada setiap sistem yang akan saling terhubung untuk memastikan keamanan informasi</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya fitur untuk mengakses log transaksi data Menjaga persentase akses terindikasi ancaman paling tinggi 25% Menjaga rata-rata CSAT 85% untuk setiap 3 bulan 	<p>Akses Log Transaksi</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengakses log transaksi data <p>Cara Pengukuran: Pemeriksaan sistem untuk verifikasi keberadaan fitur akses log transaksi Satuan: Ketersediaan Frekuensi Penghitungan: Tahunan</p> <hr/> <p>Batas Akses Terindikasi Ancaman</p> <ul style="list-style-type: none"> Persentase akses yang terindikasi sebagai ancaman tidak melebihi batas yang ditetapkan <p>Cara Pengukuran: Memantau dan menganalisis log akses untuk mendeteksi indikasi ancaman Satuan: Persentase Frekuensi Penghitungan: Setiap 6 bulan</p>

Luaran	Rincian Kegiatan	Aspek yang Diukur
<p>1.2 Terjaminnya keamanan dalam proses integrasi dan interoperabilitas sistem melalui penerapan protokol enkripsi, otentikasi, dan otorisasi yang sesuai standar</p>	<p>1.2.2 Menerapkan framework keamanan berlapis dengan standar ISO 27001:2022 pada setiap sistem yang akan saling terhubung untuk memastikan keamanan informasi.</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya fitur untuk mengakses log transaksi data Menjaga persentase akses terindikasi ancaman paling tinggi 25% Menjaga rata-rata CSAT 85% untuk setiap 3 bulan 	<p>Kepuasan Pelanggan (CSAT)</p> <ul style="list-style-type: none"> Rata-rata nilai CSAT yang diberikan pengguna <p>Cara Pengukuran: Mengumpulkan dan menghitung skor CSAT dari feedback pengguna</p> <p>Satuan: Persentase</p> <p>Frekuensi Penghitungan: Triwulanan</p>
<p>1.3. Terjaminnya kinerja server yang optimal untuk mendukung kelancaran operasional dan pengelolaan data pada sistem.</p>	<p>1.3.1. Menyusun dan mengimplementasikan rencana cadangan untuk infrastruktur teknologi guna mengantisipasi <i>downtime server</i>.</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Menjaga kepatuhan terhadap SLA sebesar 99.9% setiap tahunnya Menjaga rata-rata CSAT 85% untuk setiap 3 bulan Tersedianya fitur untuk mendeteksi ancaman dan atau gangguan 	<p>Kepatuhan SLA</p> <ul style="list-style-type: none"> Persentase waktu layanan yang memenuhi atau melampaui SLA yang ditetapkan <p>Cara Pengukuran: Monitoring dan pencatatan kinerja layanan sepanjang tahun</p> <p>Satuan: Persentase</p> <p>Frekuensi Penghitungan: Tahunan</p>
		<p>Kepuasan Pelanggan (CSAT)</p> <ul style="list-style-type: none"> Rata-rata nilai CSAT yang diberikan pengguna <p>Cara Pengukuran: Mengumpulkan dan menghitung skor CSAT dari <i>feedback</i> pengguna</p> <p>Satuan: Persentase</p> <p>Frekuensi Penghitungan: Triwulanan</p>
		<p>Deteksi Ancaman dan Gangguan</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya sistem atau fitur untuk mendeteksi ancaman atau gangguan pada sistem <p>Cara Pengukuran: Evaluasi sistem untuk memastikan fungsi deteksi ancaman dan gangguan beroperasi efektif</p> <p>Satuan: Ketersediaan</p> <p>Frekuensi Penghitungan: Tahunan</p>

Luaran	Rincian Kegiatan	Aspek yang Diukur	
<p>1.3. Terjaminnya kinerja server yang optimal untuk mendukung kelancaran operasional dan pengelolaan data pada sistem.</p>	<p>1.3.2 Penyesuaian kapabilitas server untuk mengelola penggunaan SATUSEHAT SDM dalam berbagai macam situasi dan kondisi</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Menjaga kepatuhan terhadap SLA sebesar 99.9% setiap tahunnya Menjaga rata-rata CSAT 85% untuk setiap 3 bulan 	<p>Kepatuhan SLA</p> <ul style="list-style-type: none"> Persentase waktu layanan yang memenuhi atau melampaui SLA yang ditetapkan <p>Cara Pengukuran: Monitoring dan pencatatan kinerja layanan sepanjang tahun</p> <p>Satuan: Persentase</p> <p>Frekuensi Penghitungan: Tahunan</p>	
		<p>Kepuasan Pelanggan (CSAT)</p> <ul style="list-style-type: none"> Rata-rata nilai CSAT yang diberikan pengguna <p>Cara Pengukuran: Mengumpulkan dan menghitung skor CSAT dari <i>feedback</i> pengguna</p> <p>Satuan: Persentase</p> <p>Frekuensi Penghitungan: Triwulanan</p>	
	<p>1.3.3 Menerapkan sistem automated alerting dan incident tracking system untuk memonitor keamanan dan kesehatan sistem secara <i>real-time</i> sehingga dapat mendeteksi ancaman serta insiden dengan cepat.</p>	<p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Menjaga kepatuhan terhadap SLA sebesar 99.9% setiap tahunnya Tersedianya fitur untuk mendeteksi ancaman/gangguan Menjaga rata-rata CSAT 85% untuk setiap 3 bulan Menjaga persentase akses terindikasi ancaman paling tinggi 25% 	<p>Kepatuhan SLA</p> <ul style="list-style-type: none"> Persentase waktu layanan yang memenuhi atau melampaui SLA yang ditetapkan <p>Cara Pengukuran: Monitoring dan pencatatan kinerja layanan sepanjang tahun</p> <p>Satuan: Persentase</p> <p>Frekuensi Penghitungan: Tahunan</p>
		<p>Fitur Deteksi Ancaman/Gangguan</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya fitur khusus dalam sistem untuk mendeteksi ancaman atau gangguan <p>Cara Pengukuran: Verifikasi keberadaan dan fungsi fitur deteksi ancaman/gangguan dalam sistem</p> <p>Satuan: Ketersediaan</p> <p>Frekuensi Penghitungan: Tahunan</p>	
		<p>Kepuasan Pelanggan (CSAT)</p> <ul style="list-style-type: none"> Rata-rata nilai CSAT yang diberikan pengguna <p>Cara Pengukuran: Mengumpulkan dan menghitung skor CSAT dari <i>feedback</i> pengguna</p> <p>Satuan: Persentase</p> <p>Frekuensi Penghitungan: Triwulanan</p>	
		<p>Batas Akses Terindikasi Ancaman</p> <ul style="list-style-type: none"> Persentase akses yang terindikasi sebagai ancaman tidak melebihi batas yang ditetapkan <p>Cara Pengukuran: Memantau dan menganalisis log akses untuk mendeteksi indikasi ancaman</p> <p>Satuan: Persentase</p> <p>Frekuensi Penghitungan: Setiap 6 bulan</p>	

Dalam upaya mendukung pengelolaan data SDM kesehatan secara terintegrasi, aplikasi SATUSEHAT SDMK akan mengembangkan mekanisme integrasi dan interoperabilitas yang efektif, termasuk perancangan dan implementasi mekanisme pertukaran data yang terstandar, serta penerapan layanan *service bus* dan pengembangan standar API (*Application Programming Interface*).

Kegiatan ini bertujuan memastikan transaksi data berlangsung dengan kecepatan maksimal 2 detik per transaksi, dengan semua platform yang memerlukan data SDMK terintegrasi penuh ke dalam SATUSEHAT SDMK, memenuhi SLA tahunan sebesar 99.9%. Selain itu, keamanan dalam proses integrasi dan interoperabilitas akan diperkuat melalui penerapan protokol enkripsi, otentikasi, dan otorisasi yang mematuhi standar ISO 27001:2022.

4.2.2 Tema 2: Tata Kelola Data dan Organisasi

Tabel 4.3 Monitoring dan Evaluasi Tema 2: Tata Kelola Data dan Organisasi

Luaran	Rincian Kegiatan	Aspek yang Diukur
<p>2.1. Terimplementasinya a tata kelola data yang terstandar di seluruh platform SATUSEHAT SDMK untuk mendorong peningkatan kualitas data</p>	<p>2.1.1 Melaksanakan koordinasi formal lintas direktorat yang dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan tata kelola data dan organisasi dalam pengembangan SATUSEHAT SDMK</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi formal dilaksanakan secara berkala (triwulan) dengan adanya keterlibatan data champion dari setiap direktorat. Pertemuan koordinasi formal melingkupi: kualitas data, pemetaan kebutuhan data, proses bisnis, tata kelola, kebijakan terkait SATUSEHAT SDMK, serta monitoring dan evaluasi program. Terdapat dokumentasi berisi hasil diskusi koordinasi formal lintas direktorat, dan diturunkan menjadi rencana aksi 	<p>Frekuensi Koordinasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah pertemuan koordinasi formal yang diadakan <p>Cara Pengukuran: Menghitung jumlah pertemuan yang diadakan</p> <p>Satuan: Jumlah</p> <p>Frekuensi Penghitungan: Triwulanan</p>
	<p>2.1.2 Melakukan pemetaan kebutuhan data dan informasi dari setiap program yang direncanakan</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya peta kebutuhan data dan informasi, serta pertukaran data yang diperlukan oleh setiap Direktorat pada platform SATUSEHAT SDMK, yang disusun berdasarkan hasil forum koordinasi internal SATUSEHAT SDMK. Pemetaan data kebutuhan seperti: data STR pendidikan, peningkatan kompetensi, internship, fellowship, data kompetensi/pelatihan, named nakes DTPK untuk insentif, data pelanggaran disiplin dan perundangan, dan data-data lainnya yang perlu dipetakan berdasarkan kebutuhan tiap direktorat. 	<p>Dokumentasi Pertemuan</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dokumentasi yang mencakup hasil diskusi dan rencana aksi <p>Cara Pengukuran: Verifikasi keberadaan dokumen pertemuan</p> <p>Satuan: Ketersediaan</p> <p>Frekuensi Penghitungan: Setiap pertemuan</p>
		<p>Ketersediaan Peta Kebutuhan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dokumen yang menjelaskan kebutuhan data setiap direktorat <p>Cara Pengukuran: Pemeriksaan keberadaan dan kelengkapan peta kebutuhan data</p> <p>Satuan: Ketersediaan</p> <p>Frekuensi Penghitungan: Tahunan</p>

Luaran	Rincian Kegiatan	Aspek yang Diukur
<p>2.1. Terimplementasinya a tata kelola data yang terstandar di seluruh platform SATUSEHAT SDM untuk mendorong peningkatan kualitas data</p>	<p>2.1.3 Mengoptimalkan standar data terkait tenaga kesehatan untuk mendukung pertukaran dan integrasi data secara interoperable</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya kesepakatan MoU terkait <i>Data Transfer Agreement</i> untuk mendukung pertukaran dan integrasi data dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait • Tersedianya dokumen protokol interoperabilitas yang memuat standar data terbaru, berfungsi sebagai panduan untuk pembaruan dan penilaian berkala 	<p>Protokol Interoperabilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen yang mendefinisikan standar data untuk interoperabilitas <p>Cara Pengukuran: Pemeriksaan keberadaan dan kelengkapan protokol Satuan: Ketersediaan Frekuensi Penghitungan: Tahunan</p>
	<p>2.1.4 Mengoptimalkan kamus data terkait tenaga kesehatan untuk mendukung pertukaran dan integrasi data secara interoperable</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen kamus data terbaru yang berfungsi sebagai panduan untuk pembaruan dan penilaian berkala 	<p>Kebijakan Privasi Data</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya kebijakan privasi yang mengatur perlindungan data <p>Cara Pengukuran: Pemeriksaan dokumen kebijakan privasi Satuan: Ketersediaan Frekuensi Penghitungan: Tahunan</p>
	<p>2.1.5 Melakukan implementasi kebijakan privasi data pada SATUSEHAT SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen kebijakan privasi data dan mekanisme teknis untuk perlindungan data • Terlaksananya audit privasi data secara berkala dengan mengukur penilaian dampak PDP (privacy impact assessment) • Terlaksananya kegiatan sosialisasi kepada K/L/D/I yang sudah terhubung dengan SATUSEHAT SDM untuk meningkatkan kesadaran atas privasi dan keamanan data sesuai PDP dan ISO 27001:2002 	<p>Audit Privasi Data</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan audit untuk menilai kepatuhan terhadap kebijakan privasi <p>Cara Pengukuran: Melakukan audit dan melaporkan hasilnya Satuan: Jumlah audit Frekuensi Penghitungan: Tahunan</p>
	<p>2.1.5 Melakukan implementasi kebijakan privasi data pada SATUSEHAT SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen kebijakan privasi data dan mekanisme teknis untuk perlindungan data • Terlaksananya audit privasi data secara berkala dengan mengukur penilaian dampak PDP (privacy impact assessment) • Terlaksananya kegiatan sosialisasi kepada K/L/D/I yang sudah terhubung dengan SATUSEHAT SDM untuk meningkatkan kesadaran atas privasi dan keamanan data sesuai PDP dan ISO 27001:2002 	<p>Sosialisasi Kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah sesi sosialisasi yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran privasi data <p>Cara Pengukuran: Menghitung jumlah sesi sosialisasi yang dilakukan Satuan: Jumlah sesi Frekuensi Penghitungan: Tahunan</p>
		<p>Dokumen Rekomendasi Kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen yang mengandung rekomendasi kebijakan dan rencana kerja <p>Cara Pengukuran: Verifikasi keberadaan dokumen Satuan: Ketersediaan Frekuensi Penghitungan: Tahunan</p>

Luaran	Rincian Kegiatan	Aspek yang Diukur
<p>2.1. Terimplementasinya a tata kelola data yang terstandar di seluruh platform SATUSEHAT SDM untuk mendorong peningkatan kualitas data</p>	<p>2.1.6 Melakukan tinjauan kebijakan terkait pengembangan SATUSEHAT SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen analisis kebijakan yang bertujuan untuk mengembangkan SATUSEHAT SDM agar relevan dengan kebijakan yang berlaku seperti UU PDP, SIKN, dan lainnya 2. Tersedianya dokumen rekomendasi kebijakan, rencana kerja, serta indikator yang mendukung pengembangan SATUSEHAT SDM 	<p>Mekanisme Validasi Data</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya prosedur validasi data bagi pengguna <p>Cara Pengukuran: Pemeriksaan sistem validasi</p> <p>Satuan: Ketersediaan</p> <p>Frekuensi Penghitungan: Tahunan</p>
		<p>Monitoring dan Evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Frekuensi pemantauan komponen M&E <p>Cara Pengukuran: Menghitung jumlah kegiatan monitoring yang dilaksanakan</p> <p>Satuan: Jumlah kegiatan</p> <p>Frekuensi Penghitungan: Tahunan</p>
	<p>2.1.7 Mengembangkan mekanisme pengkinian data dan validasi data berjenjang untuk meningkatkan kualitas data SATUSEHAT SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya mekanisme pengkinian data bagi nakes/named terkait data SATUSEHAT SDM Tersedianya mekanisme validasi berjenjang bagi fasyankes dan dinkes terkait data SATUSEHAT SDM 	<p>Audit Privasi Data</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan audit untuk menilai kepatuhan terhadap kebijakan privasi <p>Cara Pengukuran: Melakukan audit dan melaporkan hasilnya</p> <p>Satuan: Jumlah audit</p> <p>Frekuensi Penghitungan: Tahunan</p>
		<p>Dashboard Direktorat</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dashboard yang relevan dengan kebutuhan direktorat <p>Cara Pengukuran: Verifikasi dashboard yang tersedia dan pembaruan data</p> <p>Satuan: Ketersediaan</p> <p>Frekuensi Penghitungan: Berkala</p>

Luaran	Rincian Kegiatan	Aspek yang Diukur
<p>2.1. Terimplementasinya a tata kelola data yang terstandar di seluruh platform SATUSEHAT SDM untuk mendorong peningkatan kualitas data</p>	<p>2.1.8 Mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi terpadu yang mampu memantau secara real-time tata kelola data, kualitas data, dan pemanfaatannya, serta memastikan integrasi data ke dalam platform SATUSEHAT SDM untuk mendukung penerbitan laporan evaluasi berkala.</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya mekanisme pemantauan seluruh komponen monitoring dan evaluasi yang mencakup: kualitas data, performa sistem, proses bisnis, tata kelola, kebijakan di lingkungan Kementerian Kesehatan, dan manajemen sistem informasi, pemanfaatan data oleh K/L/D/I, dan kepatuhan terhadap standar NHTWA Terlaksananya penilaian data quality assessment secara berkala 	<p>Dokumen Rekomendasi Kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dokumen yang mengandung rekomendasi kebijakan dan rencana kerja <p>Cara Pengukuran: Verifikasi keberadaan dokumen</p> <p>Satuan: Ketersediaan</p> <p>Frekuensi Penghitungan: Tahunan</p> <hr/> <p>Kualitas Data</p> <ul style="list-style-type: none"> Frekuensi dan hasil penilaian kualitas data yang dilakukan <p>Cara Pengukuran: Audit dan review hasil assessment</p> <p>Satuan: Kali</p> <p>Frekuensi Penghitungan: Setiap 6 bulan</p>
<p>2.2. Pemanfaatan data SATUSEHAT SDM untuk pengembangan kebijakan</p>	<p>2.2.1 Menyediakan dashboard yang komprehensif, interaktif, dan sesuai kebutuhan direktorat (pengguna)</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Terdapat dashboard yang menampilkan data SDM sesuai kebutuhan direktorat (e.g Dashboard SDM, Dashboard SIP, Dashboard IKK/IKP, Dashboard Perencanaan) Dashboard yang tersedia terus diperbarui secara berkala mengikuti perkembangan kebutuhan direktorat pemilik program dan pengguna SATUSEHAT SDM Meningkatnya efisiensi operasional melalui penyediaan data dan laporan yang dapat diakses secara real-time. <i>Stakeholder</i> di berbagai level (pusat dan daerah) dapat memantau kinerja dan capaian terkait pengelolaan SDM kesehatan dengan lebih efektif. Meningkatnya jumlah laporan strategis kebijakan SDM yang memanfaatkan visualisasi data SATUSEHAT SDM 	<p>Ketersediaan Dashboard</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah dan relevansi dashboard yang tersedia sesuai kebutuhan direktorat <p>Cara Pengukuran: Audit dan review dashboard</p> <p>Satuan: Ketersediaan</p> <p>Frekuensi Penghitungan: Setiap 3 bulan</p> <hr/> <p>Pembaruan Dashboard</p> <ul style="list-style-type: none"> Frekuensi pembaruan dashboard sesuai dengan perkembangan kebutuhan direktorat <p>Cara Pengukuran: Monitoring dan log pembaruan</p> <p>Satuan: Kali</p> <p>Frekuensi Penghitungan: Setiap 3 bulan</p> <hr/> <p>Efisiensi Operasional</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyediaan data dan laporan yang dapat diakses secara real-time untuk meningkatkan efisiensi operasional <p>Cara Pengukuran: Review waktu akses dan respons data</p> <p>Satuan: Persentase peningkatan</p> <p>Frekuensi Penghitungan: Tahunan</p>

Luaran	Rincian Kegiatan	Aspek yang Diukur
<p>2.2. Pemanfaatan data SATUSEHAT SDMK untuk pengembangan kebijakan</p>	<p>2.2.1 Menyediakan dashboard yang komprehensif, interaktif, dan sesuai kebutuhan direktorat (pengguna)</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat dashboard yang menampilkan data SDMK sesuai kebutuhan direktorat (e.g Dashboard SDMK, Dashboard SIP, Dashboard IKK/IKP, Dashboard Perencanaan) • Dashboard yang tersedia terus diperbarui secara berkala mengikuti perkembangan kebutuhan direktorat pemilik program dan pengguna SATUSEHAT SDMK • Meningkatnya efisiensi operasional melalui penyediaan data dan laporan yang dapat diakses secara real-time. • <i>Stakeholder</i> di berbagai level (pusat dan daerah) dapat memantau kinerja dan capaian terkait pengelolaan SDM kesehatan dengan lebih efektif. • Meningkatnya jumlah laporan strategis kebijakan SDMK yang memanfaatkan visualisasi data SATUSEHAT SDMK 	<p>Monitoring Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan stakeholder di berbagai level untuk memantau kinerja dan capaian terkait pengelolaan SDM kesehatan <p>Cara Pengukuran: Survey dan feedback stakeholder</p> <p>Satuan: Persentase kepuasan Frekuensi Penghitungan: Tahunan</p> <hr/> <p>Jumlah Laporan Strategis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah laporan strategis kebijakan SDMK yang menggunakan visualisasi data <p>Cara Pengukuran: Hitung jumlah laporan yang dihasilkan</p> <p>Satuan: Jumlah laporan Frekuensi Penghitungan: Tahunan</p>
	<p>2.2.2 Menyusun panduan teknis pemanfaatan SATUSEHAT SDMK untuk fasyankes dan nakes/named.</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen petunjuk teknis yang mencakup sosialisasi, panduan pelaksanaan, pendampingan, dan pelatihan implementasi SATUSEHAT SDMK untuk fasyankes dan nakes/named • Dokumen petunjuk teknis diperbarui secara berkala sesuai perkembangan SATUSEHAT SDMK 	<p>Dokumentasi Petunjuk Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan dan relevansi petunjuk teknis untuk pelaksanaan SATUSEHAT SDMK <p>Cara Pengukuran: Pemeriksaan dokumen dan frekuensi pembaruan</p> <p>Satuan: Ketersediaan dan tanggal pembaruan Frekuensi Penghitungan: Setiap 6 bulan</p>

Luaran	Rincian Kegiatan	Aspek yang Diukur
<p>2.2. Pemanfaatan data SATUSEHAT SDMK untuk pengembangan kebijakan</p>	<p>2.2.3 Pengelolaan permintaan akses data dan prioritas permintaan data SATUSEHAT SDMK</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dokumen resmi SOP yang mengatur mekanisme permintaan data yang disertai dengan deadline, data spesifik, dan format data yang dibutuhkan Tersedianya platform/dokumentasi yang disepakati dalam forum koordinasi internal SATUSEHAT SDMK terkait permintaan akses dan prioritas data 	<p>SOP Pengelolaan Pengaduan</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya SOP yang mengatur pengelolaan pengaduan dan jalur komunikasi resmi <p>Cara Pengukuran: Pemeriksaan SOP dan implementasinya</p> <p>Satuan: Ketersediaan dan kelengkapan</p> <p>Frekuensi Penghitungan: Tahunan</p>
<p>2.3. Tersedianya mekanisme pengelolaan pengaduan dalam pemanfaatan SATUSEHAT SDMK</p>	<p>2.3.1. Menyusun mekanisme koordinasi dan evaluasi program lintas direktorat</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dokumen resmi SOP yang mengatur mekanisme pengelolaan pengaduan 	<p>Manajemen Aduan</p> <ul style="list-style-type: none"> Efektivitas langkah aksi yang diambil berdasarkan aduan yang diterima <p>Cara Pengukuran: Analisis laporan aduan dan tindak lanjut</p> <p>Satuan: Persentase penyelesaian</p> <p>Frekuensi Penghitungan: Tahunan</p>
	<p>2.3.2. Membangun saluran komunikasi internal yang dapat menyelaraskan aduan dengan tim helpdesk terpusat terkait pengelolaan aduan SATUSEHAT SDMK</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Terbentuknya jalur komunikasi resmi pengelolaan pengaduan antara Ditjen SDMK dengan tim helpdesk terpusat 	

Luaran	Rincian Kegiatan	Aspek yang Diukur
<p>2.3. Tersedianya mekanisme pengelolaan pengaduan dalam pemanfaatan SATUSEHAT SDM</p>	<p>2.3.3. Sosialisasi dokumen resmi SOP pengelolaan aduan SATUSEHAT SDM kepada fasyankes dan nakes/named</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya sosialisasi SOP mekanisme pengaduan kepada tim helpdesk, fasyankes, dan nakes/named Panduan dievaluasi dan diperbarui berkala sesuai kebutuhan atau regulasi terbaru 	<p>Efektivitas Sosialisasi SOP</p> <ul style="list-style-type: none"> Keberhasilan dalam menyampaikan SOP mekanisme pengaduan kepada tim helpdesk, fasyankes, dan nakes/named <p>Cara Pengukuran: Penilaian kehadiran dan umpan balik pasca sosialisasi</p> <p>Satuan: Persentase</p> <p>Frekuensi Penghitungan: Setiap sosialisasi</p> <p>Pembaruan Dokumen</p> <ul style="list-style-type: none"> Frekuensi dan relevansi pembaruan panduan sesuai kebutuhan atau perubahan regulasi <p>Cara Pengukuran: Audit dokumentasi dan tanggal pembaruan</p> <p>Satuan: Kali</p> <p>Frekuensi Penghitungan: Setiap 6 bulan</p>
	<p>2.3.4. Menyusun langkah aksi dari evaluasi rutin terhadap aduan yang diterima terkait SATUSEHAT SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya langkah aksi yang diikuti dengan langkah-langkah perbaikan yang jelas dan terkoordinasi dari evaluasi rutin dari aduan yang diterima Terjadi peningkatan pada aspek-aspek dalam SATUSEHAT SDM yang sebelumnya menjadi aduan 	<p>Efektivitas Tindakan Perbaikan</p> <ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan dan efektivitas langkah aksi yang diikuti dengan tindakan perbaikan dari evaluasi aduan yang diterima <p>Cara Pengukuran: Pemeriksaan catatan tindak lanjut aduan</p> <p>Satuan: Persentase penyelesaian</p> <p>Frekuensi Penghitungan: Setiap aduan</p> <p>Peningkatan Kualitas Sistem</p> <ul style="list-style-type: none"> Tingkat peningkatan pada aspek-aspek dalam SATUSEHAT SDM yang sebelumnya menjadi fokus aduan <p>Cara Pengukuran: Review performa sistem sebelum dan setelah tindakan perbaikan</p> <p>Satuan: Persentase peningkatan</p> <p>Frekuensi Penghitungan: Tahunan</p>
	<p>2.4.1. Melakukan pemetaan kebutuhan data dari NHWA dengan ketersediaan data dari SATUSEHAT SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dokumentasi ketersediaan data SATUSEHAT SDM untuk data NHWA 	<p>Ketersediaan Data NHWA</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dokumentasi yang memuat data NHWA yang diperlukan dalam SATUSEHAT SDM <p>Cara Pengukuran: Inspeksi dokumen ketersediaan data</p> <p>Satuan: Ketersediaan</p> <p>Frekuensi Penghitungan: Setiap 6 bulan</p>
<p>2.4. Terpenuhinya kebutuhan data NHWA dari SATUSEHAT SDM</p>		

Luaran	Rincian Kegiatan	Aspek yang Diukur
2.4. Terpenuhinya kebutuhan data NHTWA dari SATUSEHAT SDMK	2.4.2. Mengadakan forum koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk membangun komitmen bersama dan menyusun struktur tata kelola utama NHTWA yang terintegrasi dengan kebijakan nasional. <u>INDIKATOR KEBERHASILAN</u> <ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya sosialisasi kebutuhan NHTWA ke direktorat pemilik program 	Efektivitas Sosialisasi NHTWA <ul style="list-style-type: none"> Keberhasilan dalam menyampaikan kebutuhan NHTWA ke direktorat pemilik program Cara Pengukuran: Penilaian kehadiran dan umpan balik pasca sosialisasi Satuan: Persentase Frekuensi Penghitungan: Setiap sosialisasi
	2.4.3 Mengembangkan dashboard khusus berdasarkan indikator NHTWA sehingga dapat memaksimalkan penggunaan SATUSEHAT SDMK dalam skala yang lebih luas. <u>INDIKATOR KEBERHASILAN</u> <ul style="list-style-type: none"> Terdapat dashboard yang menyediakan kebutuhan informasi berdasarkan indikator NHTWA 	Aksesibilitas Dashboard NHTWA <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dashboard yang menyediakan kebutuhan informasi berdasarkan indikator NHTWA Cara Pengukuran: Pemeriksaan keberadaan dan fungsi dashboard Satuan: Ketersediaan Frekuensi Penghitungan: Setiap 3 bulan

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data SDMK, aplikasi SATUSEHAT SDMK akan menerapkan tata kelola data yang terstandar di semua platform terkait melalui koordinasi formal lintas direktorat yang akan dilakukan secara berkala.

Koordinasi ini akan memfokuskan pada peningkatan kualitas data, pemetaan kebutuhan, dan optimasi proses bisnis untuk mendukung pertukaran dan integrasi data yang lebih interoperable. Selain itu, kegiatan ini juga akan mendukung pengembangan standar data, kebijakan privasi, dan pelaksanaan audit privasi secara berkala.

4.2.3 Tema 3: Peningkatan Kapasitas SDM Internal

Tabel 4.4 Monitoring dan Evaluasi Tema 3: Kapasitas SDM

Luaran	Rincian Kegiatan	Aspek yang Diukur
<p>3.1 Terwujudnya program Data Champion pada Ditjen SDMK untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan dan pemanfaatan data SATUSEHAT SDMK secara optimal dan berkelanjutan</p>	<p>3.1.1 Melakukan penunjukan dan operasionalisasi Data Champion pada setiap unit di Ditjen SDMK untuk memperkuat pengelolaan dan pemanfaatan data secara strategis</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman unit pada Ditjen SDMK atas pengelolaan dan pemanfaatan data paling rendah sebesar 80% • Durasi ketersediaan data antara jadwal rilis dan pengumpulan tidak lebih dari 14 hari kerja • Jumlah kebijakan yang diambil untuk mendukung transformasi digital di lingkungan Ditjen SDMK 	<p>Pemahaman Pengelolaan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase unit yang memiliki pemahaman minimal 80% atas pengelolaan dan pemanfaatan data <p>Cara Pengukuran: Survei pemahaman Satuan: Persentase Frekuensi Penghitungan: Tahunan</p>
		<p>Kecepatan Ketersediaan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> • Waktu yang dibutuhkan dari jadwal rilis hingga pengumpulan data <p>Cara Pengukuran: Pengukuran waktu Satuan: Hari kerja Frekuensi Penghitungan: Setiap rilis data</p>
		<p>Jumlah Kebijakan Digital</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kebijakan yang diambil untuk mendukung transformasi digital <p>Cara Pengukuran: Pencatatan kebijakan Satuan: Jumlah kebijakan Frekuensi Penghitungan: Tahunan</p>
	<p>3.1.2 Meningkatkan kualitas dan kompetensi Data Champion melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan keterampilan terkait pengelolaan dan pemanfaatan data</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya Data Champion yang berkualitas dan kompeten untuk mendukung pengelolaan data yang lebih efektif dan efisien di Ditjen SDMK. • Durasi ketersediaan data antara jadwal rilis dan pengumpulan tidak lebih dari 14 hari kerja 	<p>Kompetensi Data Champion</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya Data Champion yang berkualitas dan kompeten <p>Cara Pengukuran: Evaluasi kinerja Satuan: Kualitas Frekuensi Penghitungan: Setiap 6 bulan</p>
	<p>Kepemimpinan Digital</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keberhasilan pengambil kebijakan memahami dan memanfaatkan teknologi digital <p>Cara Pengukuran: Survey kebijakan Satuan: Persentase Frekuensi Penghitungan: Tahunan</p>	

Luaran	Rincian Kegiatan	Aspek yang Diukur
<p>3.2 Terwujudnya program Digital Leadership pada Ditjen SDMK untuk mendorong transformasi digital yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan dalam pengelolaan SDMK</p>	<p>3.2.1 Mengembangkan dan melaksanakan program Digital Leadership untuk memastikan para pengambil kebijakan memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan dalam menghadapi tantangan digital</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Adanya kebijakan tentang teknologi digital terkini dan potensinya dalam pengelolaan SDMK. Jumlah kebijakan yang diambil untuk mendukung transformasi digital di lingkungan Ditjen SDMK Tersedianya rumusan kebijakan yang adaptif terhadap tantangan digital 	<p>Adaptivitas Kebijakan Digital</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya kebijakan yang adaptif terhadap tantangan digital <p>Cara Pengukuran: Review kebijakan Satuan: Ketersediaan Frekuensi Penghitungan: Tahunan</p> <hr/> <p>Jumlah Kebijakan Digital</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah kebijakan yang diambil untuk mendukung transformasi digital <p>Cara Pengukuran: Pencatatan kebijakan Satuan: Jumlah kebijakan Frekuensi Penghitungan: Tahunan</p>
	<p>3.2.2 Mendefinisikan kebutuhan data untuk mendukung pencapaian output, outcome, dan dampak melalui identifikasi dan dokumentasi kebutuhan data secara terstruktur</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah kebijakan yang diambil untuk mendukung transformasi digital di lingkungan Ditjen SDMK Jumlah data yang dimanfaatkan (dilihat, diunduh, diakses) oleh stakeholder 	<p>Jumlah Kebijakan Digital</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah kebijakan yang diambil untuk mendukung transformasi digital <p>Cara Pengukuran: Pencatatan kebijakan Satuan: Jumlah kebijakan Frekuensi Penghitungan: Tahunan</p>
		<p>Penggunaan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah data yang dimanfaatkan oleh stakeholder <p>Cara Pengukuran: Log aktivitas data Satuan: Jumlah akses Frekuensi Penghitungan: Tahunan</p>

Luaran	Rincian Kegiatan	Aspek yang Diukur
<p>3.2 Terwujudnya program Digital Leadership pada Ditjen SDMK untuk mendorong transformasi digital yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan dalam pengelolaan SDMK</p>	<p>3.2.3 Mendorong pelaksanaan pelatihan dan pembiasaan penggunaan data bagi pegawai Ditjen SDMK untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan serta pemanfaatan data</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman ASN/Pegawai Ditjen SDMK atas pengelolaan dan pemanfaatan data paling rendah sebesar 80% • Jumlah kebijakan yang diambil untuk mendukung transformasi digital di lingkungan Ditjen SDMK • Jumlah data yang dimanfaatkan (dilihat, diunduh, diakses) oleh stakeholder • Durasi ketersediaan data antara jadwal rilis dan pengumpulan tidak lebih dari 14 hari kerja 	<p>Pemahaman ASN/Pegawai</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase ASN/Pegawai yang memiliki pemahaman minimal 80% atas pengelolaan data <p>Cara Pengukuran: Survei pemahaman Satuan: Persentase Frekuensi Penghitungan: Tahunan</p>
		<p>Jumlah Kebijakan Digital</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kebijakan yang diambil untuk mendukung transformasi digital <p>Cara Pengukuran: Pencatatan kebijakan Satuan: Jumlah kebijakan Frekuensi Penghitungan: Tahunan</p>
		<p>Penggunaan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah data yang dimanfaatkan oleh stakeholder <p>Cara Pengukuran: Log aktivitas data Satuan: Jumlah akses Frekuensi Penghitungan: Tahunan</p>
<p>3.3 Terwujudnya peningkatan budaya pemanfaatan data di Ditjen SDMK untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti dan efisiensi operasional</p>	<p>3.3.1 Menyusun dan mengimplementasikan sistem knowledge management yang berkelanjutan dengan memanfaatkan berbagai media untuk mendukung pengelolaan dan berbagi pengetahuan di Ditjen SDMK</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase ASN/Pegawai Ditjen SDMK yang mengakses knowledge management system sebesar 75% setiap semesternya 	<p>Penggunaan Sistem Pengetahuan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase ASN/Pegawai yang mengakses sistem manajemen pengetahuan <p>Cara Pengukuran: Monitoring sistem Satuan: Persentase Frekuensi Penghitungan: Setiap Semester</p>

Luaran	Rincian Kegiatan	Aspek yang Diukur
<p>3.3 Terwujudnya peningkatan budaya pemanfaatan data di Ditjen SDM untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti dan efisiensi operasional</p>	<p>3.3.2. Memastikan capaian implementasi SATUSEHAT SDM menjadi salah satu agenda dalam pembahasan isu strategis lintas sektor secara berkala</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> 90% Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terdaftar dan menjadi pengguna aktif di SATUSEHAT SDM Paling rendah 70% K/L/D/I di tingkat pusat dan daerah mengikuti pembahasan capaian implementasi SDM dalam bentuk sosialisasi ataupun lokakarya setiap semester 	<p>Aktivitas Pengguna</p> <ul style="list-style-type: none"> Persentase tenaga kesehatan dan medis yang terdaftar dan aktif menggunakan SATUSEHAT SDM <p>Cara Pengukuran: Log sistem Satuan: Persentase Frekuensi Penghitungan: Tahunan</p>
	<p>3.3.3. Menyusun dan menerapkan mekanisme umpan balik pada setiap produk pemanfaatan data untuk memastikan kualitas, relevansi, dan kebermanfaatannya</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah kebijakan yang diambil untuk mendukung transformasi digital di lingkungan Ditjen SDM Tersedianya fitur manajemen umpan balik yang dioperasionalkan 	<p>Partisipasi Pembahasan Capaian</p> <ul style="list-style-type: none"> Persentase K/L/D/I yang mengikuti pembahasan capaian implementasi SDM <p>Cara Pengukuran: Catatan partisipasi Satuan: Persentase Frekuensi Penghitungan: Setiap Semester</p>
		<p>Jumlah Kebijakan Digital</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah kebijakan yang diambil untuk mendukung transformasi digital <p>Cara Pengukuran: Pencatatan kebijakan Satuan: Jumlah kebijakan Frekuensi Penghitungan: Tahunan</p>
		<p>Manajemen Umpan Balik</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya fitur manajemen umpan balik yang operasional dan efektif <p>Cara Pengukuran: Verifikasi fitur Satuan: Ketersediaan Frekuensi Penghitungan: Setiap Semester</p>

Program Data Champion dan Digital Leadership di Ditjen SDM akan diluncurkan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan dan pemanfaatan data SATUSEHAT SDM secara optimal dan berkelanjutan. Program Data Champion akan menyediakan pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan keterampilan untuk memastikan efisiensi pengelolaan data.

Sementara, program Digital Leadership akan bertujuan untuk menguatkan kapasitas pengambil kebijakan dalam menghadapi tantangan digital dengan mengidentifikasi kebutuhan data yang spesifik. Kedua program ini akan dirancang untuk memastikan bahwa pemahaman dan penggunaan data di Ditjen SDM akan mencapai target yang telah ditetapkan.

4.2.4 Tema 4: Ekosistem (Kemitraan Strategis) SATUSEHAT

Tabel 4.5 Monitoring dan Evaluasi Tema 3: Kapasitas SDM

Luaran	Rincian Kegiatan	Aspek yang Diukur
<p>4.1. Terjalinya kemitraan strategis antar stakeholder A-B-C-G-M (academician, business, community, government, media) untuk mengakomodasi kebutuhan pada setiap tahapan journey nakes dan named dari fase pendidikan hingga masuk ke pasar tenaga kerja SDM.</p>	<p>4.1.1. Formalisasi forum koordinasi lintas A-B-C-G-M melalui pembentukan <i>Technical Working Group</i></p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat dokumen resmi yang memuat peran, fungsi, area keterlibatan, serta agenda pertemuan <i>Technical Working Group</i> (TWG) SATUSEHAT SDM yang telah disahkan oleh Ditjen SDM. Dokumen memuat rencana kegiatan kolaboratif lintas sektor, termasuk peta kebutuhan dan sumber daya, guna mendukung kemitraan strategis dalam perjalanan nakes mulai dari fase pendidikan hingga masuk ke pasar tenaga kerja. • Peresmian TWG SATUSEHAT SDM melalui Surat Penunjukan Langsung oleh Ditjen SDM. Surat penunjukan memuat deskripsi tugas, wewenang, serta target utama TWG dalam mengoordinasikan kolaborasi lintas A-B-C-G-M 	<p>Dokumen TWG</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen resmi yang menguraikan peran, fungsi, dan agenda TWG <p>Cara Pengukuran: Verifikasi dokumen Satuan: Dokumen Frekuensi Penghitungan: Saat pembaharuan</p>
		<p>Peresmian TWG</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resminya TWG melalui surat penunjukan dari Direktur Jenderal <p>Cara Pengukuran: Verifikasi surat penunjukan Satuan: Dokumen Frekuensi Penghitungan: Saat inisiasi</p>
	<p>4.1.2 Melakukan perencanaan kemitraan strategis stakeholder A-B-C-G-M yang berpotensi terlibat dengan SATUSEHAT SDM untuk penguatan/pelebaran ekosistem SATUSEHAT SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya pedoman kemitraan strategis untuk perluasan ekosistem SATUSEHAT SDM yang berisi <i>framework</i> (kerangka kerja) dalam penentuan <i>stakeholder</i>, serta <i>stakeholder map</i>. Dokumen ini dapat berisi mitra-mitra strategis, baik di internal Kemenkes, serta eksternal Kemenkes yang berpotensi terlibat dalam ekosistem SATUSEHAT SDM dan potensi kolaborasinya • Tersusunnya rencana aksi kolaboratif yang jelas setelah penandatanganan MoU 	<p>Panduan Kemitraan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya panduan yang berisi <i>framework</i> kemitraan strategis <p>Cara Pengukuran: Verifikasi keberadaan panduan Satuan: Dokumen Frekuensi Penghitungan: Saat pembaharuan</p> <p>Rencana Aksi Kolaboratif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya rencana aksi kolaboratif pasca penandatanganan MoU <p>Cara Pengukuran: Verifikasi dokumen rencana aksi Satuan: Dokumen Frekuensi Penghitungan: Pasca MoU</p>

Luaran	Rincian Kegiatan	Aspek yang Diukur
<p>4.1. Terjalannya kemitraan strategis antar stakeholder A-B-C-G-M (academician, business, community, government, media) untuk mengakomodasi kebutuhan pada setiap tahapan journey nakes dan named dari fase pendidikan hingga masuk ke pasar tenaga kerja SDM.</p>	<p>4.1.3 Menghubungkan platform data SATUSEHAT SDM dengan platform data lainnya terkait journey nakes dan named, seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, LPDP, BKN, BKD, INA-CRR, Kemendikti Saintek dan K/L/D/I lainnya</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya regulasi resmi yang mengatur kerangka kerja kemitraan lintas platform data Tersedianya dokumentasi teknis yang mengonfirmasi kesesuaian standar integrasi dan interoperabilitas antar platform yang terlibat Terwujudnya kesepakatan MoU terkait <i>Data Transfer Agreement</i> untuk mendukung pertukaran dan integrasi data dengan A-B-C-G-M terkait 	<p>Regulasi Kemitraan</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya regulasi yang mengatur kemitraan lintas platform data <p>Cara Pengukuran: Verifikasi keberadaan regulasi Satuan: Dokumen Frekuensi Penghitungan: Saat inisiasi/regulasi baru</p>
	<p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dokumentasi yang mengonfirmasi kesesuaian standar integrasi dan interoperabilitas <p>Cara Pengukuran: Verifikasi dokumen Satuan: Dokumen Frekuensi Penghitungan: Saat revisi standar</p>	<p>Dokumentasi Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dokumentasi yang mengonfirmasi kesesuaian standar integrasi dan interoperabilitas <p>Cara Pengukuran: Verifikasi dokumen Satuan: Dokumen Frekuensi Penghitungan: Saat revisi standar</p>
	<p>4.1.4 Mengoptimalkan peran swasta untuk memfasilitasi kegiatan pelatihan bagi nakes dan named</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya kanal komunikasi resmi yang menghubungkan Ditjen SDM, terutama Dit. Peningkatan Mutu SDM dengan pihak swasta untuk koordinasi program pelatihan bagi nakes dan named 	<p>Kesepakatan MoU</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya MoU terkait Data Transfer Agreement <p>Cara Pengukuran: Verifikasi MoU Satuan: Dokumen Frekuensi Penghitungan: Saat penandatanganan</p>
		<p>Kanal Komunikasi Pelatihan</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya kanal komunikasi resmi untuk koordinasi program pelatihan <p>Cara Pengukuran: Verifikasi kanal Satuan: Kanal Frekuensi Penghitungan: Saat pembaharuan</p>

Luaran	Rincian Kegiatan	Aspek yang Diukur
<p>4.1. Terjalannya kemitraan strategis antar stakeholder A-B-C-G-M (academician, business, community, government, media) untuk mengakomodasi kebutuhan pada setiap tahapan journey nakes dan named dari fase pendidikan hingga masuk ke pasar tenaga kerja SDMk.</p>	<p>4.1.5 Mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk mengukur dampak dan keberlanjutan kemitraan strategis lintas A-B-C-G-M</p>	<p>Dokumen M&E</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dokumen yang memuat kerangka M&E untuk kemitraan strategis <p>Cara Pengukuran: Verifikasi dokumen Satuan: Dokumen Frekuensi Penghitungan: Saat pembaharuan</p>
	<p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dokumen resmi yang memuat kerangka monitoring dan evaluasi untuk kemitraan strategis lintas A-B-C-G-M Tersedianya mekanisme untuk merespons hasil evaluasi dengan langkah-langkah perbaikan atau penguatan terhadap kemitraan 	<p>Mekanisme Respons Evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya mekanisme untuk merespons hasil evaluasi dengan tindakan perbaikan <p>Cara Pengukuran: Verifikasi prosedur Satuan: Prosedur Frekuensi Penghitungan: Saat evaluasi</p>
<p>4.2. Terlibatnya A-B-C-G-M untuk mendukung komunikasi, informasi, dan edukasi terkait SATUSEHAT SDMk ke basis pengguna masing-masing</p>	<p>4.2.1 Mengoordinasikan dan menyebarkan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait SDMk melalui saluran komunikasi multi-channel</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dokumen resmi mekanisme kolaborasi KIE seperti kolaborasi dengan swasta untuk melaksanakan kegiatan pelatihan bagi nakes dan named 	<p>Sosialisasi Data</p> <ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya sosialisasi tentang kolaborasi pemanfaatan data untuk riset dan pengembangan kebijakan <p>Cara Pengukuran: Pencatatan kegiatan Satuan: Kegiatan Frekuensi Penghitungan: Setiap sosialisasi</p>
	<p>4.2.2 Melakukan advokasi pemanfaatan SATUSEHAT SDMk kepada A-B-C-G-M melalui platform masing-masing</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya sosialisasi peluang kolaborasi pemanfaatan dan keamanan data SATUSEHAT SDMk untuk keperluan riset dan pengembangan kebijakan kepada lintas A-B-C-G-M Terselenggaranya pertemuan dan diskusi pengembangan SATUSEHAT SDMk dengan keterlibatan aktif dari A-B-C-G-M 	<p>Ketentuan Segmentasi Data</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dokumentasi yang menjelaskan segmentasi dan pembatasan akses data <p>Cara Pengukuran: Verifikasi dokumen Satuan: Dokumen Frekuensi Penghitungan: Saat pembaharuan</p>
		<p>Pertemuan Pengembangan</p> <ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya pertemuan dengan keterlibatan aktif dari lintas sektor <p>Cara Pengukuran: Pencatatan pertemuan Satuan: Kegiatan Frekuensi Penghitungan: Periodik</p>

Luaran	Rincian Kegiatan	Aspek yang Diukur	
<p>4.2. Terlibatnya A-B-C-G-M untuk mendukung komunikasi, informasi, dan edukasi terkait SATUSEHAT SDM ke basis pengguna masing-masing</p>	<p>4.2.3 Mengoptimalkan peran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sebagai perpanjangan tangan helpdesk untuk memberikan dukungan teknis dan operasional kepada tenaga kesehatan di daerah</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat kanal komunikasi resmi antara pemerintah daerah dan pusat dalam pengelolaan aduan terkait SATUSEHAT SDM • Tersedianya dokumen petunjuk teknis helpdesk SATUSEHAT SDM untuk digunakan oleh OPD • Persentase masalah yang berhasil diselesaikan oleh OPD terkait SATUSEHAT SDM 	<p>Kebijakan Berbagi Data</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya kebijakan berbagi data yang diterima semua pihak <p>Cara Pengukuran: Verifikasi kebijakan Satuan: Kebijakan Frekuensi Penghitungan: Saat inisiasi</p> <hr/> <p>Dokumen Analisis Kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumentasi hasil riset/analisis kebijakan dari penggunaan data SATUSEHAT SDM <p>Cara Pengukuran: Verifikasi dokumen Satuan: Dokumen Frekuensi Penghitungan: Saat analisis selesai</p> <hr/> <p>Efektivitas Penyelesaian Masalah oleh OPD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase masalah yang berhasil diselesaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) <p>Cara Pengukuran: Pemantauan laporan masalah dan solusi yang disediakan oleh OPD Satuan: Persentase Frekuensi Penghitungan: Bulanan</p>	
	<p>4.3. Pemanfaatan dan/atau pertukaran data SATUSEHAT SDM untuk dibagipakaikan kepada lintas A-B-C-G-M</p>	<p>4.3.1 Menyusun mekanisme pemanfaatan dan/atau pertukaran data untuk dibagipakaikan kepada lintas A-B-C-G-M termasuk untuk keperluan riset/publikasi</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen resmi mekanisme pemanfaatan dan/atau pertukaran data lintas A-B-C-G-M yang aman dan terstandarisasi • Tersusunnya kebijakan berbagi data lintas A-B-C-G-M yang diterima semua pihak • Tersusunnya ketentuan segmentasi dan pembatasan akses data tertentu bagi A-B-C-G-M 	<p>Ketersediaan Dokumen Pertukaran Data</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumentasi resmi yang mengatur pertukaran data lintas sektor yang aman <p>Cara Pengukuran: Verifikasi keberadaan dan kelengkapan dokumen Satuan: Dokumen Frekuensi Penghitungan: Saat revisi kebijakan</p> <hr/> <p>Kebijakan Berbagi Data</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan yang mengatur berbagi data antar sektor yang diterima semua pihak <p>Cara Pengukuran: Review dan persetujuan kebijakan Satuan: Dokumen Frekuensi Penghitungan: Saat pembaharuan kebijakan</p> <hr/> <p>Segmentasi dan Pembatasan Akses Data</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan yang mengatur segmentasi dan pembatasan akses data <p>Cara Pengukuran: Dokumentasi dan penerapan ketentuan Satuan: Dokumen Frekuensi Penghitungan: Saat pembaharuan sistem</p>

Luaran	Rincian Kegiatan	Aspek yang Diukur
<p>4.3. Pemanfaatan dan/atau pertukaran data SATUSEHAT SDM untuk dibagipakaikan kepada lintas A-B-C-G-M</p>	<p>4.3.2 Menerima hasil riset/analisis kebijakan dari penggunaan /pemanfaatan data SATUSEHAT SDM untuk peningkatan kebijakan SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat dokumentasi dari hasil riset/analisis kebijakan dari penggunaan/pemanfaatan data SATUSEHAT SDM oleh akademisi, publik, maupun swasta • Hasil riset/analisis kebijakan diinformasikan dalam pertemuan koordinasi formal tim internal SATUSEHAT SDM untuk dijadikan insight bagi peningkatan SATUSEHAT SDM, dan SDM Indonesia 	<p>Dokumentasi Riset/Kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumentasi dari hasil riset atau analisis kebijakan menggunakan data SATUSEHAT SDM <p>Cara Pengukuran: Review dan arsip hasil riset atau analisis</p> <p>Satuan: Dokumen</p> <p>Frekuensi Penghitungan: Setiap riset/analisis selesai</p>
		<p>Penggunaan Hasil Riset</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan hasil riset atau analisis kebijakan dalam pertemuan koordinasi untuk pengembangan SATUSEHAT SDM <p>Cara Pengukuran: Evaluasi konten dan hasil pertemuan</p> <p>Satuan: Dokumen</p> <p>Frekuensi Penghitungan: Setiap Pertemuan Koordinasi</p>
	<p>4.3.3 Menyusun mekanisme pemanfaatan data SATUSEHAT SDM yang bisa diakses publik</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen resmi mekanisme pemanfaatan data SATUSEHAT SDM bagi publik • Tersusunnya ketentuan segmentasi dan pembatasan akses data tertentu bagi publik 	<p>Akses Publik ke Data</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen resmi yang mengatur mekanisme pemanfaatan data SATUSEHAT SDM oleh publik <p>Cara Pengukuran: Inspeksi dan verifikasi dokumen</p> <p>Satuan: Dokumen</p> <p>Frekuensi Penghitungan: Saat pembaharuan kebijakan</p>
		<p>Segmentasi Akses Data Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya ketentuan yang mengatur segmentasi dan pembatasan akses data bagi publik <p>Cara Pengukuran: Pemeriksaan kebijakan akses publik</p> <p>Satuan: Dokumen</p> <p>Frekuensi Penghitungan: Saat pembaharuan kebijakan</p>

Ditjen SDM akan memformalisasi Technical Working Group (TWG) SATUSEHAT SDM sebagai upaya strategis untuk menguatkan ekosistem kesehatan melalui kerjasama antar berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media.

Program ini akan bertujuan untuk mendukung perjalanan nakes dan named dari pendidikan hingga masuk ke pasar tenaga kerja dengan menyediakan platform koordinasi lintas sektor dan menyusun pedoman kemitraan yang detail.

4.3 Analisis Risiko dan Mitigasi

Analisis risiko dilakukan untuk mengidentifikasi potensi hambatan, baik dari aspek teknis, kebijakan, maupun SDM. Dari kemungkinan risiko-risiko yang muncul, disusun strategi mitigasi yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampak negatif dan dapat memastikan keberlanjutan program.

Dengan adanya analisis risiko dan rencana mitigasi, setiap tantangan dapat diantisipasi lebih dini, sehingga tidak menghambat transformasi digital dalam pengelolaan SDM agar tetap sesuai dengan target-target yang telah direncanakan di Peta Jalan SATUSEHAT SDM 2025-2029.

Tabel 4.6 Analisis Risiko dan Rencana Mitigasi Peta Jalan SATUSEHAT SDM 2025-2029

Risiko	Deskripsi	Rencana Mitigasi
PP turunan UU PDP belum terbit dalam 1-2 tahun mendatang	Turunan PP tidak muncul dalam 1-2 tahun mendatang sehingga dapat menyebabkan ketidakpastian dalam implementasi teknis dan operasionalisasi dalam perlindungan data pribadi di SATUSEHAT SDM	<ul style="list-style-type: none"> Adopsi <i>best practices</i> yang selama ini diberlakukan, baik secara nasional maupun internasional, dalam regulasi perlindungan data pribadi Menyusun pedoman terkait perlindungan data pribadi yang disepakati bersama dalam ekosistem SATUSEHAT SDM Melakukan sosialisasi kepada stakeholder terkait perlindungan data yang dapat dilakukan sebelum regulasi diterbitkan
Penerapan kebijakan tentang Sistem Pendukung Layanan Pemerintah (SPLP) terkait <i>service bus</i> oleh Komdigi yang diberlakukan secara ketat untuk K/L lainnya	Pemberlakuan kebijakan No. 1 tahun 2023 terkait SPLP secara ketat oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang mewajibkan seluruh K/L menggunakan SPLP dari Komdigi dapat mengakibatkan Kemenkes (SATUSEHAT SDM) harus <i>comply</i> dengan peraturan terkait SPLP dan menyebabkan perlunya perubahan rencana/desain untuk integrasi/interoperabilitas antar sistem di SATUSEHAT SDM	<ul style="list-style-type: none"> Meninjau kebijakan SPLP untuk memastikan <i>service bus</i> yang akan diterapkan agar tetap <i>comply</i> dengan peraturan Mengembangkan desain <i>service bus</i> yang secara umum mengikuti kebijakan terkait SPLP Memperkuat koordinasi dengan Komdigi untuk memastikan kepatuhan sejak awal
Tidak tersedianya anggaran yang memadai berkelanjutan untuk pengembangan SATUSEHAT SDM yang berkelanjutan	Kegagalan perencanaan anggaran pembiayaan untuk mengembangkan SATUSEHAT SDM ke depannya dapat menghambat eksekusi dan keberlanjutan peta jalan SATUSEHAT SDM dalam jangka panjang. Beberapa anggaran yang dibutuhkan antara lain terkait: <ul style="list-style-type: none"> Penganggaran bagi sistem yang terhubung dengan SATUSEHAT SDM untuk 	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan <i>concern</i> terkait pembiayaan berkelanjutan dibahas dalam Forum Koordinasi Internal SATUSEHAT SDM dan <i>Technical Working Group</i> Melakukan perumusan anggaran yang menjamin keberlanjutan seluruh program pengembangan SATUSEHAT SDM. Perumusan pembiayaan dimulai dengan identifikasi kebutuhan anggaran untuk SATUSEHAT SDM yang disertai dengan rincian pembiayaan. Serta, diperlukan pembuatan dokumen proposal pembiayaan SATUSEHAT SDM yang

Risiko	Deskripsi	Rencana Mitigasi
	<p>melakukan sertifikasi ISO 27001: 2002 terkait standar keamanan sistem informasi. Ketiadaan anggaran ini dapat menjadi pintu masuk bagi ancaman keamanan siber. Selain itu, jika standar ini harus diterapkan pada semua platform di setiap direktorat, potensi kelebihan anggaran dapat menghambat implementasi prioritas lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya alokasi anggaran yang memadai untuk infrastruktur server dan <i>maintenance</i> di masa mendatang dapat menyebabkan <i>downtime</i> sistem, keterbatasan kapasitas penyimpanan data, serta kegagalan dalam pemenuhan standar layanan digital yang diharapkan oleh tenaga kesehatan dan stakeholder terkait 	<p>mencakup kebutuhan jangka pendek, menengah, dan panjang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan advokasi dan konsultasi pembiayaan dengan Tim Kerja Perencanaan dan Anggaran, Sesditjen SDM • Melakukan pertemuan strategis dengan kementerian, lembaga donor, atau mitra pembangunan untuk mendapatkan komitmen pembiayaan berkelanjutan • Melakukan integrasi kebutuhan anggaran SATUSEHAT SDM dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan. Kebutuhan anggaran tercantum dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), dan adanya alokasi anggaran dalam APBN/APBD untuk mendukung pengembangan SATUSEHAT SDM <p>Terkait anggaran sertifikasi ISO 27001:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memprioritaskan implementasi ISO 27001 di area kritis/di platform-platform kritis terlebih dahulu • Melakukan evaluasi berbasis risiko untuk menentukan alokasi prioritas anggaran • Mempertimbangkan alternatif implementasi ISO 27001 untuk institusi, tidak spesifik untuk satu sistem informasi <p>Terkait anggaran infrastruktur server:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan inventarisasi kebutuhan server dan <i>clustering</i> server • Mengadvokasikan kebutuhan alokasi anggaran untuk menjamin keberlangsungan server yang optimal dan memastikan layanan SATUSEHAT SDM dapat dipakai oleh nakes dan named
<p>Kurangnya komitmen antar stakeholder dalam mewujudkan keamanan dalam proses integrasi dan interoperabilitas sistem</p>	<p>Ketiadaan komitmen yang sama antar stakeholder dalam mewujudkan keamanan dalam proses integrasi dan interoperabilitas sistem dapat menyebabkan adanya inkonsistensi dalam penerapan standar keamanan, kerentanan terhadap serangan siber, dan kegagalan dalam memastikan perlindungan data nakes dan named</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan update dan pertemuan secara berkala dengan stakeholder lainnya untuk memahami urgensi dari keamanan dan interoperabilitas antar sistem • Memberlakukan audit secara berkala untuk memastikan komitmen terkait keamanan sistem

Risiko	Deskripsi	Rencana Mitigasi
<p>Dinamika serta perubahan SDM dan SOTK dalam operasionalisasi Peta Jalan SATUSEHAT SDM</p>	<p>Dinamika terkait struktur organisasi dan pengelolaan SDM berpotensi menghambat akselerasi transformasi digital di lingkungan Kemenkes, khususnya dalam implementasi Peta Jalan SATUSEHAT SDM, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perubahan staf yang terjadi secara cepat di internal Kemenkes, seperti rotasi tenaga kerja antar direktorat, dapat menyebabkan hilangnya pengetahuan operasional terkait SATUSEHAT SDM. Misalnya, peran Data Champion, yang sebelumnya ditunjuk untuk memastikan keberlanjutan tata kelola data, bisa menjadi tidak efektif jika individu yang ditugaskan dipindahkan ke unit lain sebelum transfer knowledge yang memadai dilakukan. • Tidak adanya peran khusus yang bertanggung jawab atas integrasi dan orkestrasi sistem di Ditjen SDM dapat menghambat kelancaran transformasi digital. Contohnya, ketiadaan peran Tim Transformasi Organisasi (TTO) yang sebelumnya membantu mengoordinasikan keterhubungan antar-platform di Ditjen SDM, menyebabkan kurangnya kepemimpinan yang fokus pada keberlanjutan integrasi sistem digital di Kemenkes 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendokumentasikan dan mengelola berbagai informasi penting (knowledge management) yang di-update secara berkala sehingga transfer pemahaman ke staf pengganti berlangsung lancar • Mengembangkan mekanisme serah terima tugas dan tanggung jawab yang sistematis setiap terjadi perubahan staf • Mengadakan onboarding untuk personel baru yang berfokus pada transformasi digital • Mengadvokasikan pentingnya fungsi TTO agar tetap ada di setiap Direktorat Jenderal/Ditjen dan memastikan transformasi digital dan implementasi peta jalan SATUSEHAT SDM tetap berlangsung



Risiko	Deskripsi	Rencana Mitigasi
<p>Fasyankes yang masih di fase digitasi/digitalisasi belum siap sebagai perpanjangan tangan helpdesk serta validator/verifikator nakes/named di wilayah masing-masing</p>	<p>Meskipun beberapa fasyankes telah bertransformasi digital, banyak yang masih dalam tahap digitalisasi atau digitasi. Ketimpangan ini dapat menghambat implementasi Peta Jalan SATUSEHAT SDM, terutama dalam peran fasyankes sebagai perpanjangan tangan helpdesk dan pelaksanaan mekanisme validasi berjenjang dari nakes dan named, fasyankes, hingga dinkes</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan pendampingan teknis secara langsung untuk faskes yang masih di fase digitalisasi/digitasi • Melakukan monitoring berkala terhadap kemajuan transformasi di setiap faskes • Meninjau opsi pemberian insentif finansial untuk mempercepat proses transformasi digital di fasyankes sehingga siap berperan sebagai perpanjangan tangan helpdesk dan validator/verifikator nakes/named di wilayah masing-masing
<p>Potensi wanprestasi dalam kerjasama lintas A-B-C-G-M</p>	<p>Terdapat kemungkinan terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh mitra A-B-C-G-M terhadap kesepakatan yang telah disetujui bersama. Hal ini dapat menghambat proses perluasan ekosistem SATUSEHAT SDM</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi risiko menyeluruh dalam setiap kemungkinan kerjasama dengan lintas <i>stakeholder</i> A-B-C-G-M • Mengadakan kesepakatan mengikat antara kedua belah pihak (baik dari sisi Kemenkes, maupun dari A-B-C-G-M) agar dapat menjalankan kerjasama yang telah disepakati • Memformalisasikan peran TWG dengan SK untuk mengawal keberlangsungan kemitraan strategis dengan lintas A-B-C-G-M

UCAPAN TERIMA KASIH

Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam penyusunan **Peta Jalan SATUSEHAT SDM 2025-2029**. Dukungan, kerja sama, dan masukan dari berbagai pihak sangat berharga dalam memperkuat transformasi sistem informasi SDM di Indonesia. Kami menyampaikan apresiasi kepada:

1. Kementerian Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, Direktorat Penyediaan SDM, Direktorat Peningkatan Mutu SDM, Direktorat Perencanaan SDM, Direktorat Pendayagunaan SDM, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan SDM, Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan, Badan Kebijakan Pengembangan Kesehatan, Pusdatin/TTO
2. Badan Kepegawaian Nasional
3. National Health Workforce Account (NHWA)
4. World Health Organization (WHO) Indonesia
5. Technical Working Group SATUSEHAT
6. Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jakarta
8. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Administrasi Jakarta Selatan
10. Dinas Kesehatan Kota Surabaya
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Surabaya
12. Dinas Kesehatan Kota Kendari
13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Kendari
14. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Purwakarta
15. Perwakilan Tenaga Kesehatan - Perawat dan Apoteker
16. ThinkPolicy
17. Appskep Indonesia
18. Doctor2Doctor

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia
6. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan Melalui Sistem Informasi Kesehatan
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/133/2023 Tentang Integrasi Data Kesehatan Nasional melalui SatuSehat
11. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Membangun Integrasi Menuju Transformasi Digital Kesehatan: Laporan Tahunan Digital Transformation Office 2021-2022. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
12. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
13. HRH2030. (2021). Laporan Akhir Oktober 2021: Human Resources for Health in 2030 in Indonesia. Jakarta: USAID.
14. World Health Organization. (2023). National health workforce accounts: a handbook. Geneva: World Health Organization.
15. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Peta Jalan (Roadmap) Sistem Informasi SISD Kesehatan di Indonesia. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
16. Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives. (2023). White Paper: Indonesia's Health Sector Development (2024-2034). Jakarta: CISDI.
17. World Health Organization. (2019). WHO guideline: recommendations on digital interventions for health system strengthening. Geneva: World Health Organization.
18. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Tentang SATUSEHAT SDM. Jakarta: Kemenkes RI.
19. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). SDM Indonesia: NHWA Submission 2023. Jakarta: Kemenkes RI.
20. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Sistem Digital Pembelajaran Kesehatan. Jakarta: Kemenkes RI.
21. Kementerian Kesehatan RI. (2022). Pengembangan SatuSehat SDM. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. <https://www.kemkes.go.id/article/view/2022-pengembangan-satusehat-sdmk.html>
22. Palupi, D. H., & Hermawanto, H. (2022). Satu dekade sistem informasi sumber daya manusia kesehatan: Catatan perjalanan sebuah sistem. Jakarta, Indonesia.

Lampiran 1.

Tema 1: Teknologi Informasi

S1 = Semester 1, S2 = Semester 2 | P0, P1, P2, P3 = Prioritas sesuai *sequence* dan urgensi

Luaran	Rincian Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	Rekomendasi kebutuhan SDM
1.1. Terwujudnya mekanisme integrasi dan interoperabilitas yang efektif untuk mendukung pengelolaan data SDM kesehatan secara terintegrasi melalui aplikasi SATUSEHAT SDM.	P0 1.1.1. Merancang dan menetapkan mekanisme pertukaran data yang terstandar untuk mendukung interoperabilitas dalam aplikasi SATUSEHAT SDM. PIC: Datin Ditjen SDM, Pusdatin/TTO INDIKATOR KEBERHASILAN <ul style="list-style-type: none"> Menjaga transaksi data paling lambat 2 detik untuk setiap transaksi Tersedianya dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria dalam proses pertukaran data 	S1, S2					System Analyst, Business Analyst
	P0 1.1.2. Menerapkan layanan service bus sebagai perantara untuk integrasi data dan sistem dalam aplikasi SATUSEHAT SDM. PIC: Pusdatin/TTO, Datin Ditjen SDM INDIKATOR KEBERHASILAN <ul style="list-style-type: none"> 100% Platform yang memerlukan data SDM terintegrasi dengan SATUSEHAT SDM Menjaga transaksi data paling lambat 2 detik untuk setiap transaksi Menjaga kepatuhan terhadap SLA sebesar 99.9% setiap tahunnya Dependensi Kegiatan: 1.1.1	S2	S1	S1	S1	S1	System Analyst, Data Management Technician/Data Quality Engineer, Software Programmer
	P1 1.1.3. Mengembangkan dan menerapkan standar API (Application Programming Interface) untuk mendukung integrasi data dan sistem dalam aplikasi SATUSEHAT SDM. PIC: Pusdatin/TTO, Datin Ditjen SDM INDIKATOR KEBERHASILAN <ul style="list-style-type: none"> Menjaga transaksi data paling lambat 2 detik untuk setiap transaksi Standar interoperabilitas diadopsi oleh minimal 80% platform mitra Dependensi Kegiatan: 1.1.1	S2	S1				Software Programmer, System Analyst
1.2. Terjaminnya keamanan dalam proses integrasi dan interoperabilitas sistem melalui penerapan protokol enkripsi, otentikasi, dan otorisasi yang sesuai standar	P0 1.2.1. Menerapkan mekanisme teknis implementasi perlindungan data pribadi (PDP). PIC: Pusdatin/TTO, Datin Ditjen SDM INDIKATOR KEBERHASILAN <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya fitur untuk persetujuan penggunaan data pribadi Menjaga rata-rata CSAT 85% untuk setiap 3 bulan Dependensi Kegiatan: 2.1.5	S1, S2	S2	S2	S2	S2	Business Analyst, Software Programmer

Luaran	Rincian Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	Rekomendasi kebutuhan SDM
<p>1.2. Terjaminnya keamanan dalam proses integrasi dan interoperabilitas sistem melalui penerapan protokol enkripsi, otentikasi, dan otorisasi yang sesuai standar</p>	<p>PO 1.2.2. Menerapkan framework keamanan berlapis dengan standar ISO 27001:2022 pada setiap sistem yang akan saling terhubung untuk memastikan keamanan informasi.</p> <p>PIC: Pusdatin/TTO, Datin Ditjen SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya fitur untuk mengakses log transaksi data Menjaga persentase akses terindikasi ancaman paling tinggi 25% Menjaga rata-rata CSAT 85% untuk setiap 3 bulan <p>Dependensi Kegiatan: 2.1.5</p>	S1, S2	S2	S2	S2	S2	System Analyst, Business Analyst, Site Reliability Engineer
<p>1.3. Terjaminnya kinerja server yang optimal untuk mendukung kelancaran operasional dan pengelolaan data pada sistem.</p>	<p>PO 1.3.1. Menyusun dan mengimplementasikan rencana cadangan untuk infrastruktur teknologi guna mengantisipasi downtime server.</p> <p>PIC: Pusdatin/TTO, Datin Ditjen SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Menjaga kepatuhan terhadap SLA sebesar 99.9% setiap tahunnya Menjaga rata-rata CSAT 85% untuk setiap 3 bulan Menjaga kepatuhan terhadap SLA sebesar 99.9% setiap tahunnya Tersedianya fitur untuk mendeteksi ancaman dan atau gangguan 	S2	S1				Site Reliability Engineer
	<p>P2 1.3.2. Penyesuaian kapabilitas server untuk mengelola penggunaan SATUSEHAT SDM dalam berbagai macam situasi dan kondisi.</p> <p>PIC: Pusdatin/TTO, Datin Ditjen SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Menjaga kepatuhan terhadap SLA sebesar 99.9% setiap tahunnya Menjaga rata-rata CSAT 85% untuk setiap 3 bulan <p>Dependensi Kegiatan: 1.3.1</p>		S1, S2	S1, S2			Site Reliability Engineer
	<p>PO 1.3.3. Menerapkan sistem automated alerting dan incident tracking system untuk memonitor keamanan dan kesehatan sistem secara real-time sehingga dapat mendeteksi ancaman serta insiden dengan cepat.</p> <p>PIC: Pusdatin/TTO, Datin Ditjen SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Menjaga kepatuhan terhadap SLA sebesar 99.9% setiap tahunnya Tersedianya fitur untuk mendeteksi ancaman/gangguan Menjaga rata-rata CSAT 85% untuk setiap 3 bulan Menjaga persentase akses terindikasi ancaman paling tinggi 25% 	S1, S2					System Analyst, Business Analyst, Software Programmer

Lampiran 2.

Tema 2: Tata Kelola Data dan Organisasi

S1 = Semester 1, S2 = Semester 2 | P0, P1, P2, P3 = Prioritas sesuai *sequence* dan urgensi

Luaran	Rincian Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	Rekomendasi kebutuhan SDM
2.1. Terimplementasinya tata kelola data yang terstandar di seluruh platform SATUSEHAT SDM untuk mendorong peningkatan kualitas data	<p>P0 2.1.1. Melaksanakan koordinasi formal lintas direktorat yang dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan tata kelola data dan organisasi dalam pengembangan SATUSEHAT SDM.</p> <p>PIC: Ditjen SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi formal dilaksanakan secara berkala (triwulan) dengan adanya keterlibatan data champion dari setiap direktorat. Pertemuan koordinasi formal melingkupi: kualitas data, pemetaan kebutuhan data, proses bisnis, tata kelola, kebijakan terkait SATUSEHAT SDM, serta monitoring dan evaluasi program. Terdapat dokumentasi berisi hasil diskusi koordinasi formal lintas direktorat, dan diturunkan menjadi rencana aksi 						Public Policy Analyst, Business Analyst
	<p>P0 2.1.2. Melakukan pemetaan kebutuhan data dan informasi dari setiap program yang direncanakan.</p> <p>PIC: Ditjen SDM, Pusdatin/TTO, Datin Ditjen SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya peta kebutuhan data dan informasi, serta pertukaran data yang diperlukan oleh setiap Direktorat pada platform SATUSEHAT SDM, yang disusun berdasarkan hasil forum koordinasi internal SATUSEHAT SDM. Pemetaan data kebutuhan seperti: data STR pendidikan, peningkatan kompetensi, magang, <i>fellowship</i>, data kompetensi/pelatihan, named nakes DTPK untuk insentif, data pelanggaran disiplin dan perundungan, dan data-data lainnya yang perlu dipetakan berdasarkan kebutuhan tiap direktorat. <p>Dependensi Kegiatan: 2.1.1</p>	S1	S1	S1	S1	S1	Data Management Technician/Data Quality Engineer, Public Policy Analyst, Business Analyst
	<p>P1 2.1.3. Mengoptimalkan standar data terkait tenaga kesehatan untuk mendukung pertukaran dan integrasi data secara <i>interoperable</i>.</p> <p>PIC: Pusdatin/TTO, Datin Ditjen SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya kesepakatan MoU terkait <i>Data Transfer Agreement</i> untuk mendukung pertukaran dan integrasi data dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait Tersedianya dokumen protokol interoperabilitas yang memuat standar data terbaru, berfungsi sebagai panduan untuk pembaruan dan penilaian berkala <p>Dependensi Kegiatan: 1.1.1</p>	S2	S2	S2	S2	S2	Data Management Technician/Data Quality Engineer, Business Analyst

Luaran	Rincian Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	Rekomendasi kebutuhan SDM
	<p>P1 2.1.4. Mengoptimalkan kamus data terkait tenaga kesehatan untuk mendukung pertukaran dan integrasi data secara interoperable. PIC: Pusdatin/TTO, Datin Ditjen SDMK INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dokumen kamus data terbaru yang berfungsi sebagai panduan untuk pembaruan dan penilaian berkala <p>Dependensi Kegiatan: 1.1.1</p>	S2	S2	S2	S2	S2	Data Management Technician/Data Quality Engineer, Business Analyst
	<p>P1 2.1.5. Melakukan implementasi kebijakan privasi data pada SATUSEHAT SDMK. PIC: Pusdatin/TTO, Datin Ditjen SDMK INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dokumen kebijakan privasi data dan mekanisme teknis untuk perlindungan data Terlaksananya audit privasi data secara berkala dengan mengukur penilaian dampak PDP (<i>privacy impact assessment</i>) Terlaksananya kegiatan sosialisasi kepada K/L/D/I yang sudah terhubung dengan SATUSEHAT SDMK untuk meningkatkan kesadaran atas privasi dan keamanan data sesuai PDP dan ISO 27001: 2002 <p>Dependensi Kegiatan: 2.1.1</p>	S2	S2	S2	S2	S2	Public Policy Analyst, Business Analyst, Data Management Technician/Data Quality Engineer
	<p>P2 2.1.6. Melakukan tinjauan kebijakan terkait pengembangan SATUSEHAT SDMK PIC: Ditjen SDMK, Pusdatin/TTO, Datin Ditjen SDMK INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dokumen analisis kebijakan yang bertujuan untuk mengembangkan SATUSEHAT SDMK agar relevan dengan kebijakan yang berlaku seperti UU PDP, SIKN, dan lainnya Tersedianya dokumen rekomendasi kebijakan, rencana kerja, serta indikator yang mendukung pengembangan SATUSEHAT SDMK <p>Dependensi Kegiatan: 2.1.1</p>	S1	S1	S1	S1	S1	Public Policy Analyst
	<p>P1 2.1.7. mekanisme pengkinian data dan validasi data berjenjang untuk meningkatkan kualitas data SATUSEHAT SDMK. PIC: Ditjen SDMK, Pusdatin/TTO, Datin Ditjen SDMK INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya mekanisme pengkinian data bagi nakes/named terkait data SATUSEHAT SDMK Tersedianya mekanisme validasi berjenjang bagi fasyankes dan dinkes terkait data SATUSEHAT SDMK <p>Dependensi Kegiatan: 2.1.1</p>	S2	S1, S2				Data Management Technician/Data Quality Engineer, Data Analyst

Luaran	Rincian Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	Rekomendasi kebutuhan SDM
	<p>P1 2.1.8. Mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi terpadu yang mampu memantau secara real-time tata kelola data, kualitas data, dan pemanfaatannya, serta memastikan integrasi data ke dalam platform SATUSEHAT SDM untuk mendukung penerbitan laporan evaluasi berkala.</p> <p>PIC: Ditjen SDMK, Pusdatin/TTO, Datin Ditjen SDMK</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya mekanisme pemantauan seluruh komponen monitoring dan evaluasi yang mencakup: kualitas data, performa sistem, proses bisnis, tata kelola, kebijakan di lingkungan Kementerian Kesehatan, dan manajemen sistem informasi, pemanfaatan data oleh K/L/D/I, dan kepatuhan terhadap standar NHWA Terlaksananya penilaian <i>data quality assessment</i> secara berkala <p>Dependensi Kegiatan: 2.1.1</p>	S2	S2	S2	S2	S2	Business Analyst, Data Management Technician/Data Quality Engineer
<p>2.2. Pemanfaatan data SATUSEHAT SDM untuk pengembangan kebijakan</p>	<p>P1 2.2.1. Menyediakan dashboard yang komprehensif, interaktif, dan sesuai kebutuhan direktorat (pengguna).</p> <p>PIC: Pusdatin/TTO, Datin Ditjen SDMK</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Terdapat <i>dashboard</i> yang menampilkan data SDMK sesuai kebutuhan direktorat (e.g <i>Dashboard</i> SDMK, <i>Dashboard</i> SIP, <i>Dashboard</i> IKK/IKP, <i>Dashboard</i> Perencanaan) <i>Dashboard</i> yang tersedia terus diperbarui secara berkala mengikuti perkembangan kebutuhan direktorat pemilik program dan pengguna SATUSEHAT SDM Meningkatnya efisiensi operasional melalui penyediaan data dan laporan yang dapat diakses secara real-time. Stakeholder di berbagai level (pusat dan daerah) dapat memantau kinerja dan capaian terkait pengelolaan SDM kesehatan dengan lebih efektif. Meningkatnya jumlah laporan strategis kebijakan SDMK yang memanfaatkan visualisasi data SATUSEHAT SDM <p>Dependensi Kegiatan: 2.1.2</p>	S1, S2	Data Analyst, Data Engineer, Business Analyst				

Luaran	Rincian Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	Rekomendasi kebutuhan SDM
	<p>P2 2.2.2. Menyusun panduan teknis pemanfaatan SATUSEHAT SDM untuk fasyankes dan nakes/named.</p> <p>PIC: Ditjen SDM, Pusdatin/TTO, Datin Ditjen SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dokumen petunjuk teknis yang mencakup sosialisasi, panduan pelaksanaan, pendampingan, dan pelatihan implementasi SATUSEHAT SDM untuk fasyankes dan nakes/named Dokumen petunjuk teknis diperbarui secara berkala sesuai perkembangan SATUSEHAT SDM <p>Dependensi Kegiatan: 2.1.1</p>	S2	S2	S2	S2	S2	Business Analyst
	<p>P1 2.2.3. Pengelolaan permintaan akses data dan prioritas permintaan data SATUSEHAT SDM.</p> <p>PIC: Datin Ditjen SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dokumen resmi SOP yang mengatur mekanisme permintaan data yang disertai dengan tenggat waktu, data spesifik, dan format data yang dibutuhkan Tersedianya platform/dokumentasi yang disepakati dalam forum koordinasi internal SATUSEHAT SDM terkait permintaan akses dan prioritas data 	S1, S2	Business Analyst, Data Management Technician/Data Quality Engineer				
<p>2.3. Tersedianya mekanisme pengelolaan pengaduan dalam pemanfaatan SATUSEHAT SDM</p>	<p>P0 2.3.1. Menyusun mekanisme koordinasi dan evaluasi program lintas direktorat.</p> <p>PIC: Ditjen SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dokumen resmi SOP yang mengatur mekanisme pengelolaan pengaduan 	S1, S2					Business Analyst, Public Policy Analyst
	<p>P0 2.3.2. Membangun saluran komunikasi internal yang dapat menyelaraskan aduan dengan tim <i>helpdesk</i> terpusat terkait pengelolaan aduan SATUSEHAT SDM.</p> <p>PIC: Ditjen SDM, Pusdatin/TTO, Datin Ditjen SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Terbentuknya jalur komunikasi resmi pengelolaan pengaduan antara Ditjen SDM dengan tim <i>helpdesk</i> terpusat <p>Dependensi Kegiatan: 2.3.1</p>	S1, S2					Business Analyst, Public Policy Analyst

Luaran	Rincian Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	Rekomendasi kebutuhan SDM
	<p>P1 2.3.3. Sosialisasi dokumen resmi SOP pengelolaan aduan SATUSEHAT SDM kepada fasyankes dan nakes/named.</p> <p>PIC: Ditjen SDM, Pusdatin/TTO, Datin Ditjen SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya sosialisasi SOP mekanisme pengaduan kepada tim <i>helpdesk</i>, fasyankes, dan nakes/named • Panduan dievaluasi dan diperbarui berkala sesuai kebutuhan atau regulasi terbaru <p>Dependensi Kegiatan: 2.3.1</p>	S1	S1	S1	S1	S1	Public Policy Analyst
	<p>P2 2.3.4. Menyusun langkah aksi dari evaluasi rutin terhadap aduan yang diterima terkait SATUSEHAT SDM.</p> <p>PIC: Ditjen SDM, Pusdatin/TTO, Datin Ditjen SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya langkah aksi yang diikuti dengan langkah-langkah perbaikan yang jelas dan terkoordinasi dari evaluasi rutin dari aduan yang diterima • Terjadi peningkatan pada aspek-aspek dalam SATUSEHAT SDM yang sebelumnya menjadi aduan <p>Dependensi Kegiatan: 2.3.2</p>	S1, S2	Public Policy Analyst, Business Analyst				
<p>2.4. Terpenuhinya kebutuhan data NHWA dari SATUSEHAT SDM</p>	<p>P0 2.4.1. Melakukan pemetaan kebutuhan data dari NHWA dengan ketersediaan data dari SATUSEHAT SDM.</p> <p>PIC: Ditjen SDM, Pusdatin/TTO, Datin Ditjen SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumentasi ketersediaan data SATUSEHAT SDM untuk data NHWA <p>Dependensi Kegiatan: 2.1.1.</p>	S2	S1				Data Management Technician/Data Quality Engineer
	<p>P1 2.4.2. Mengadakan forum koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk membangun komitmen bersama dan menyusun struktur tata kelola utama NHWA yang terintegrasi dengan kebijakan nasional.</p> <p>PIC: Ditjen SDM, Pusdatin/TTO, Datin Ditjen SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya sosialisasi kebutuhan NHWA ke direktorat pemilik program 		S1, S2				Data Management Technician/Data Quality Engineer, Business Analyst, Public Policy Analyst

Luaran	Rincian Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	Rekomendasi kebutuhan SDM
	<p>P1 2.4.3. Mengembangkan dashboard khusus berdasarkan indikator NHTWA sehingga dapat memaksimalkan penggunaan SATUSEHAT SDM dalam skala yang lebih luas.</p> <p>PIC: Datin Ditjen SDMK, Pusdatin/TTO</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Terdapat dashboard yang menyediakan kebutuhan informasi berdasarkan indikator NHTWA <p>Dependensi Kegiatan: 2.4.1, 2.4.2</p>			S1, S2			Data Management Technician/Data Quality Engineer, Data Analyst, Data Engineer, Business Analyst

Lampiran 3.

Tema 3: Kapasitas SDM

S1 = Semester 1, S2 = Semester 2 | P0, P1, P2, P3 = Prioritas sesuai *sequence* dan urgensi

Luaran	Rincian Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	Rekomendasi kebutuhan SDM
3.1 Terwujudnya program Data Champion pada Ditjen SDMK untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan dan pemanfaatan data SATUSEHAT SDMK secara optimal dan berkelanjutan	<p>P0 3.1.1. Melakukan penunjukan dan operasionalisasi Data Champion pada setiap unit di Ditjen SDMK untuk memperkuat pengelolaan dan pemanfaatan data secara strategis.</p> <p>PIC: Ditjen SDMK</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemahaman unit pada Ditjen SDMK atas pengelolaan dan pemanfaatan data paling rendah sebesar 80% Durasi ketersediaan data antara jadwal rilis dan pengumpulan tidak lebih dari 14 hari kerja Jumlah kebijakan yang diambil untuk mendukung transformasi digital di lingkungan Ditjen SDMK 	S1	S1	S1	S1	S1	Data Management Technician/Data Quality Engineer, Public Policy Analyst
	<p>P1 3.1.2. Meningkatkan kualitas dan kompetensi Data Champion melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan keterampilan terkait pengelolaan dan pemanfaatan data.</p> <p>PIC: Ditjen SDMK</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya <i>Data Champion</i> yang berkualitas dan kompeten untuk mendukung pengelolaan data yang lebih efektif dan efisien di Ditjen SDMK. Durasi ketersediaan data antara jadwal rilis dan pengumpulan tidak lebih dari 14 hari kerja <p>Dependensi Kegiatan: 3.1.1</p>	S2	S1				Data Management Technician/Data Quality Engineer

Luaran	Rincian Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	Rekomendasi kebutuhan SDM
<p>3.2. Terwujudnya program Digital Leadership pada Ditjen SDMK untuk mendorong transformasi digital yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan dalam pengelolaan SDM kesehatan</p>	<p>P0 3.2.1. Mengembangkan dan melaksanakan program Digital Leadership untuk memastikan para pengambil kebijakan memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan dalam menghadapi tantangan digital.</p> <p>PIC: Ditjen SDMK</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya pengambil kebijakan tentang teknologi digital terkini dan potensinya dalam pengelolaan SDM kesehatan. • Jumlah kebijakan yang diambil untuk mendukung transformasi digital di lingkungan Ditjen SDMK • Tersedianya rumusan kebijakan yang adaptif terhadap tantangan digital 	S1, S2					Public Policy Analyst, Business Analyst, Data Analyst
	<p>P1 3.2.2. Mendefinisikan kebutuhan data untuk mendukung pencapaian output, outcome, dan dampak melalui identifikasi dan dokumentasi kebutuhan data secara terstruktur.</p> <p>PIC: Ditjen SDMK, Datin Ditjen SDMK</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kebijakan yang diambil untuk mendukung transformasi digital di lingkungan Ditjen SDMK • Jumlah data yang dimanfaatkan (dilihat, diunduh, diakses) oleh stakeholder <p>Dependensi Kegiatan: 3.2.1</p>		S1, S2				Data Management Technician/Data Quality Engineer, Business Analyst
	<p>P2 3.2.3. Mendorong pelaksanaan pelatihan dan pembiasaan penggunaan data bagi pegawai Ditjen SDMK untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan serta pemanfaatan data.</p> <p>PIC: Ditjen SDMK, Datin Ditjen SDMK</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman ASN/Pegawai Ditjen SDMK atas pengelolaan dan pemanfaatan data paling rendah sebesar 80% • Jumlah kebijakan yang diambil untuk mendukung transformasi digital di lingkungan Ditjen SDMK • Jumlah data yang dimanfaatkan (dilihat, diunduh, diakses) oleh stakeholder • Durasi ketersediaan data antara jadwal rilis dan pengumpulan tidak lebih dari 14 hari kerja <p>Dependensi Kegiatan: 3.2.2</p>		S2	S1, S2			Data Management Technician/Data Quality Engineer, Data Analyst

Luaran	Rincian Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	Rekomendasi kebutuhan SDM
<p>3.3. Terwujudnya peningkatan budaya pemanfaatan data di Ditjen SDM untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti dan efisiensi operasional.</p>	<p>P0 3.3.1. Menyusun dan mengimplementasikan sistem <i>knowledge management</i> yang berkelanjutan dengan memanfaatkan berbagai media untuk mendukung pengelolaan dan berbagi pengetahuan di Ditjen SDM.</p> <p>PIC: Ditjen SDM, Datin Ditjen SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Persentase ASN/Pegawai Ditjen SDM yang mengakses <i>knowledge management system</i> sebesar 75% setiap semesternya 	S1, S2	S1				Data Management Technician/Data Quality Engineer, Data Analyst
	<p>P1 3.3.2. Memastikan capaian implementasi SATUSEHAT SDM menjadi salah satu agenda dalam pembahasan isu strategis lintas sektor secara berkala.</p> <p>PIC: Ditjen SDM, Datin Ditjen SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> 90% Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terdaftar dan menjadi pengguna aktif di SATUSEHAT SDM Paling rendah 70% K/L/D/I di tingkat pusat dan daerah mengikuti pembahasan capaian implementasi SDM dalam bentuk sosialisasi ataupun lokakarya setiap semester 		S1, S2				Data Management Technician/Data Quality Engineer, Data Analyst, Public Policy Analyst
	<p>P1 3.3.3. Menyusun dan menerapkan mekanisme umpan balik pada setiap produk pemanfaatan data untuk memastikan kualitas, relevansi, dan kebermanfaatannya.</p> <p>PIC: Ditjen SDM, Datin Ditjen SDM, Pusdatin/TTO</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah kebijakan yang diambil untuk mendukung transformasi digital di lingkungan Ditjen SDM Tersedianya fitur manajemen umpan balik yang dioperasikan <p>Dependensi Kegiatan: 2.3.4</p>	S1	S1	S1	S1	S1	System Analyst, Data Management Technician/Data Quality Engineer, Software Programmer

Lampiran 4.

Tema 4: Ekosistem (Kemitraan Strategis)

S1 = Semester 1, S2 = Semester 2 | P0, P1, P2, P3 = Prioritas sesuai *sequence* dan urgensi

Luaran	Rincian Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	Rekomendasi kebutuhan SDM
<p>4.1. Terjalannya kemitraan strategis antar stakeholder A-B-C-G-M (<i>academician, business, community, government, media</i>) untuk mengakomodasi kebutuhan pada setiap tahapan journey nakes/named dari fase pendidikan hingga masuk ke pasar tenaga kerja SDM.</p>	<p>P0 4.1.1. Formalisasi forum koordinasi lintas A-B-C-G-M melalui pembentukan <i>Technical Working Group</i>. PIC: Ditjen SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat dokumen resmi yang memuat peran, fungsi, area keterlibatan, serta agenda pertemuan <i>Technical Working Group</i> (TWG) SATUSEHAT SDM yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal SDM. Dokumen memuat rencana kegiatan kolaboratif lintas sektor, termasuk peta kebutuhan dan sumber daya, guna mendukung kemitraan strategis dalam perjalanan nakes mulai dari fase pendidikan hingga masuk ke pasar tenaga kerja • Peresmian TWG SATUSEHAT SDM melalui Surat Penunjukan Langsung oleh Direktur Jenderal SDM. Surat penunjukan memuat deskripsi tugas, wewenang, serta target utama TWG dalam mengoordinasikan kolaborasi lintas A-B-C-G-M 	S2	S1				Public Policy Analyst, Business Analyst
	<p>P0 4.1.2. Melakukan perencanaan kemitraan strategis stakeholder A-B-C-G-M yang berpotensi terlibat dengan SATUSEHAT SDM untuk penguatan/pelebaran ekosistem SATUSEHAT SDM.</p> <p>PIC: TWG SATUSEHAT SDM</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya pedoman kemitraan strategis untuk pelebaran ekosistem SATUSEHAT SDM yang berisi <i>framework</i> (kerangka kerja) dalam penentuan stakeholder, serta stakeholder map. Dokumen ini dapat berisi mitra-mitra strategis, baik di internal Kemenkes, serta eksternal Kemenkes yang berpotensi terlibat dalam ekosistem SATUSEHAT SDM dan potensi kolaborasinya • Tersusunnya rencana aksi kolaboratif yang jelas setelah penandatanganan MoU <p>Dependensi Kegiatan: 4.1.1</p>		S1, S2				Data Management Technician/Data Quality Engineer, Public Policy Analyst, Business Analyst

Luaran	Rincian Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	Rekomendasi kebutuhan SDM
	<p>P1 4.1.3. Menghubungkan platform data SATUSEHAT SDMK dengan platform data lainnya terkait journey nakes/named, seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, LPDP, BKN, BKD, INA-CRR, Kemensainsdikti dan K/L/D/I lainnya.</p> <p>PIC: TWG SATUSEHAT SDMK</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya regulasi resmi yang mengatur kerangka kerja kemitraan lintas platform data Tersedianya dokumentasi teknis yang mengonfirmasi kesesuaian standar integrasi dan interoperabilitas antar platform yang terlibat Terwujudnya kesepakatan MoU terkait <i>Data Transfer Agreement</i> untuk mendukung pertukaran dan integrasi data dengan A-B-C-G-M terkait <p>Dependensi Kegiatan: 4.1.2</p>			S1, S2	S1, S2	S1, S2	Public Policy Analyst, Business Analyst
	<p>P1 4.1.4. Mengoptimalkan peran swasta untuk memfasilitasi kegiatan pelatihan bagi nakes/named.</p> <p>PIC: TWG SATUSEHAT SDMK</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya kanal komunikasi resmi yang menghubungkan Direktorat Peningkatan Mutu dengan pihak swasta untuk koordinasi program pelatihan bagi nakes/named <p>Dependensi Kegiatan: 4.1.1</p>			S2	S1, S2	S1, S2	Public Policy Analyst, Business Analyst
	<p>P2 4.1.5. Mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk mengukur dampak dan keberlanjutan kemitraan strategis lintas A-B-C-G-M.</p> <p>PIC: TWG SATUSEHAT SDMK</p> <p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dokumen resmi yang memuat kerangka monitoring dan evaluasi untuk kemitraan strategis lintas A-B-C-G-M Tersedianya mekanisme untuk merespons hasil evaluasi dengan langkah-langkah perbaikan atau penguatan terhadap kemitraan <p>Dependensi Kegiatan: 4.1.1</p>			S2	S1, S2	S1, S2	Public Policy Analyst, Business Analyst

Luaran	Rincian Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	Rekomendasi kebutuhan SDM
<p>4.2. Terlibatnya A-B-C-G-M untuk mendukung komunikasi, informasi, dan edukasi terkait SATUSEHAT SDMK ke basis pengguna masing-masing</p>	<p>P2 4.2.1. Mengoordinasikan dan menyebarkan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait SDMK melalui saluran komunikasi multi-channel. PIC: TWG SATUSEHAT SDMK INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dokumen resmi mekanisme kolaborasi KIE seperti kolaborasi dengan swasta untuk melaksanakan kegiatan pelatihan bagi nakes/named <p>Dependensi Kegiatan: 2.1.1; 4.1.1</p>		S1	S1	S1	S1	Public Policy Analyst, Business Analyst
	<p>P2 4.2.2. Melakukan advokasi pemanfaatan SATUSEHAT SDMK kepada A-B-C-G-M melalui platform masing-masing. PIC: TWG SATUSEHAT SDMK INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya sosialisasi peluang kolaborasi pemanfaatan dan keamanan data SATUSEHAT SDMK untuk keperluan riset dan pengembangan kebijakan kepada lintas A-B-C-G-M Terselenggaranya pertemuan dan diskusi pengembangan SATUSEHAT SDMK dengan keterlibatan aktif dari A-B-C-G-M <p>Dependensi Kegiatan: 2.2; 4.2.2; 4.4.2</p>		S1	S1	S1	S1	Public Policy Analyst, Business Analyst
	<p>P1 4.2.3. Mengoptimalkan peran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sebagai perpanjangan tangan helpdesk untuk memberikan dukungan teknis dan operasional kepada tenaga kesehatan di daerah. PIC: TWG SATUSEHAT SDMK INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Terdapat kanal komunikasi resmi antara pemerintah daerah dan pusat dalam pengelolaan aduan terkait SATUSEHAT SDMK Tersebaranya dokumen petunjuk teknis helpdesk SATUSEHAT SDMK untuk digunakan oleh OPD Persentase masalah yang berhasil diselesaikan oleh OPD terkait SATUSEHAT SDMK <p>Dependensi Kegiatan: 2.3; 4.2.1; 4.2.2</p>	S2	S1				Public Policy Analyst, Business Analyst

Luaran	Rincian Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	Rekomendasi kebutuhan SDM
<p>4.3. Pemanfaatan dan/atau pertukaran data SATUSEHAT SDM untuk dibagipakaikan kepada lintas A-B-C-G-M</p>	<p>P2 4.3.1. Menyusun mekanisme pemanfaatan dan/atau pertukaran data untuk dibagipakaikan kepada lintas A-B-C-G-M termasuk untuk keperluan riset/publikasi. PIC: TWG SATUSEHAT SDM INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dokumen resmi mekanisme pemanfaatan dan/atau pertukaran data lintas A-B-C-G-M yang aman dan terstandarisasi Tersusunnya kebijakan berbagi data lintas A-B-C-G-M yang diterima semua pihak Tersusunnya ketentuan segmentasi dan pembatasan akses data tertentu bagi A-B-C-G-M <p>Dependensi Kegiatan: 2.1.1</p>			S1, S2			Public Policy Analyst, Business Analyst
	<p>P3 4.3.2. Menerima hasil riset/analisis kebijakan dari penggunaan/pemanfaatan data SATUSEHAT SDM untuk peningkatan kebijakan SDM. PIC: TWG SATUSEHAT SDM INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Terdapat dokumentasi dari hasil riset/analisis kebijakan dari penggunaan/pemanfaatan data SATUSEHAT SDM oleh akademisi, publik, maupun swasta Hasil riset/analisis kebijakan diinformasikan dalam pertemuan koordinasi formal tim internal SATUSEHAT SDM untuk dijadikan insight bagi peningkatan SATUSEHAT SDM, dan SDM Indonesia <p>Dependensi Kegiatan: 4.4.2</p>			S2	S2	S2	Public Policy Analyst, Business Analyst
	<p>P3 4.3.3. Menyusun mekanisme pemanfaatan data SATUSEHAT SDM yang bisa diakses publik. PIC: TWG SATUSEHAT SDM INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dokumen resmi mekanisme pemanfaatan data SATUSEHAT SDM bagi publik Tersusunnya ketentuan segmentasi dan pembatasan akses data tertentu bagi publik <p>Dependensi Kegiatan: 2.1.1</p>				S1, S2		Public Policy Analyst, Business Analyst

Lampiran 5.

Daftar Aplikasi di Internal Ditjen SDM Kesehatan

No	Nama Aplikasi	Peruntukan Aplikasi	Status Integrasi SATUSEHAT
1	PIDGI https://logbook-pidgi.kemkes.go.id/pendamping/	Program Penempatan Dokter Gigi Umum yang sudah melalui Uji Kompetensi untuk ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan	Belum Terintegrasi
2	SIMAMA https://simama-poltekkes.kemkes.go.id/	Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan bagi Masyarakat	Belum Terintegrasi
3	Tracer Studi Lulusan Poltekkes https://tracerstudy-poltekkeskemenkes.id/	Untuk menelusuri jejak lulusan institusi pendidikan di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Aplikasi ini bertujuan untuk mengumpulkan data terkait ketersediaan lulusan di dunia kerja, relevansi antara pendidikan dan pekerjaan, serta kualitas pendidikan yang telah diterima.	Belum Terintegrasi
4	E-SERTIFIKAT http://esertifikatpelkes.kemkes.go.id	Sistem informasi Penugasan Khusus yang mengakomodir usulan kebutuhan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota, linkage/ pengintegrasian dengan aplikasi Sistem Informasi SDM Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Perencanaan Kebutuhan SDM dan Sistem Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.	Belum Terintegrasi
5	SIMAMA http://admin-simama-poltekkes.kemkes.go.id	Sistem administrator simama poltekkes. Pengelolaan admin untuk kegiatan penerimaan mahasiswa baru	Belum Terintegrasi
6	RENBUT http://renbut.kemkes.go.id	Untuk melakukan perhitungan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan di tingkat faskes yang akan diverifikasi oleh Dinas Kesehatan, Biro Organisasi/Ortala, BKD/BKPSDM, serta Kementerian Kesehatan yang akan dimanfaatkan sebagai usulan formasi named dan nakes di faskes	Belum Terintegrasi
7	Dashboard Perencanaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan https://dreams.kemkes.go.id	Aplikasi ini bertujuan untuk menampilkan data kekosongan dan standar minimal tenaga medis dan tenaga kesehatan di seluruh fasyankes milik Pemerintah di tingkat Kabupaten	
8	INTERNSIP / SIMPIDI http://internsip.kemkes.go.id	Informasi Umum, Pembuatan Akun dan Proses Penempatan Calon Peserta Internship. Pembuatan Akun, Penempatan Peserta, Verifikasi Data dan Dokumen sesuai yang dipersyaratkan	Belum Terintegrasi

No	Nama Aplikasi	Peruntukan Aplikasi	Status Integrasi SATUSEHAT
9	Pendayagunaan Dokter spesialis (PGDS) http://pgds.kemkes.go.id	Website atau sistem informasi yang memiliki fungsionalitas membuat usulan visitasi bagi Rumah Sakit-Rumah Sakit yang akan mengajukan PGDS, membuat pengajuan (usulan) PGDS bagi Rumah Sakit-Rumah Sakit yang memerlukan, menampilkan profil-profil Rumah Sakit yang merupakan calon lokasi penugasan, memilih lokasi penugasan bagi calon peserta PGDS, berdasarkan profil yang telah ditampilkan, dan menampilkan informasi-informasi terkait pelaksanaan PGDS, baik bagi Rumah Sakit-Rumah Sakit calon lokasi penugasan, maupun bagi calon peserta dan untuk pemberkasan bagi peserta PGDS yang telah memilih lokasi.	Belum Terintegrasi
10	TUGSUSNAKES http://tugsusnakes.kemkes.go.id	Aplikasi pendaftaran tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk menjadi peserta penugasan khusus yang ditempatkan di puskesmas DTPK dan DBK	Terintegrasi Sebagian
11	SIBK https://sibk.kemkes.go.id	Sistem Informasi Beasiswa Kementerian Kesehatan berisikan Informasi Umum, Pembuatan Akun dan Proses pendaftaran Calon Peserta penerima Bantuan Biaya Pendidikan, Pembuatan Akun Pemda pengusul, Pengelola Institusi Pendidikan dan Pengelola Pusat, percepatan Pembayaran SPP, BBH dan Biaya Penunjang pendidikan lainnya, Pengembalian dan Penempatan Pasca pendidikan Peserta, Verifikasi Data dan Upload Dokumen sesuai yang dipersyaratkan. Monitoring dan Evaluasi peserta saat pendidikan dan saat pengabdian	Terintegrasi Sebagian
12	SIMLITABKES http://simlitabkes.kemkes.go.id	Manajemen Pengajuan proposal penelitian, persetujuan proposal, plotting proposal, penilaian reviewer, penetapan proposal, penulisan catatan harian, penulisan laporan kemajuan, plotting monev, penilaian laporan kemajuan. Manajemen pengusulan, pelaksanaan dan monev penelitian di Poltekkes Kemenkes. Sebagai penetapan anggaran penelitian tahun berikutnya	Belum Terintegrasi
13	WEB BANDIKDOK http://bandikdok.kemkes.go.id	Sistem Informasi Bantuan Pendidikan Kedokteran Kementerian Kesehatan. Pendaftaran dan Seleksi Online PPDS	Belum Terintegrasi
14	Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) http://sisdmk.kemkes.go.id	Untuk mendata data tenaga kesehatan, tenaga medis, & tenaga penunjang yang berada di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta	Terintegrasi
15	Perpustakaan Setditjen Nakes https://perpustakaananditjennakes.kemkes.go.id/	Penyimpanan digital terpusat e-book di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Sebagai penyimpanan digital terpusat e-book di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	Tidak Terintegrasi

No	Nama Aplikasi	Peruntukan Aplikasi	Status Integrasi SATUSEHAT
16	E-Planning Setditjen Nakes https://eplanning-ditjennakes.kemkes.go.id/eplanning/eplanning_staff/	Aplikasi untuk usulan belanja modal Satuan Kerja. Aplikasi ini digunakan UPT untuk mengajukan usulan kebutuhan belanja modal yang dilengkapi dengan data dukung usulan kebutuhan, dan juga sebagai media bagi Unit Eselon I untuk memverifikasi usulan tsb	Belum Terintegrasi
17	Web Setditjen Nakes https://ditjen-nakes.kemkes.go.id/	Website Ditjen Nakes. Memuat informasi terkait Ditjen Nakes	Tidak Terintegrasi
18	Pendaftaran Pemilihan Direktur Poltekkes Kemenkes https://pildir-poltekkes.kemkes.go.id/	Website terkait pemilihan direktur Politeknik kementerian kesehatan RI	Tidak Terintegrasi
19	Sistem informasi program adaptasi Dokter Spesialis WNI Lulusan Luar Negeri https://ltn.kemkes.go.id/welcome	Mekanisme Evaluasi Kompetensi Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Lulusan Luar Negeri Untuk Memastikan Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Yang Berkualitas Dalam Pelayanan Kesehatan	Belum Terintegrasi
20	Sistem Informasi Pendayagunaan Residen Rumah Sakit Pendidikan Sebagai Penyelenggaraan Utama https://ppds.kemkes.go.id/	Sistem ini bertujuan untuk melakukan registrasi dan seleksi administrasi Pendidikan Dokter Spesialis berbasis Rumah Sakit sebagai Penyelenggara Utama secara optimal.	Terintegrasi Sebagian
21	E-STR https://kki.kemkes.go.id/registrasi/	1. Penerbitan STR Tenaga Kesehatan2. Terintegrasi dengan SATUSEHAT/SDMK3. Masih aktif digunakan	Terintegrasi Sebagian
22	EK Online Tenaga Kesehatan https://banksoal-ek.sims-nakes.id/	Aplikasi EK Online berguna untuk mempermudah Nakes dalam memenuhi kecukupan SKP dalam bentuk pelaksanaan ujian EK Online.	Tidak Terintegrasi
23	E-Ukom CAT JFK https://ukomcatjfk.kemkes.go.id/	Melakukan uji kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang dilakukan secara online melalui aplikasi Elektronik Uji Kompetensi Computer Assisted Test (CAT) secara serentak dan bersamaan pada tempat masing-masing yang telah terjadwal	Terintegrasi Sebagian
24	APKAL(Aplikasi Pendataan Kelengkapan Alat Laboratorium) https://apkal-ditjennakes.kemkes.go.id/	Berfungsi untuk pendataan alat, monitoring standar alat laboratorium, stock opname dari alat-alat yang berada di lingkungan poltekkes kemenkes. Terhubung dengan e-planning Setditjen Nakes yang digunakan untuk mengajukan usulan kebutuhan belanja modal alat-alat laboratorium di wilayah poltekkes kemenkes	Tidak Terintegrasi

No	Nama Aplikasi	Peruntukan Aplikasi	Status Integrasi SATUSEHAT
25	SKP Platform http://skp.kemkes.go.id/	Penyusunan Rumusan SKP Dokter /Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Tenaga Kesehatan	Terintegrasi Sebagian
26	Siakpel (Sistem Informasi Akreditasi Pelatihan) https://siakpel.kemkes.go.id/	Sistem Informasi yang bertujuan untuk mengakomodir proses monitoring kegiatan pelatihan khususnya di bagian Akun Pengendali Mutu Pelatihan dan peningkatan kompetensi khususnya pengajuan SKP.	Belum Terintegrasi
27	SIAKSI (Sistem Informasi Akreditasi Institusi) https://siaksi.kemkes.go.id/	Sistem Informasi yang bertujuan untuk proses pengajuan akreditasi Institusi penyelenggara pelatihan.	Belum Terintegrasi
28	Plataran Sehat (Platform Pembelajaran Digital Kesehatan) https://lms.kemkes.go.id/	Platform pembelajaran bagi nakes, named, ASN Kemenkes, Non ASN untuk kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi (seminar, webinar, workshop, konferensi, simposium) serta penerbitan e-sertifikat bernilai Satuan Kredit Profesi (SKP)	Terintegrasi Sebagian
29	Media Informasi Modul Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi (Website Dit. Mutu Nakes) http://ditmutunakes.kemkes.go.id/	Website Dit. Peningkatan Mutu Nakes yang berisikan informasi umum terkait struktur organisasi Dit. Peningkatan Mutu Nakes, nama-nama Institusi penyelenggara pelatihan terakreditasi beserta statusnya, kurikulum pelatihan bidang kesehatan, NSPK (Pedoman/Juklak/Juknis) yang telah diterbitkan dalam rangka menunjang peningkatan mutu tenaga kesehatan	Tidak Terintegrasi
30	Prototype Billing Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) https://ditmutunakes.id/ebilling/	Prototype aplikasi yang bertujuan untuk melakukan pembayaran PNBP Akreditasi Pelatihan dan PNBP Sertifikat Pelatihan.	Tidak Terintegrasi
31	Pengkajian Kebutuhan Pelatihan https://tna-kemkes.kawan.my.id/	Sistem Informasi yang diperuntukan untuk pengisian kuesioner, pengolahan data serta hasil dalam rangka pengkajian kebutuhan pelatihan baik bagi pemangku jabatan fungsional maupun tenaga kesehatan	Tidak Terintegrasi
32	Nakula Sehat (Perencanaan Kurikulum Pelatihan Bidang Kesehatan)	Sistem Informasi yang bertujuan untuk pengajuan dan pengesahan kurikulum pelatihan bidang kesehatan	Tidak Terintegrasi

Lampiran 6. Indikator Prioritas NHWA (WHO)

Berikut adalah indikator utama yang dapat menjadi fokus dalam pengembangan dashboard NHWA. Keberadaan indikator prioritas beserta sumber datanya ini dapat menjadi referensi dalam merancang pengembangan SATUSEHAT SDM di masa mendatang, serta dapat menjadi landasan dalam menentukan pihak-pihak yang perlu terhubung dengan SATUSEHAT SDM.

Indikator	Data	Deskripsi	Sumber Data
Modul 1 (Activity Level)	<ul style="list-style-type: none"> Practicing Professionally active Licensed to practice 	<ul style="list-style-type: none"> Berpraktik dan memberikan layanan secara langsung Memiliki SIP, bisa tidak memberikan layanan Surat Tanda Registrasi (headcount) 	Ditjen SDM
Modul 1 (Inflow dan Outflow)	<ul style="list-style-type: none"> Newly active foreign trained employed Voluntary Exit Involuntary Exit 	<ul style="list-style-type: none"> Tenaga Kesehatan atau Medis yang lulus dari Perguruan Tinggi/ Institusi Pendidikan luar negeri dan berpraktik di Indonesia. (WNI / WNA LLN) Jumlah tenaga kesehatan yang menjadi tidak aktif pada pasar tenaga kerja kesehatan karena migrasi, cuti sementara, pindah sektor, pensiun dini atau alasan lainnya. Jumlah tenaga kesehatan yang menjadi tidak aktif pada pasar tenaga kerja kesehatan karena meninggal dunia, pensiun (tidak termasuk pensiun dini), cuti, sakit jangka panjang atau alasan lain yang tidak disengaja (pada tahun tertentu) 	<ul style="list-style-type: none"> Ditjen SDM Ditjen SDM, BKN, Manpan
Modul 2 (Training Input and Output)	<ul style="list-style-type: none"> Application Enrolled Graduates by gender 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pendaftar dalam setiap enrollment / tahun ajaran baru Jumlah siswa diterima yang diterima dalam setiap enrollment / tahun ajaran baru Jumlah mahasiswa yang lulus dari pendidikan tenaga kesehatan, terhadap jumlah mahasiswa yang terdaftar di tahun pertama program pendidikan menurut jenis kelamin 	<ul style="list-style-type: none"> Kemendikbudristek, survei Kemendikbudristek https://sidata-ptnsnpmb.bppp.kemdikbud.go.id Kemendikbudristek
Modul 3 (Expenditure and remuneration)	<ul style="list-style-type: none"> Expenditure on compensation of health workforce Average entry-level wage and salary excluding social contributions 	<ul style="list-style-type: none"> Total kompensasi tenaga kesehatan menurut jenis profesi (healthcare financing scheme). Disagregasi pada fasilitas pemerintah dan swasta. Disajikan dalam satuan USD. Total pendapatan yang diterima tenaga kesehatan ketika memasuki pasar tenaga kerja kesehatan. Disagregasi pada fasilitas pemerintah dan swasta. Disajikan dalam satuan USD. 	<ul style="list-style-type: none"> Health account Kemenkeu, Kemenkes, besaran klaim jasa medis, Survei Data payroll, Kemenkeu, Kemenkes, Survei.

Lampiran 7.

Pemetaan Direktorat dan Kebutuhan Data terkait SATUSEHAT SDM

No	Direktorat	Peran terkait SATUSEHAT SDM	Kebutuhan Data	Rasionalisasi
1	Direktorat Perencanaan SDM	SATUSEHAT SDM menjadi basis utama dalam perhitungan perencanaan tenaga kesehatan, termasuk jumlah tenaga kesehatan, jenis kompetensi, dan tipe fasilitas kesehatan yang dibutuhkan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah tenaga kesehatan yang sudah ada (existing) Jenis fasilitas kesehatan (faskes) Asal lulusan tenaga kesehatan Lokasi dan tempat kerja tenaga kesehatan Profil tenaga kesehatan, yang mencakup kompetensi, keahlian, dan sektor tempat mereka bekerja Perencanaan tenaga kesehatan dihitung oleh Kementerian Kesehatan menggunakan dua metode: <ul style="list-style-type: none"> Metode Wilayah: Mengacu pada populasi dan epidemiologi penyakit (bekerja sama dengan kolegium dan perguruan tinggi) Metode Institusi: Berdasarkan beban kerja dan standar per fasilitas kesehatan, dengan menggunakan aplikasi Renbut untuk analisis kebutuhan tenaga kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai dasar perencanaan kebutuhan SDM Untuk memahami kebutuhan spesifik tenaga kesehatan di berbagai tipe layanan kesehatan Untuk memastikan keseimbangan antara ketersediaan tenaga kesehatan dan institusi pendidikan yang menghasilkan lulusan tersebut Untuk memastikan distribusi tenaga kesehatan dan mengidentifikasi wilayah dengan kebutuhan SDM tinggi Sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan tenaga kesehatan di masa mendatang
2	Direktorat Penyediaan SDM	Menggunakan SATUSEHAT SDM sebagai dasar pembuatan kebijakan dalam penyediaan tenaga kesehatan dengan menganalisis data tenaga kesehatan yang tersedia dan kebutuhannya di berbagai wilayah	<ul style="list-style-type: none"> Data lulusan dan mahasiswa Data kebutuhan tenaga kesehatan berdasarkan wilayah dan jenis faskes Data existing tenaga kesehatan dan registrasi baru Data kebutuhan peningkatan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> Untuk memantau jumlah tenaga kesehatan yang dihasilkan setiap tahun dan memastikan keseimbangan antara jumlah lulusan dengan kebutuhan tenaga kesehatan di daerah tertentu Untuk menyesuaikan kebijakan pengembangan program studi di institusi pendidikan kesehatan Untuk memperhitungkan alur (flow) tenaga kesehatan setiap tahunnya Untuk memastikan bahwa pemberian beasiswa tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan daerah yang mengalami kekurangan tenaga kesehatan

No	Direktorat	Peran terkait SATUSEHAT SDM	Kebutuhan Data	Rasionalisasi
3	Direktorat Peningkatan Mutu SDM	Mengoptimalkan ekosistem aplikasi dalam SATUSEHAT SDM untuk mendukung peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, termasuk integrasi dengan berbagai aplikasi di SATUSEHAT SDM, terutama di Plataran Sehat	<ul style="list-style-type: none"> Data profil tenaga kesehatan dari SATUSEHAT SDM, termasuk informasi kompetensi, sebaran tenaga kesehatan, dan riwayat pelatihan Data dari Plataran Sehat, termasuk data sertifikasi dan pelatihan yang telah diikuti Data SKP dan sertifikasi tenaga kesehatan Data tenaga kesehatan yang belum mengikuti pelatihan tertentu, misalnya dokter atau perawat yang belum mendapatkan pelatihan TIBI Data kebutuhan peningkatan kompetensi di setiap wilayah Data integrasi sertifikasi ke dalam profil tenaga kesehatan di SATUSEHAT SDM, yang saat ini arsitekturnya telah tersedia tetapi belum sepenuhnya terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> Untuk memperkaya informasi tenaga kesehatan dalam SATUSEHAT SDM Untuk memperkaya informasi tenaga kesehatan SATUSEHAT SDM dari Plataran Sehat Untuk memastikan keterkaitan antara pelatihan yang telah dilakukan dengan kebutuhan di masing-masing fasilitas kesehatan Untuk dapat dilakukan intervensi berbasis data untuk merancang program pelatihan yang lebih tepat sasaran Untuk memperkaya informasi tenaga kesehatan dalam SATUSEHAT SDM
4	Direktorat Pendayagunaan SDM	Peran Ditgun dalam SATUSEHAT SDM adalah pemanfaatan data kebutuhan (existing) nakes dan named	<ul style="list-style-type: none"> Data kebutuhan tenaga kesehatan di daerah Data tenaga kesehatan yang sudah didayagunakan, termasuk status penempatan dan pembaruan status kerja mereka Data fasilitas kesehatan (fasyankes) berdasarkan kategori, seperti rawat inap, daerah tertinggal, fasyankes terpencil, atau sangat terpencil Data integrasi dengan sistem rekrutmen tenaga kesehatan, terutama untuk penugasan khusus (Tugsus) Data real-time mengenai status tenaga kesehatan yang masih aktif atau tidak di fasyankes tertentu Dashboard pemenuhan tenaga kesehatan di Puskesmas dan fasyankes lain, yang menampilkan persentase ketersediaan tenaga kesehatan berdasarkan jenis profesi, seperti dokter umum, dokter gigi, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya Indikator capaian tenaga kesehatan yang diperbarui secara berkala, termasuk laporan bulanan tentang pemenuhan tenaga kesehatan di berbagai wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai dasar perencanaan pemenuhan tenaga kesehatan di setiap wilayah Untuk melihat pendayagunaan terupdate terkait data tenaga kesehatan Untuk menentukan prioritas penempatan tenaga kesehatan. Untuk memastikan proses seleksi, penempatan, dan pemantauan tenaga kesehatan berjalan lebih efektif. Untuk memastikan ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan daerah. Untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Direktorat Pendayagunaan berdasarkan ketersediaan tenaga kesehatan di fasyankes Untuk mendukung transparansi dan publikasi data yang lebih luas

No	Direktorat	Peran terkait SATUSEHAT SDM	Kebutuhan Data	Rasionalisasi
5	Direktorat Pembinaan dan Pengawasan SDM	<p>Terkait Jabfung, SDM bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, memiliki jabatan fungsional, melekat sesuai dengan jenis profesi.</p> <p>Binwas bertugas sebagai perumus kebijakan terkait pengembangan karir, perlindungan dan kesejahteraan named nakes, serta pengawasan dan penyelidikan terkait pelaksanaan peraturan perundangan bimbingan nakes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Data jabfung tenaga kesehatan, termasuk riwayat jabfung, SK jabfung pertama, jenjang jabfung yang telah dicapai (misalnya: Perawat Ahli Pertama tahun 1995, Ahli Muda tahun 2000, dan seterusnya) • Data angka kredit tenaga kesehatan • Riwayat perjalanan karir tenaga kesehatan, baik di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, termasuk durasi kerja di setiap institusi dan apakah tenaga kesehatan memenuhi persyaratan kenaikan jabfung • Data kesejahteraan tenaga kesehatan di sektor swasta, termasuk perbandingan antara hak yang seharusnya diterima berdasarkan perjanjian kerja dengan penghasilan yang diperoleh selama periode tertentu • Status kepegawaian tenaga kesehatan, terutama bagi tenaga kesehatan swasta yang bekerja dengan kontrak PKWT dan perlu dipantau agar memenuhi aturan PKWTT setelah perpanjangan kontrak maksimal dua kali • Data keterpenuhan tenaga kesehatan di Puskesmas dan fasyankes lainnya, dengan indikator jumlah tenaga kesehatan yang telah memenuhi kebutuhan di setiap jenis jabfung • Akses data pengawasan untuk Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk melihat kondisi terkini jabatan fungsional tenaga kesehatan • Untuk melihat progres karir dan kesiapan tenaga kesehatan dalam mencapai jabfung berikutnya • Untuk melihat progres karir dan kesiapan tenaga kesehatan dalam mencapai jabfung berikutnya • Untuk bahan pertimbangan terkait kesejahteraan tenaga kesehatan • Untuk memantau status kepegawaian tenaga kesehatan • Untuk melihat keterpenuhan data tenaga kesehatan berdasarkan kebutuhan di setiap jenis jabfung • Untuk melakukan tagging atau analisis terhadap tenaga kesehatan yang membutuhkan perhatian khusus dalam aspek pembinaan dan pengawasan



No	Direktorat	Peran terkait SATUSEHAT SDM	Kebutuhan Data	Rasionalisasi
6	Sekretariat KKI	<p>Mengelola perizinan tenaga kesehatan (nakes dan named) melalui SATUSEHAT SDM, termasuk registrasi STR seumur hidup, perizinan praktik (SIP), dan pemenuhan SKP sebagai syarat utama perizinan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Data perizinan tenaga kesehatan, termasuk registrasi STR seumur hidup, izin praktik (SIP), dan pemenuhan SKP yang dikelola melalui SATUSEHAT SDM • Data dari SKP Platform, mencakup capaian SKP, NIK, data profesi, data alamat, serta rekam jejak tenaga kesehatan • Data rekapitulasi jumlah pengusul SIP per kabupaten/kota dari MPP Digital, yang diperbarui secara harian, mingguan, dan bulanan • Data kendala dalam pengurusan SIP, termasuk alasan penolakan, kesalahan dokumen, atau hambatan teknis • Data kecepatan pelayanan di MPP Digital, seperti rata-rata lama waktu penerbitan SIP per hari • Data status keterisian SI-SDMK di setiap kabupaten/kota • Data sebaran tenaga kesehatan berdasarkan izin praktik, baik di sektor publik maupun swasta • Hak akses data untuk validasi dan pemantauan, khususnya bagi Itjen dan stakeholder terkait 	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk memantau proses perizinan tenaga kesehatan • Untuk memenuhi kewajiban keprofesian berkelanjutan • Untuk memantau tingkat penggunaan layanan digital di daerah • Untuk perbaikan layanan dan penyusunan panduan bagi tenaga kesehatan • Untuk mengidentifikasi faktor yang memperlambat atau memperlambat proses perizinan • Untuk memastikan bahwa daerah yang telah menggunakan MPP Digital dapat melakukan verifikasi tenaga kesehatan secara sistematis • Untuk mendukung pemetaan tenaga kesehatan yang lebih akurat • Untuk memastikan transparansi serta pengawasan yang lebih efektif terhadap regulasi perizinan tenaga kesehatan
7	Datin Sesditjen SDM	<p>Peran Datin terkait Satu Sehat SDM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mengelola data dan informasi di sistem informasi • mengelola data • mengelola sistem informasi di Ditjen SDM, termasuk integrasi dan layanan • memastikan SDM menggabungkan banyak proses yang dikelola di direktorat 	<ul style="list-style-type: none"> • Datin fokus untuk monitoring dan validasi data 	

No	Direktorat	Peran terkait SATUSEHAT SDM	Kebutuhan Data	Rasionalisasi
8	PASSKAS	<p>Peran Paskhas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Membuat breakdown kegiatan berdasarkan tupoksi masing-masing focal unit (Pusdatin/TTO, Datin, KKI) dan menentukan deadline milestone sesuai target Menkes Monitoring capaian target dari deadline yang sudah ditetapkan 	<ul style="list-style-type: none"> Data perencanaan tenaga kesehatan nasional, termasuk jumlah tenaga kesehatan berdasarkan epidemiologi wilayah dan standar minimal kebutuhan tenaga medis di fasyankes Data serapan lulusan dari universitas dan Poltekkes ke fasyankes Data rekrutmen tenaga kesehatan, termasuk jumlah tenaga kesehatan yang diterima melalui jalur ASN, penugasan khusus, dan penerima beasiswa Data peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, seperti pelatihan yang telah diikuti, STR pendidikan, internship, fellowship, dan program sertifikasi kompetensi lainnya Data tagging tenaga kesehatan di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) Data pengawasan dan disiplin tenaga kesehatan, termasuk pelanggaran disiplin dan kasus perundungan yang telah dicatat oleh Itjen dan Konsil Data kepatuhan fasilitas kesehatan terhadap sistem perizinan, baik di kabupaten/kota yang sudah menggunakan MPP Digital maupun yang belum Data perizinan tenaga kesehatan, termasuk SIP khusus untuk PPDS, WNI lulusan luar negeri (LLN), dan tenaga kesehatan dalam program percepatan pemenuhan kebutuhan Data tagging dan analisis pengembangan tenaga kesehatan, seperti jumlah tenaga kesehatan yang masih aktif, riwayat pekerjaan, serta rata-rata waktu penerbitan SIP di berbagai daerah Data dari dashboard SATUSEHAT SDM, seperti: <ul style="list-style-type: none"> Dashboard publik SATUSEHAT SDM (untuk akses masyarakat) Dashboard perencanaan nasional (untuk memantau kekurangan dokter di wilayah tertentu) Dashboard monitoring penerbitan SIP (untuk memastikan transparansi dalam proses perizinan tenaga kesehatan) 	<ul style="list-style-type: none"> Untuk kebutuhan perencanaan tenaga kesehatan nasional Untuk mengevaluasi efektivitas program pendidikan tenaga kesehatan dalam memenuhi kebutuhan daerah Untuk kebutuhan perencanaan tenaga kesehatan nasional Untuk melihat status terkini peningkatan kompetensi tenaga kesehatan Untuk keperluan insentif dan kebijakan pemerataan distribusi tenaga kesehatan Untuk memantau dan mengevaluasi disiplin tenaga kesehatan Untuk percepatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan Untuk melihat kepatuhan daerah terkait perizinan, dan mengetahui daerah yang sudah menggunakan MPP digital/belum Untuk membantu analisis pengembangan tenaga kesehatan

Lampiran 8.

Rekomendasi Peran SDM Operasionalisasi SATUSEHAT SDMK

Setiap peran dirancang untuk memastikan SATUSEHAT SDMK dapat beroperasi secara efisien, andal, serta mendukung kebutuhan analitik dan kebijakan kesehatan berkelanjutan. Melalui pengelolaan, integrasi, dan optimalisasi data, serta pengembangan solusi teknologi, peran-peran ini berkontribusi pada transformasi digital sektor kesehatan untuk meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan di Indonesia.

Peran	Tugas dan Fungsi	Kegiatan di Peta Jalan	Deskripsi Pekerjaan
System Analyst	Mengembangkan dan menganalisis spesifikasi teknis sistem	6 kegiatan (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2.2, 1.3.3, 3.3.3)	Bertanggung jawab untuk mendesain dan menganalisis kebutuhan sistem, memastikan integrasi sistem berfungsi sesuai kebutuhan operasional dalam SATUSEHAT SDMK.
Public Policy Analyst	Menganalisis dan mengevaluasi kebijakan publik	23 kegiatan (2.1.1, 2.1.2, 2.1.5, 2.1.6, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.4.2, 3.1.1, 3.2.1, 3.3.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3)	Menilai dan merekomendasikan kebijakan berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dalam operasional SATUSEHAT SDMK.
Business Analyst	Menyusun kebutuhan bisnis dan solusi teknologi	31 kegiatan (1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.8, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4, 2.4.2, 2.4.3, 3.2.1, 3.2.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3)	Mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan mengembangkan solusi teknologi yang menunjang efisiensi dan efektivitas operasional SATUSEHAT SDMK.
Data Management Technician/ Data Quality Engineer	Mengatur dan mengoptimalkan penggunaan data	18 kegiatan (1.1.2, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.8, 2.2.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3)	Mengelola, mengatur, dan memastikan integritas data dalam SATUSEHAT SDMK, serta memaksimalkan pemanfaatan data untuk kebutuhan organisasi.
Data Analyst	Menganalisis data untuk mendukung pengambilan keputusan	7 kegiatan (2.1.7, 2.2.1, 2.4.3, 3.2.1, 3.2.3, 3.3.1, 3.3.2)	Bertanggung jawab mengolah dan menganalisis big data, memberikan insight yang dapat mendukung keputusan strategis dalam SATUSEHAT SDMK.
Data Engineer	Mengembangkan arsitektur data yang efisien	2 kegiatan (2.2.1, 2.4.3)	Merancang dan mengimplementasikan struktur data yang efektif untuk mendukung analisis dan penyimpanan data dalam sistem SATUSEHAT SDMK.
Software Programmer	Menulis kode untuk mengembangkan dan memelihara software	5 kegiatan (1.1.2, 1.1.3, 1.2.1, 1.3.3, 3.3.3)	Mengembangkan dan memelihara aplikasi atau software yang mendukung fungsi-fungsi dalam SATUSEHAT SDMK, memastikan kode bersih dan efisien.
Site Reliability Engineer	Memastikan keandalan dan stabilitas platform online	3 kegiatan (1.2.2, 1.3.1, 1.3.2)	Bertanggung jawab untuk memelihara keandalan infrastruktur teknologi, mengatasi isu teknis dan memastikan sistem SATUSEHAT SDMK beroperasi tanpa hambatan.

Lampiran 9.

Peran dan Fungsi *Data Champion*, Forum Koordinasi Internal SATUSEHAT SDM, dan *Technical Working Group* SATUSEHAT SDM

1. *Data Champion* ~ turunan kegiatan Peta Jalan tema 3: Kapasitas SDM

Peran: Memastikan terwujudnya tata kelola data pada setiap unit

Fungsi:

- Membuat daftar data termasuk dengan kategori prioritas
- Mengumpulkan data yang tercantum pada daftar data sesuai dengan periode waktu pengumpulan
- Memproduksi data yang tercantum pada daftar data sesuai dengan periode waktu produksinya sesuai dengan standar yang sudah ditentukan
- Memberikan masukan dalam penyusunan standar data
- Menjadi *person-in-charge* unit dalam berbagi pakai data
- Merekomendasikan akses segmen data dan ketentuan data mana saja yang bisa diakses oleh tingkatan segmen user tertentu

Pihak yang terlibat: Semua direktorat di Ditjen SDM memiliki *Data Champion*

2. Forum Koordinasi Internal SATUSEHAT SDM ~ turunan kegiatan Peta Jalan tema 2: Tata Kelola Data dan Organisasi

Peran: Memaksimalkan tata kelola data dan organisasi, serta keterlibatan *stakeholder* dalam pengelolaan SATUSEHAT SDM di dalam internal Kementerian Kesehatan (Ditjen SDM)

Fungsi:

- Memetakan bisnis proses yang bisa dikembangkan di tiap direktorat SDM
- Memetakan pemanfaatan data
- Memetakan standardisasi data di SATUSEHAT SDM
- Menyusun panduan atau petunjuk teknis yang dapat dimanfaatkan oleh Pemda/Dinkes/Fasyankes
- Melakukan monitoring dan evaluasi berkala dari program-program terkait SATUSEHAT SDM

Pihak yang terlibat: Datin Ditjen SDM, Pusdatin/TTO, Direktorat (PMO dan *Data Champion*), PASSKAS

3. *Technical Working Group* SATUSEHAT SDM ~ turunan kegiatan Peta Jalan tema 4: Ekosistem (Kemitraan Strategis)

Peran: Memperluas ekosistem SATUSEHAT SDM dengan melibatkan A-B-C-G-M

Fungsi:

- Memetakan *stakeholder* yang berpotensi terlibat dalam kemitraan strategis SATUSEHAT SDM untuk penguatan/perluasan ekosistem SATUSEHAT SDM
- Merencanakan kolaborasi strategis antar *stakeholder* lintas A-B-C-G-M
- Menyebarkan informasi dan edukasi terbaru (*update*) terkait SATUSEHAT SDM
- Mendorong advokasi penggunaan SATUSEHAT SDM ke nakes dan named di basis pengguna A-B-C-G-M masing-masing

Pihak yang terlibat: Datin Ditjen SDM, Pusdatin/TTO, Direktorat (PMO dan *Data Champion*), PASSKAS, BKPK, WHO, K/L/D/I lainnya, Swasta, *Health Expert*, Media (merujuk pada kolaborasi A-B-C-G-M)

NB: Posisi TWG SATUSEHAT SDM perlu ditentukan, apakah sebagai TWG terpisah dari TWG SATUSEHAT atau bagian dari TWG SATUSEHAT dengan peran tambahan dalam membangun ekosistem SATUSEHAT SDM.

Lampiran 10. Tinjauan Kebijakan

Peraturan berikut menjadi landasan hukum dan kebijakan bagi penyelenggaraan SATUSEHAT SDM.

No	Nomor dan Tahun	Kebijakan Terkait	Relevansi dengan SATUSEHAT SDM
1	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023	Kesehatan	Menetapkan dasar hukum bagi pengelolaan data kesehatan nasional, termasuk integrasi data SDM melalui platform seperti SATUSEHAT SDM
2	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022	Pelindungan Data Pribadi	Menetapkan kerangka hukum untuk pelindungan data pribadi, termasuk data kesehatan dalam SATUSEHAT SDM, memastikan pengelolaan data sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data
3	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Mengatur penyelenggaraan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi, termasuk perlindungan data dalam SATUSEHAT SDM agar sesuai dengan standar keamanan data dan interoperabilitas nasional
4	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Mendorong digitalisasi layanan pemerintahan, termasuk sektor kesehatan, sehingga mendukung implementasi SATUSEHAT SDM
5	Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019	Satu Data Indonesia	Menetapkan kebijakan tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, relevan dengan integrasi data SDM dalam SATUSEHAT SDM
6	Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022	Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional	Menetapkan arsitektur SPBE nasional yang menjadi acuan dalam pengembangan sistem elektronik, termasuk SATUSEHAT SDM
7	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2022	Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan melalui Sistem Informasi Kesehatan	Mengatur penyelenggaraan satu data bidang kesehatan yang terintegrasi melalui sistem informasi kesehatan, mendukung operasional SATUSEHAT SDM

No	Nomor dan Tahun	Kebijakan Terkait	Relevansi dengan SATUSEHAT SDM
8	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022	Rekam Medis	Mengatur kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan rekam medis elektronik yang terintegrasi dengan platform seperti SATUSEHAT SDM
9	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/133/2023	Integrasi Data Kesehatan Nasional melalui SATUSEHAT	Menetapkan SATUSEHAT sebagai platform integrasi data kesehatan nasional, termasuk data SDM
10	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023	Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional	Mendorong percepatan transformasi digital di berbagai sektor, termasuk kesehatan, yang relevan dengan implementasi SATUSEHAT SDM

Peta Jalan
SATUSEHAT SDM
2025-2029

Optimalisasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia
Kesehatan untuk Mendukung Pengelolaan Tenaga
Kesehatan yang Efektif dan Berkualitas



Kemenkes



THINK POLICY



World Health
Organization
Indonesia